

PERANAN PROGRAM PKPR (PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA) TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KECAMATAN BULELENG

Ni Luh Kadek Alit Arsani¹, Ni Nyoman Mestri Agustini², I Ketut Indra Purnomo³
^{1,3}Jurusan Ilmu Keolahragaan, ²Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: alit_arsani@yahoo.com, mes3_dip@yahoo.co.id, asalkode@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peranan Puskesmas dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); 2) Keterlaksanaan program PKPR terhadap kesehatan reproduksi remaja; 3) Peranan program PKPR terhadap kesehatan reproduksi remaja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan *focus group discussion*. Informan dipilih secara *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif model dari Miles dan Huberman terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Puskesmas dalam program PKPR adalah sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan di masyarakat termasuk remaja; 2) Program PKPR yang dicanangkan Puskesmas Buleleng 1 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat 1 sasaran yang belum tercapai yaitu pembentukan konselor sebaya serta belum maksimalnya sosialisasi kepada remaja secara luas; 3) PKPR dirasakan memiliki peranan yang sangat penting bagi remaja.

Kata kunci : kesehatan reproduksi, PKPR, remaja

Abstract

The aim of this study was to determine, 1) the role of community health centres (*Puskesmas*) in the health care services adolescent program, 2) the implementation of health care services adolescent programs on adolescent reproductive health, and 3) the role of health care services adolescent program on adolescent reproductive health. The method used in this study, is qualitative method, by interviews, observation, and focus group discussion. Informants selected by purposive sampling. Data were analyzed using interactive analysis model of Miles and Huberman consists of four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion /verification.

The results showed that: 1) The role of community health centers in health care services adolescent program (PKPR) is spearheading health providers in the community, including youth, 2) health care services adolescent program in community health centers (Puskesmas Buleleng 1) most have done well, but still there is one goal that has not been achieved, namely the formation of peer counselors and have maximum outreach to adolescents is widely; 3) perceived health care services adolescent program has a very important role for adolescents.

Key words: health care services adolescent program, reproductive health, adolescent.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara dinamis dan pesat baik fisik, psikologis, intelektual, sosial, tingkah laku seksual yang dikaitkan dengan mulai terjadinya pubertas (Marcell, *et. al.*, 2011). Masa ini adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pola karakteristik pesatnya tumbuh kembang ini menyebabkan remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani mengambil risiko tanpa pertimbangan yang matang (Soetjiningsih, 2004).

Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia. Data WHO pada tahun 1995, sekitar seperlima penduduk dunia adalah remaja berumur 10-19 tahun. Penduduk Asia Pasifik merupakan 60% dari penduduk dunia, seperlimanya adalah remaja. Di Indonesia, data Biro Pusat Statistik (2009) kelompok umur 10-19 tahun adalah sekitar 22%, yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Berdasarkan data Departemen Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia tahun 2006, remaja Indonesia berjumlah sekitar 43 juta jiwa atau sekitar 20% dari jumlah penduduk. Ini sesuai dengan proporsi remaja di dunia, yaitu sekitar 1,2 miliar atau sekitar 1/5 dari jumlah penduduk dunia. Pada tahun 2008, jumlah remaja di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 62 juta jiwa. Hasil sensus pada tahun 2000 di Bali, menunjukkan proporsi remaja sebesar 26,29%.

Banyaknya permasalahan dan krisis yang terjadi pada masa remaja menjadikan banyak ahli dalam bidang psikologi perkembangan menyebutnya sebagai masa krisis. Berbagai permasalahan yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka, baik dimensi biologis, kognitif, moral dan psikologis serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Saat ini hal yang menonjol pada remaja adalah dari sudut pandang

kesehatan (Howard, *et al.*, 2010). WHO (2003) menyebutkan semakin berkembangnya permasalahan kesehatan reproduksi remaja, yang menyangkut seks bebas, penyebaran penyakit kelamin, kehamilan di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan pernikahan usia muda. Secara umum di Bali, beberapa permasalahan remaja yang banyak disoroti saat ini antara lain adalah pergaulan bebas hingga pelecehan seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, perkelahian antar geng, penggunaan obat terlarang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng (2009), 10 prioritas kasus yang dihadapi remaja antara lain gangguan haid, sex pra nikah, kehamilan tidak diinginkan, dismenorhea, pacaran, infeksi menular seksual, Tuberkulosa, anemia, merokok, leukore. Salah satu permasalahan kesehatan remaja yang banyak disoroti saat ini adalah semakin meningkatnya angka kejadian HIV/AIDS pada remaja. Berdasarkan data Depkes pada tahun 2008 dan 2009, terjadi peningkatan yang signifikan pada rentangan usia muda, termasuk remaja. Di Bali, angka kejadian HIV/AIDS tercatat sebanyak 1615 kasus dan 50% dari jumlah tersebut adalah rentangan usia 19-25 tahun (Kompas, 2009). Angka kejadian HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 sudah menempati urutan kedua setelah Kota Madya Denpasar, yaitu sebanyak 650 kasus (anonim, 2006). Sebaran umur kejadian HIV/AIDS cukup mengejutkan karena peningkatan banyak terjadi pada kelompok umur muda (Anonim, 2007).

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan remaja adalah dengan pembentukan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Program ini dapat dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit atau sentra-sentra dimana remaja berkumpul seperti mall (Depkes, 2005). Dalam pelaksanaan PKPR di Puskesmas, remaja diberikan pelayanan khusus melalui perlakuan khusus yang disesuaikan dengan keinginan, selera dan

kebutuhan remaja. Secara khusus, tujuan dari program PKPR adalah meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, meningkatkan pemanfaatan Puskesmas oleh remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam pencegahan masalah kesehatan dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja. Adapun yang menjadi sasaran program ini adalah laki-laki dan perempuan usia 10-19 tahun dan belum menikah. Di Kabupaten Buleleng, program PKPR baru mulai dilaksanakan pada tahun 2007. Tidak semua Puskesmas di Buleleng melaksanakan program ini. Pelaksanaan program ini baru dirintis di Puskesmas Buleleng I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa permasalahan kesehatan remaja menjadi suatu hal yang sangat penting dan pelaksanaan PKPR menjadi salah satu jalan keluar permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai peranan PKPR terhadap kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan Buleleng.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi remaja adalah "Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja SMA terhadap Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Buleleng Tahun 2010" (Doddy, dkk., 2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja SMA/SMK di Kecamatan Buleleng terhadap kesehatan reproduksi sebagian besar masih tergolong cukup dan kurang. Tingkat sikap siswa SMA/SMK terhadap kesehatan reproduksi di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, secara umum memiliki sikap yang baik. Dan, tingkat perilaku siswa SMA/SMK terhadap kesehatan reproduksi di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hampir separuh memiliki perilaku yang mengarah ke negatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa kondisi kesehatan reproduksi remaja di Buleleng masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Salah satu perhatian yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bentuk Program Kesehatan Peduli Remaja. Namun, keberadaan program ini belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman dan penggunaan oleh remaja. Perlu dilakukan analisis mengenai kebutuhan remaja akan pelayanan kesehatan, penerimaan remaja terhadap program PKPR serta penggunaan PKPR oleh remaja.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan Puskesmas dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)?; 2) Bagaimanakah keterlaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terhadap kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan Buleleng? 3) Bagaimanakah Peranan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terhadap kesehatan reproduksi remaja?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peranan Puskesmas dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); 2) Keterlaksanaan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja (PKPR); 3) Peranan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terhadap kesehatan reproduksi remaja. Sedangkan manfaat penelitian adalah: 1) Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi remaja di kabupaten Buleleng; 2) Dapat menjadi referensi dalam perkuliahan Ilmu Kesehatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksha. Selain itu, juga dapat menjadi referensi dalam pembinaan remaja di Bali pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu tentang kesehatan reproduksi remaja secara umum.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Buleleng I, Kecamatan Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Strategi penelitian adalah studi kasus terpancang tunggal. Sumber data terdiri dari: 1) Informan; 2) Tempat dan peristiwa; 3) Dokumen. Informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu peneliti memilih sumber yang mengetahui tentang program PKPR di Puskesmas Buleleng I, yaitu kepala Puskesmas, staf/petugas Puskesmas di bagian PKPR, dan remaja di Kecamatan Buleleng. (Sugiyono, 2010)

Langkah paling awal adalah menyiapkan pedoman wawancara, FGD, dan observasi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan yang didapatkan kemudian dilakukan interpretasi. Dengan mengikuti proses penelitian ini, maka luaran penelitian yang didapat adalah deskripsi konsep peranan program PKPR terhadap kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan Buleleng.

Deskripsi yang dihasilkan, akan digunakan selanjutnya oleh peneliti (dosen) sebagai dasar untuk pengabdian masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat tersebut adalah pembinaan remaja khususnya pada kesehatan reproduksinya.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, *focus group discussion* (FGD), observasi, dan dokumen. Wawancara dilakukan terhadap informan Kepala Puskesmas, pemegang program PKPR, remaja yang mengalami permasalahan kesehatan reproduksi (tercatat di pelaporan Puskesmas) serta remaja di wilayah kerja Puskesmas Buleleng 1 yang dipilih secara *purposive sampling*. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Permasalahan yang hendak dipecahkan melalui wawancara ini adalah peranan Puskesmas

dan keterlaksanaan program PKPR selama ini.

FGD dilakukan sekali dengan peserta Kepala Puskesmas, pemegang program PKPR, remaja yang mengalami permasalahan kesehatan reproduksi (tercatat di pelaporan Puskesmas) serta remaja di wilayah kerja Puskesmas Buleleng 1 yang dipilih secara *purposive sampling*. Permasalahan yang hendak dipecahkan melalui wawancara ini adalah peranan Puskesmas dalam prevensi (pencegahan) dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja serta keterlaksanaan program PKPR selama ini.

Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kesehatan peduli remaja yang dilakukan baik di dalam Puskesmas maupun di luar Puskesmas. Permasalahan yang hendak dipecahkan melalui observasi ini adalah pelaksanaan program yang sedang terlaksana saat ini baik yang di dalam maupun di luar Puskesmas.

Pengumpulan data melalui dokumen dilakukan oleh peneliti dengan pencatatan data-data yang terdapat dalam dokumen PKPR, baik mengenai permasalahan remaja yang terjadi, program yang dicanangkan serta pelaksanaan program peduli remaja yang sudah dilakukan. Uji keterpercayaan data dilakukan melalui: 1) Uji validitas melalui triangulasi teori, data, metode dan peneliti; 2) Uji reliabilitas melalui perpanjangan pengamatan dan *member check*.

Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif model dari Miles dan Huberman terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan data di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, sehingga perlu direduksi (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak perlu). Setelah data direduksi, kemudian

data disajikan, kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh gambaran tentang topik penelitian. (Sugiyono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Salah satu tugas Puskesmas melayani remaja yang merupakan bagian dari masyarakat. Puskesmas Buleleng 1 merupakan salah satu Puskesmas yang berada di Kabupaten Buleleng, memiliki wilayah kerja 15 kelurahan dan 1 desa. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas Buleleng 1 adalah sebanyak 57785 orang. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 8999 orang (16%) adalah penduduk dalam usia remaja. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan remaja terlihat dari dicanangkannya pembentukan PKPR di tingkat Puskesmas pada tahun 2003 yang diadopsi dari WHO (*World Health Organization*). Prinsip dari PKPR yang dicanangkan tersebut adalah dapat terakses oleh semua golongan remaja, layak, dapat diterima, efektif, dan efisien.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Puskesmas Buleleng 1 merupakan Puskesmas pertama di Buleleng yang melaksanakan program PKPR. Penunjukkan tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan pertimbangan Puskesmas Buleleng 1 merupakan Puskesmas di Kabupaten Buleleng yang terletak di tengah kota dan dianggap paling siap untuk melakukan program tersebut. Berbagai tindak lanjut dilakukan oleh Puskesmas setelah penunjukkan sebagai pelaksana Program PKPR.

Adapun tindak lanjut tersebut dimulai dari penunjukkan staf Puskesmas

Buleleng 1 sebagai pemegang program PKPR, penyusunan program kerja PKPR serta penyediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PKPR. Staf Puskesmas Buleleng 1 yang ditunjuk sebagai pemegang program PKPR adalah Ibu Ni Luh Padmini. Untuk tempat pelayanan PKPR telah disediakan ruangan khusus bagi konseling remaja sehingga memberikan ruang yang bersifat privasi. Pelaksanaan program PKPR tidak hanya dijalankan oleh pemegang program saja, tetapi tentunya memerlukan kerja sama dengan staf/bagian lainnya. Adapun staf/bagian lain di Puskesmas yang diikutsertakan dalam program PKPR antara lain program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), program PKM (Pendidikan Kesehatan Masyarakat), program kesehatan gigi, program KIA/KB (Kesehatan ibu dan anak/Keluarga berencana), pelayanan poliklinik khususnya pelayanan IMS (infeksi menular seksual) dan HIV/AIDS, pelayanan laboratorium dan P2M (Pencegahan penyakit menular). Dengan adanya kerja sama lintas bagian ini, diharapkan dapat menunjang keterlaksanaan dan kelancaran kegiatan program PKPR. Pengawasan terhadap pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Buleleng 1 senantiasa dilakukan secara rutin. Dinas Kesehatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten selaku dinas yang membawahi Puskesmas melakukan supervisi berupa kunjungan rutin tiap akhir tahun untuk mengontrol keterlaksanaan program selama setahun.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Buleleng 1 serta observasi terhadap dokumen, Program PKPR di Puskesmas Buleleng 1 sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan didahului pemasangan plang sebagai Puskesmas Peduli Remaja. Staf yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program PKPR adalah ibu Ni Luh Padmini (perawat). selain memiliki pendidikan sebagai perawat, ibu Ni Luh Padmini juga memiliki pendidikan di bidang konseling (Sarjana Bimbingan Konseling). Staf tersebut telah mendapatkan

pelatihan sebelumnya sebanyak 3 kali, yaitu 1) Tahun 2008 di Denpasar di PPKTK Provinsi Bali berupa pelatihan konseling remaja; 2) Tahun 2009 di Jakarta berupa pelatihan penanganan kecanduan NAPZA dan 3) Tahun 2011 di Bogor berupa pelatihan konselor sebaya. Adapun program kegiatan yang menjadi tugas PKPR antara lain: 1) Pemberian informasi dan edukasi; 3) Pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya; 3) Konseling; 4) Pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS); 5) Pelatihan konselor sebaya; 6) Pelayanan rujukan sosial dan pranata hukum.

Berdasarkan wawancara dengan pemegang program PKPR, dari 6 program kegiatan yang dicanangkan tersebut, program yang sudah terlaksana hingga saat ini adalah: 1) Penyuluhan dan pemberian KIE; 2) Pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya; 3) Konseling; 4) Pelatihan KKR dalam bentuk pendidikan keterampilan hidup sehat 5) Pelayanan rujukan dan pengambilan darah VCT. Program yang belum terlaksana adalah kegiatan pembentukan konselor sebaya. Ketidakterlaksanaan pembentukan konselor sebaya ini disebabkan oleh adanya program yang tumpang tindih dengan KPA dan KB.

Sasaran dari program PKPR di Puskesmas ini yaitu remaja yang berusia 10 hingga 24 tahun baik sehat maupun sakit, individu ataupun kelompok, dalam bentuk penyuluhan ataupun pelayanan kesehatan di dalam maupun di luar gedung. Pencapaian target sasaran sudah hampir terlaksana semua, baik berupa konseling ke Puskesmas (2 hingga 3 orang tiap bulan), kunjungan ke sekolah (pada bulan Agustus, September, dan Oktober). Namun, berdasarkan wawancara dan *focus group discussion* remaja ditemukan bahwa penyampaian informasi mengenai keberadaan dan pelayanan PKPR belum mencakup seluruh remaja di wilayah kerja Puskesmas Buleleng I. Kurangnya pengetahuan remaja mengenai keberadaan

PKPR ini berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan, konseling dan penyuluhan mengenai kesehatan remaja. Adapun kendala yang ditemui adalah kondisi tenaga pelaksana, waktu dan biaya tidak sesuai dengan cakupan wilayah kerja Puskesmas, sehingga masih ada daerah yang belum mendapatkan pelayanan ini. Evaluasi terhadap pencapaian target atau keberhasilan program adalah melalui laporan bulanan dan laporan semester, cakupan pasien di VCT, pembentukan konselor remaja, pelaksanaan penyuluhan ke sekolah-sekolah tiap tahun ajaran baru.

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan wawancara dan *focus group discussion* remaja di Buleleng, ditemukan bahwa keberadaan program PKPR di Puskesmas Buleleng 1 belum sepenuhnya diketahui oleh remaja. Remaja yang mengetahui keberadaan program ini mendapatkan informasi di Puskesmas saat melakukan pemeriksaan secara langsung ataupun di sekolah melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas (staf program PKPR) ke sekolah saat penerimaan siswa baru, pembinaan PMR (Palang Merah Remaja) di sekolah serta saat remaja (siswa) tersebut mengikuti persiapan lomba KKR.

Berdasarkan observasi dokumen yang terdapat di tempat konseling PKPR, berbagai interaksi pernah dilakukan oleh remaja yang datang. Data kunjungan ke PKPR, tiap harinya terapat sekitar 2 hingga 3 kunjungan. Kunjungan tersebut beragam, mulai dari konseling, pelayanan kesehatan (pemeriksaan dan pengobatan) hingga pelayanan rujukan. Sejak Januari 2012, sudah terdapat 14 orang yang dirujuk untuk pemeriksaan VCT.

Data tersebut didukung oleh hasil *focus group discussion* yang dilakukan, dimana ditemukan adanya interaksi remaja berupa konseling, pelayanan kesehatan dan pengobatan kasus infeksi menular seksual (IMS). Dari FGD remaja, didapatkan adanya antusias yang tinggi dari remaja agar program PKPR ini senantiasa selalu diperkenalkan ke remaja sekolah hingga remaja pada umumnya terutama remaja yang tinggal di daerah yang jauh dari lokasi Puskesmas Buleleng. Dari masukan remaja, beberapa bentuk pengenalan program PKPR dapat dilakukan melalui penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk pengenalan yang menurut para remaja dapat dilakukan oleh pihak terkait antara lain: 1) Melalui sekeha teruna teruni yang ada di masing-masing banjar; 2) Pemberian pamphlet atau selebaran yang berisikan informasi mengenai adanya PKPR yang memberikan pelayanan khusus bagi remaja; 3) Website yang dapat diakses oleh remaja secara bebas; 4) Penyuluhan ke sekolah-sekolah; Melalui iklan di radio. Penyampaian informasi itu pun tidak harus selalu langsung dari Puskesmas, namun dapat dilakukan secara estafet oleh para remaja sehingga dapat mengurangi beban kerja petugas kesehatan.

Berbagai manfaat yang dirasakan oleh remaja dari adanya program PKPR ini adalah: 1) Mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan remaja; 2) Mendapatkan informasi mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi; 3) Tempat berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan remaja sehingga tidak terjerumus ke hal yang negative; 4) Sebagai tempat berbagi dengan remaja lain khususnya mengenai kesehatan; 5) Teman dan pengalaman di bidang kesehatan remaja bertambah.

Dalam program PKPR ini diharapkan agar selalu ada tindak lanjut atau *follow up* baik dari petugas kesehatan ataupun pihak lain terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Berdasarkan wawancara

terhadap remaja yang sudah pernah melakukan konseling dalam program ini, menyebutkan agar pelayanan yang diberikan di PKPR memiliki kelanjutan sehingga permasalahan yang dihadapi oleh remaja bisa terselesaikan dengan tuntas.

Di Indonesia, unit penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama adalah Puskesmas. Pada saat ini puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2004, disebutkan bahwa fungsi dari Puskesmas antara lain sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama baik perorangan maupun masyarakat.

Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan terdepan di masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat, termasuk remaja. Berbagai permasalahan pada remaja saat ini semakin berkembang luas, sehingga memerlukan perhatian lebih. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan pembentukan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut (DepKes RI, 2005). Program ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengembangan program kerja Puskesmas mengingat kesesuaiannya dengan permasalahan yang semakin banyak dihadapi remaja.

Puskesmas sebagai pelaksana program PKPR memiliki peranan yang sangat besar terhadap keberlangsungan program tersebut. Masuknya program PKPR dalam

program Puskesmas merupakan awal dari peranan Puskesmas. Penunjukan staf sebagai pemegang program PKPR sebagai langkah selanjutnya. Dengan demikian terdapat staf Puskesmas yang memang khusus mendalami dan menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan remaja. Mengingat kegiatan program PKPR ini sangat luas, maka tentunya tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemegang program saja. Oleh sebab itu, penunjukan staf tersebut juga diikuti dengan penunjukan bagian lain di Puskesmas untuk senantiasa bekerja sama dengan program ini dalam menyelesaikan tugasnya. Bagian lain tersebut meliputi program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), program PKM (Pendidikan Kesehatan Masyarakat), program kesehatan gigi, program KIA/KB (Kesehatan ibu dan anak/Keluarga berencana), pelayanan poliklinik khususnya pelayanan IMS (infeksi menular seksual) dan HIV/AIDS, pelayanan laboratorium, dan P2M (Pencegahan penyakit menular).

Berdasarkan Pedoman PKPR di Puskesmas (DepKes RI, 2005), tugas yang diemban oleh program PKPR ini cukup luas, mencakup 1) Pemberian informasi dan edukasi; 2) Pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya; 3) Konseling; 4) Pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS); 5) Pelatihan konselor sebaya; 6) Pelayanan rujukan sosial dan pranata hukum. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya, dilaksanakan di dalam gedung atau di luar gedung, untuk sasaran perorangan atau kelompok, dilaksanakan oleh petugas Puskesmas atau petugas lain di institusi atau masyarakat berdasarkan kemitraan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa dari keenam tugas PKPR tersebut, terdapat satu tugas yang belum terlaksana yaitu pelatihan konselor sebaya. Tidak terealisasinya kegiatan ini terkait dengan tumpang tindihnya kegiatan pelatihan konselor yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan AIDS (KPA)

Buleleng. selain itu, pelaksanaan kegiatan lainnya seperti pemberian informasi dan edukasi, pendidikan kesehatan, pelayanan klinis dan rujukan serta konseling dirasakan masih belum menjangkau seluruh remaja.

Adapun yang menjadi kendala adalah keterbatasan tenaga, waktu dan biaya. Tenaga pelaksana kegiatan PKPR hingga saat ini masih diemban oleh 1 orang petugas sehingga tidak bisa menjangkau seluruh remaja di wilayah kerja Puskesmas Buleleng 1 yang meliputi 15 kelurahan dan 1 desa. Melihat luasnya cakupan wilayah kerja Puskesmas hendaknya petugas yang bertanggung jawab dalam program PKPR tidak hanya 1 orang dengan juga didukung oleh staf di program lain seperti staf program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), program PKM (Pendidikan Kesehatan Masyarakat), program kesehatan gigi, program KIA/KB (Kesehatan ibu dan anak/Keluarga berencana), pelayanan poliklinik khususnya pelayanan IMS (infeksi menular seksual) dan HIV/AIDS, pelayanan laboratorium dan P2M (Pencegahan penyakit menular).

Program PKPR memiliki karakteristik karakteristik dari PKPR, yaitu kebijakan, prosedur, petugas, fasilitas yang peduli remaja, keterlibatan remaja dan masyarakat, berbasis masyarakat serta pelayanan yang komprehensif, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, PKPR sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang khusus bagi remaja dirasakan sangat bermanfaat bagi remaja. Adapun berdasarkan hasil penelitian, didapatkan manfaat tersebut mencakup informasi mengenai kesehatan dan cara menjaganya, tempat berkonsultasi hingga sebagai tempat berbagi dengan remaja lainnya. Besarnya manfaat PKPR bagi remaja ini menunjukkan tingginya kebutuhan remaja akan pelayanan kesehatan yang memang difokuskan bagi mereka, mengingat perbedaan situasi dan kondisi pada masa remaja. Berbagai kegiatan yang ditawarkan dalam PKPR senantiasa sesuai dengan harapan remaja serta dapat diterima dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Peranan Puskesmas dalam program PKPR adalah sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan di masyarakat termasuk remaja. Puskesmas sebagai penyedia sarana dan prasarana program PKPR agar program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan sasaran; 2) Program PKPR yang dicanangkan Puskesmas Buleleng 1 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat 1 sasaran yang belum tercapai yaitu pembentukan konselor sebaya serta belum maksimalnya sosialisasi kepada remaja secara luas; 3) PKPR dirasakan memiliki peranan yang sangat penting bagi remaja. Melalui PKPR ini remaja dapat memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan, tempat bersosialisasi, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan remaja.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain: 1) Peranan Puskesmas dalam program PKPR adalah sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan di masyarakat termasuk remaja, karena itu akan sangat baik apabila program PKPR terdapat di setiap puskesmas, sehingga dapat menjangkau pelayanan yang lebih luas kepada remaja; 2) Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas terhadap keterlaksanaan program PKPR kepada para remaja melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, sekeha taruna-teruni, pemberian pamphlet atau selebaran yang berisikan informasi mengenai adanya PKPR yang memberikan pelayanan khusus bagi remaja; 3) Untuk tercapainya keterlaksanaan program PKPR dengan baik diperlukan adanya sokongan dana yang memadai dari pemerintah selaku pemegang kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2006. *Penduduk, Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan*. Available at: <http://www.bkkbn.go.id>.

- Anonim. 2007. *Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010*. Komisi Penanggulangan AIDS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data Statistik Indonesia*. Available at: <http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. 2009. *Laporan Tahunan Program Kesehatan Lanjut Usia dan Program Kesehatan Remaja Tahun 2009*. Buleleng.
- Direktorat Kesehatan Keluarga, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes RI. 2005. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas*. Jakarta.
- Doddy T, Mestri A, Kusuma W, 2010. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja SMA terhadap Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Buleleng Tahun 2010.
- Howard, T.L., Marcell, A.V., Plowden, K., Watson, C. 2010. Exploring Women's Perceptions About Their Role in Supporting Partners' and Sons' Reproductive Health Care. *Americans Journal of Mens's Health*; 4: 297-304.
- Kompas. 11 Februari 2009. *Kasus AIDS di Bali Makin Mengkhawatirkan*. Available at: <http://kesehatan.kompas.com>.
- Marcell, A.V., Wibbelsman, C., Seigel, W.M. 2011. Male Adolescent Sexual and Reproductive Health Care. *Pediatrics*; 128: 1658-1678.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. 2003. *Adolescent Friendly Health Service, An Agenda for Change*.

IDEOLOGI NYEGARA GUNUNG: SEBUAH KAJIAN SOSIOKULTURAL KEMISKINAN PADA MASYARAKAT PESISIR DI BALI UTARA

I Wayan Mudana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Abstrak

Target khusus yang ingin dicapai dalam tahun ini adalah terdeskripsikannya fenomenan kemiskinan sosiokultural dan geneologis kemiskinan sosiokultural masyarakat pesisir; terdeskripsikannya secara kritis ideologi *nyegara gunung* yang berkembang pada masyarakat pesisir; terdeskripsikannya secara kritis keberfungsian ideologi *nyegara gunung* dalam mengatasi masalah kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir di Bali Utara; serta terdeskripsikannya peranan masyarakat politik, ekonomi dan sipil dalam pengentasan kemiskinan sosiokultural berbasis ideologi *nyegara gunung* pada masyarakat pesisir di Bali Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun pertama adalah pendekatan yang bersifat etnografis kritis. Sehubungan dengan hal itu, informan penelitian ini menggunakan purposive snowball, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka, analisis data menggunakan analisis kritis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas dapat dikemukakan hasil kajian ini sebagai berikut: Kemiskinan sosiokultural masyarakat di Bali Utara dapat dilihat dari lingkungan pemukiman masyarakat pesisir yang berada di sekitar pantai pada umumnya menempati tanah negara dan dengan kondisi bangunan yang sangat sederhana. Kemiskinan sosiokultural yang dimilikinya juga tercermin oleh tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi kebaharian yang masih terbatas. Kondisi ini tentu saja juga terkait dengan keterbatasan modal finansial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Terjadinya kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir secara geneologis disebabkan oleh keterbatasan modal finansial yang dimiliki dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat pesisir yang mengalami jeratan gurita kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan sosiokultural, masyarakat pesisir mengembangkan berbagai aktivitas sosial ekonomi yang dilandasi kesadarannya terhadap kebenaran ideologi *nyegara gunung*, dan menjadikan laut sebagai ruang hidup yang menjanjikan. Di samping itu, masyarakat pesisir juga mengembangkan berbagai diversifikasi usaha dan kelembagaan kredit sosial dan ekonomi sebagai bentuk adaptasinya dalam mengatasi kemiskinan sosiokultural yang ada. Dalam mengatasi kemiskinan, masyarakat politik, ekonomi dan sipil ikut berperan, baik dalam bentuk pendampingan modal maupun pembinaan terhadap masyarakat pesisir.

Kata Kunci: *nyegara gunung*, kemiskinan, sosiokultural.

Abstract

Special target that will be reached out in this year, the phenomena description of sociocultural poverty and genealogy of sociocultural poverty at shore community; The critical ideology description of *nyegara gunung*, that develop at shore community; The critical description, the function of *nyegara gunung* ideology in protecting the problem of sociocultural poverty at shore community in north Bali; Description the role of political community, economy and civil in raising the sociocultural poverty that bases *nyegara gunung* ideology at shore community in north Bali. The approach usung in this study at the first year is approach that has critical ethnography character. According to the matter, the informant in this study uses snowball purposive, collecting of data by observation, deep interview and document study, analyze of data use critical analysis qualitative description.

By the approach written in this report can be explained, the result of this analysis as follow: The poverty of sociocultural at the shore community in north Bali can be seen from settlement environment at shore community that live around the shore. In generally, they occupy the land belong to government, and in a building with very simple condition. The sociocultural poverty that belongs to them, is deccribed by educational level and mastery of mariteme technology that is still lax. That condition in fact, connect with limitation of financial capital, belongs to the shore community. The sociocultural poverty has happened at shore community in genealogical way is caused by limitation of financial capital that belongs to them, and the building wisdom doesn't take sides to the shore community that has been handcuffed by poverty. In controlling the sociocultural poverty, shore community develops some activities of economic social, that's based by awareness to the truth of *nyegara gunung* ideology, and making the sea as life space that has a potencial enough. On the other way, shore community also develop some deversification of efforts and credit organization of economic social as a shape of adaptation in surpassing the sociocultural poverty. In surpassing the poverty, polotic community, economy & civil have roled, either in capital closeness model, or founding to the shore community.

Key words: *nyegara gunung*, poverty, sociocultural

PENDAHULUAN

Daerah Bali cenderung diidentikkan dengan daerah agraris dan daerah pariwisata. Padahal ada sebagian masyarakatnya yang menekuni kegiatan sebagai kemaritiman, dalam hal ini masyarakat pesisir, yang pada umumnya tidak saja mengalami kemiskinan finansial, tetapi juga mengalami kemiskinan sosiokultural. Berkenaan dengan hal itu maka kajian terhadap masyarakat pesisir di Bali Utara amatlah penting, khususnya dalam perspektif ideologi *nyegara gunung*. Kajian terhadap hal tersebut didasarkan atas hasil studi pendahuluan baik melalui studi karya tesis yaitu tentang *Kredit Sosial dan Kredit Ekonomi pada Masyarakat Nelayan di Desa Kubutambahan* (Mudana, 2001), maupun melalui kajian penelitian dosen muda tentang *Kekuatan Religius Magis Dalam Proses Eksploitasi Sumber Daya Kelautan Pada Masyarakat Nelayan di Bali Utara*, (Mudana, 2003), dan melalui penelitian kajian wanita tentang *Etos Kerja Nelayan dan Implikasinya terhadap Kehidupan Ekonomi Keluarga Masyarakat Nelayan di Desa Kubutambahan* (Mudjiono dan Mudana, 2003). Melalui hal itu terlihat ada kekuatan ideologis *nyegara gunung* yang dapat dijadikan sebagai suatu basis dalam membebaskan masyarakat pesisir dari belenggu kemiskinan sosiokultural.

Pentingnya kajian ini juga karena selama ini kajian-kajian terhadap masyarakat pesisir belum ada yang mengkaji secara khusus tentang ideologi *nyegara gunung* dalam pembebasan masyarakat pesisir dari belenggu kemiskinan sosiokultural di Bali Utara. Walaupun ada ideologi *nyegara gunung* hanya diposisikan sebagai ideologi yang terkait dengan aktivitas religius magis, padahal ideologi *nyegara gunung* tidak hanya berdimensi sosioreligius magis, tetapi juga sosiokultural, sosial ekonomi, dan ekologis (ruang hidup), sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan sosiokultural, keretakan sosial, maupun kerusakan lingkungan pada masyarakat pesisir. Hal mana sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan.

Pengkajian kemiskinan sosiokultural berbasis ideologi *nyegara gunung* dalam perspektif sosiokultural tidak saja memiliki kebermanfaatan secara akademis, sebagai pengayaan materi bahan ajar dalam pembelajaran Sosiologi-Antropologi Pembangunan, memperkuat penggugatan terhadap teori pembangunan modernis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam memecahkan masalah sosial ekonomi, kultural dan lingkungan.

Kajian ini juga terkait dengan kapasitas manusia sebagai makhluk ekologis, sehubungan dengan hal itu dikembangkanlah etika lingkungan yang didasarkan atas kesetaraan, tanggung jawab, kepedulian, dan kasih sayang. Kesadaran semacam itu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan manusia dibentuk oleh dan merealisasikan dirinya dalam alam. Alam membentuk dirinya sebagaimana ia sendiri ikut membentuk alam (Kraf, 2002:xvii-xix; Sumaatmadja, 2000:73 Mubyarto,dkk, 1992:43). Prinsip ekologis itu pada dasarnya saling ketergantungan, kemitraan, dan bersifat siklis. Prinsip ekologis semacam itu tampaknya telah menjadi pandangan moral pada masyarakat adat. Di dalamnya, terkandung keyakinan moral religius. (Kraf, 2002: 283). Secara umum etika lingkungan masyarakat Bali dilandasi oleh ajaran *tri hita karana* (Prime, 2006). Menurut Eisman (1982:2) *tri hita karana* pada hakikatnya tidak hanya merupakan citra lingkungan, tetapi juga *cosmologi* dan *ideologi* bagi masyarakat Bali. Karena gagasan, ide-ide yang terkandung di dalamnya akan terefleksikan dalam berbagai pola perilaku masyarakat Bali, baik dalam kaitannya perilaku dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, perilaku dalam hubungan manusia dengan manusia, maupun perilaku dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Hal ini akan semakin jelas bila dilihat dari cara pandang sistemik.

Keberadaan ajaran *tri hita karana* semakin mantap dengan adanya agama Hindu sebagai landasan moralnya. Fenomena ini merupakan hal yang paling fundamental dari etika lingkungan yang memandang dirinya, alam dan relasi di antara keduanya dalam perspektif perspektif spiritual. Maka, alam dipahami oleh semua masyarakat tradisional sebagai sesuatu yang sakral, kudus. Dalam konteks masyarakat Bali, hal itu sejalan dengan pandangan masyarakat Bali yang memandang bahwa tatanan kosmis dipandang bersifat *sekala* dan *niskala*

(Mudana, 2001:138). Pemahaman seperti itu juga akan selalu menjiwai, mewarnai dan menandai setiap aktivitas manusia (Kraf, 2002:282). Pemahaman tersebut akan semakin kuat dengan adanya berbagai pranata-pranata keagamaan, seperti: *pura*, *sistem ritual*, dan kelembagaan keagamaan PHDI yang tidak saja berperan sebagai kelembagaan sosialisasi, tetapi juga sebagai kelembagaan kontrol (Wiana, 2006:12; Susilo, 2003: 87). Terpeliharanya keseimbangan sistem atau homeostatis merupakan kekuatan pengatur' perimbangan alam' atau *the balance of nature* (Poerwanto, 2000, 65). Dalam tataran semiotika hal itu semua pada dasarnya merupakan suatu teks, khususnya teks kognitif. Teks kognitif semacam itu merupakan modal kultural yang dapat berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan atau membebaskan masyarakat pesisir dari belenggu kemiskinan sosiokultural..

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana fenomena kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir di Bali Utara?
- 2 Bagaimana geneologis kemiskinan sosiokultural masyarakat pesisir?
- 3 Bagaimana ideologi *nyegara gunung* yang berkembang pada masyarakat pesisir di Bali Utara?
- 4 Bagaimana keberfungsian ideologi *nyegara gunung* dalam mengatasi masalah kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir di Bali Utara?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun pertama adalah pendekatan yang bersifat etnografis kritis. Sehubungan dengan hal itu maka informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang ada di wilayah Desa Pemuteran, Kalibukbuk, dan Les. Penentuan informan menggunakan purposive snowball. Pengumpulan data tentang fenomena kemiskinan dilakukan dengan observasi,

studi pustaka dan wawancara mendalam. Pengumpulan data tentang geneologis kemiskinan, keberadaan dan keberfungsian ideologi *nyegara gunung* dalam mengatasi kemiskinan sosiokultural dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kritis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2010 berjumlah 662.920, yang bermatapencaharian utama sebagai nelayan laut sebanyak 7.297 orang, pengolah ikan sebanyak 815 orang, pembudidaya ikan sebanyak 786 orang. Masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Buleleng pada umumnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya modal finansial yang dimilikinya. Gambaran kemiskinan masyarakat nelayan dapat dilihat dari kondisi pemukiman, fasilitas rumah tangga yang dimilikinya, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi kemaritiman.

Di lihat dari segi pemukiman, perumahan masyarakat nelayan umumnya dibangun pada tanah negara di kawasan pesisir. Bangunan perumahannya sangat sederhana dan semi permanen, yang mempergunakan kerangka kayu/bambu dan berdinginkan bedeg atau batako dengan atap seng atau daun kelapa. Fasilitas rumah tangga umumnya sangat terbatas. Berkenaan dengan sangat sederhananya kondisi perumahan masyarakat nelayan, maka istilah penyebutan untuk rumah yang dimilikinya disebut dengan istilah *kubu*.

Kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan juga tergambarkan dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Mereka umumnya hanya mengenyam pendidikan dasar. Terbatasnya tingkat pendidikan yang dimilikinya tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, tetapi cenderung disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pembiayaan. Keterbatasan kemampuan ekonomi

keluarga menyebabkan mereka lebih diposisikan sebagai bagian dari unit produksi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Artinya anak-anak dalam keluarga miskin lebih diposisikan sebagai sumber daya ekonomi keluarga dari pada sebagai sumber daya manusia yang harus ditingkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan formal. Kondisi ini dipacu juga oleh pembiayaan pendidikan formal yang relative cukup tinggi.

Keterbatasan modal finansial tentu saja berimplikasi pada keterbatasan pemilikan teknologi kelautan, karena setiap komponen dari teknologi kelautan diperoleh melalui mekanisme pasar pada kelembagaan pasar, baik pada pasar tradisional maupun pada pasar modern. Keterbatasan penguasaan teknologi tentu berimplikasi pada keterbatasan masyarakat nelayan memanfaatkan berbagai potensi pesisir dan laut. Kondisi kemiskinan masyarakat nelayan semacam inilah oleh Chamber digambarkan bagaikan cengkaraman gurita kemiskinan (1993). Namun dengan segala keterbatasannya, mereka terus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas nelayan, misalnya dengan kerja bagi hasil dengan nelayan lainnya.

Hal itu dilakukan sebagai perwujudan kesadarannya terhadap ideologi *nyegara gunung*. Keberadaan ideologi *nyegara gunung* tersebut sangat disadari oleh masyarakat Buleleng. Hal ini terlihat dari dikenalnya ungkapan *nyegara gunung* oleh masyarakat setempat. Ungkapan *nyegara gunung* yang tidak saja dimaknai sebagai ruang *magis religius*, tetapi juga merupakan suatu konstruksi kultural yang mengandung kesadaran akan keberadaan dari ruang hidup. Kesadaran *nyegara gunung* sebagai ruang hidup dapat disimak dari ungkapan masyarakat pesisir Buleleng yang menyatakan bahwa *uma abiane di pasihe*.

Kesadaran itu terrefleksikan dari adanya berbagai kegiatan produktif yang dilakukan baik di daerah pegunungan maupun di daerah pesisir. Di daerah

pegunungan/ daratan masyarakat Buleleng mengembangkan berbagai aktivitas pertanian lahan basah dan/atau lahan kering. Di samping masyarakat setempat juga mengembangkan berbagai usaha peternakan. Sedangkan di daerah pesisir masyarakat setempat juga mengembangkan berbagai usaha produktif seperti pembuatan garam, pertambakan, dan penangkapan ikan.

Di kawasan ini telah berdiri berbagai sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan. Terjadinya perubahan tata guna tanah/alih fungsi lahan semacam itu tidak saja mengakibatkan semakin tergesurnya para petani dari aktivitas sosial ekonomi dan sosial religiusnya, tetapi juga berakibat terhadap kehidupan nelayan. Pembangunan sarana dan perasarana wisata seperti itu mengakibatkan keterhimpitan ruang hidup masyarakat nelayan. Sehingga ada di antara mereka yang mengalihkan usahanya ke sektor pariwisata misalnya sebagai pedagang acung, sebagai tukang pijat, sebagai pengantar tamu dalam wisata tirta di laut, atau sebagai pedagang cindramata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi keterhimpitan kehidupan ekonominya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan seperti itu kalau tidak diberdayakan secara optimal akan menjadi tatangan yang cukup berarti bagi upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengembangan terumbu karang. Namun, kalau dikelola dan diberdayakan dengan baik hal itu akan menjadi kekuatan yang cukup berarti baik dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun dalam proses pelestarian lingkungan. Sehubungan dengan hal itu, pelestarian lingkungan harus dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan moto pelestarian lingkungan yang menyatakan karang lestari nelayan sejahtera. Sebagaimana yang dilakukan dalam pengembangan terumbu karang di kawasan pesisir dan laut Desa Pemuteran, Pamaran, dan Les. Kelestarian

lingkungan pesisir tidak saja memberikan peningkatan kualitas ekosistem tetapi juga akan memberikan peluang bagi pengembangan ruang hidup baru bagi masyarakat pesisir, yaitu pengembangan wisata bahari, sebagaimana dikembangkan pada beberapa kawasan pesisir di Bali Utara. Pengembangan wisata bahari tentu akan memberikan peluang bagi masyarakat pesisir untuk mendeversifikasi usahanya.

Pemberdayaan dan diversifikasi usaha merupakan suatu alternatif dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir. Hal itu sejalan dengan keberadaan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor sosiokultural dan struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar kemiskinan yang menyatakan ada dua aliran besar yang melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. *Pertama*, aliran modernisasi yang selalu menganggap terjadinya kemiskinan disebabkan oleh faktor internal masyarakat pesisir. Dalam aliran ini, kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat faktor budaya (etos, kemalasan) keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi sumber daya alam. Umumnya, kemiskinan jenis ini disebut kemiskinan sosiokultural dan alamiah. Oleh karena itu, aliran ini selalu sarat dengan proposal modernisasi nelayan. Sudah sepatutnya nelayan mengubah budayanya, meningkatkan kapasitas teknologinya, dan memperbaiki sistem usahanya. *Kedua*, aliran struktural yang selalu menganggap faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Jadi, menurut aliran ini kemiskinan nelayan bukan karena budaya atau keterbatasan modal, melainkan karena faktor eksternal yang menghambat proses mobilitas vertikal masyarakat nelayan. Faktor eksternal itu berjenjang, pada tingkat mikrodesa maupun makrostruktural. Pada tingkat mikrodesa, masih ditemukan sejumlah pola hubungan patron-klien yang bersifat asimetris, yaitu suatu pola hubungan transfer surplus dari nelayan ke patron. Sementara itu, pada tingkat makrostruktural, belum ada

dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan sehingga sektor kelautan dan perikanan tidak mampu berkembang seperti sektor-sektor lainnya (Satria, 2002).

Berpijak dari hal itu, dapat dinyatakan bahwa fenomena kemiskinan yang dialami oleh anggota masyarakat pesisir, bukan merupakan suatu fenomena yang terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan kajian terhadap beberapa anggota masyarakat pesisir mengemuka berbagai fenomena yang cukup menarik. Dalam perspektif geneologis terhadap kemiskinan yang dialaminya dapat dinyatakan bahwa kemiskinan yang dialami oleh beberapa anggota masyarakat pesisir itu disebabkan oleh faktor internal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemalasan/ rendahnya etos kerja yang dimilikinya. Fenomena ini bila dikaitkan dengan pandangan David McClelland tentang *the need for achievement*, konsep ini disingkat dengan sebuah symbol, yakni: *n-Ach*. Kemalasan merupakan konsekuensi dari rendahnya dorongan berprestasi yang dimiliki anggota masyarakat nelayan. Rendahnya dorongan berprestasi memang akan memengaruhi tingkat produktifitas kerja. Rendahnya dorongan berprestasi pada anggota masyarakat pesisir terkait dengan orientasi nilai tentang hakekat waktu dari masyarakat pesisir, yang hanya berorientasi ke masa kini, dan orientasi nilai tentang hakikat kerja hanya untuk sesuap nasi, cukup untuk makan. Orientasi semacam ini oleh Koentjaraningrat sebagai refleksi dari mentalitas petani yang cepat puas dan kurang berorientasi ke masa depan.

Fenomena kemalasan inilah pada masa kolonial yang lebih jauh dikonstruksi oleh kaum kapitalisme ke dalam mitos pribumi malas, sebagaimana diungkapkan oleh Alatas dalam bukunya *Mitos Pribumi Malas* (1988). Dalam perwujudan emperis historis, ideologi kolonial memanfaatkan gagasan tentang pribumi yang malas untuk

membenarkan praktek-praktek penindasan dan ketidakadilan dalam mobilisasi tenaga kerja. Pengkonstruksian semacam ini juga dapat terjadi dalam masyarakat modernis yang kapitalis, dengan menyatakan masyarakat pesisir pemalas. Pengkonstruksian mitos masyarakat pesisir malas bisa jadi memang merupakan penggambaran atas kenyataan emperis yang ada pada masyarakat pesisir. Namun, bisa juga sebagai sebuah proses pengkonstruksian teks guna menyelubungi kepentingan dari masyarakat politik/penguasa atas kegagalannya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Atau paling tidak pengkonstruksian mitos masyarakat pesisir malas merupakan suatu upaya sistematis untuk memuluskan proposal pemerintah dalam melaksanakan modernisasi kemaritiman.

Modernisasi pada masyarakat pesisir tentu bagi kalangan pendukung paradigm modernis merupakan suatu keharusan dalam mengatasi keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat pesisir. Akan tetapi bila dikaji lebih dalam, ternyata modernisasi pada masyarakat pesisir justru menimbulkan masalah baru, karena modernisasi sulit dijangkau oleh masyarakat yang mengalami keterhimpitan kehidupan ekonomi. Modernisasi hanya menguntungkan bagi masyarakat pesisir yang memiliki modal finansial yang memadai. Pemilikan modal finansial yang memadai pada umumnya berada pada anggota masyarakat pesisir yang kaya, atau para pengusaha. Kondisi seperti inilah yang membuka peluang bagi terjadinya perselingkuhan antara masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi dalam memanfaatkan modal komunitas yang ada. Perselingkuhan semacam ini tentu akan memberikan kebermanfaatan bagi penguasa dan pengusaha, sedangkan masyarakat pesisir yang kurang mampu cenderung terpinggirkan dan kurang merasakan kebermanfaatan dari proses modernisasi.

Sehubungan dengan hal itulah modernisasi mengakibatkan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, karena akan terjadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Jeratan gurita kemiskinan akan semakin kuat akan dirasakan oleh masyarakat miskin karena hubungan patro-klien, pengusaha dengan pekerja, kaya dengan miskin yang bersifat asimetris, yaitu suatu pola hubungan transfer surplus dari nelayan miskin ke patron/pengusaha/ nelayan kaya. Ketimpangan yang semakin lebar dapat menjadi kekuatan yang cukup berarti bagi berkembangnya kecemburuan sosial, dan konflik sosial.

Berkurangnya modal finansial pada masyarakat pesisir juga sejalan dengan dinamika perjalanan sejarah dari kehidupan keluarganya, sebagai konsekuensi dari adanya sistem waris dan terbelenggunya keluarga yang bersangkutan dari kemiskinan. Semakin kuatnya keterbelengguannya dari kemiskinan merupakan suatu pencerminan dari keterbatasan kemampuannya membebaskan diri dari cengkaman kemiskinan sebagai konsekuensi dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam arena sosial/ruang hidup yang ada. Lebih-lebih dalam arena sosial cenderung terjadi perebutan berbagai sumber daya yang ada dalam ruang hidup. Dalam setiap persaingan tentu saja akan ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang bersaing untuk selalu mengakumulasi modal, sehingga keterbatasan modal dan kemampuannya dalam mengakumulasi modal menyebabkan masyarakat miskin terus terpinggirkan dan mengalami kekalahan dalam persaingan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Fenomena seperti itu dialami oleh beberapa anggota masyarakat pesisir di berbagai wilayah di kawasan pesisir, sebagaimana diungkapkan oleh Putu Sudarmika (30) dari Desa Pemuteran yang menyatakan bahwa leluhur keluarganya

dulu memiliki tanah tegalan yang cukup memadai namun sejalan dengan perjalanan sang waktu dan berkembangnya anggota keluarga tanah tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Kondisi memosisikan keberadaannya sebagai petani yang tidak bertanah atau petani miskin. Hal senada juga diungkapkan oleh Made Merta (42) nelayan yang berasal dari Desa Les yang menyatakan bahwa keberadaannya sebagai nelayan sebagai akibat dari tidak adanya lahan pertanian, sehingga sering dia ungkapkan pada keluarganya bahwa *uma abiane ada di pesisir/sawah* ladangnya ada di pesisir. Keterbelengguan anggota masyarakat pesisir dari kemiskinan juga disebabkan oleh kurang berpihaknyanya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat dari lebih berpihaknya pemerintah terhadap masyarakat petani sawah dan pengusaha pariwisata dibandingkan dengan masyarakat pesisir.

Kurang keberpihakakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir juga dapat dilihat dari sangat sulitnya anggota masyarakat pesisir/nelayan memperoleh bantuan pinjaman modal usaha dari kelembagaan keuangan formal seperti BRI. Keterbatasan peluang memanfaatkan kelembagaan keuangan formal mengakibatkan banyak di antara anggota masyarakat pesisir ada yang mengembangkan kredit sosial. Namun keterbatasan kemampuan kredit sosial yang dikembangkannya mengharuskan mereka memanfaatkan kelembagaan bank swasta dan atau rentenir dalam mengatasi kesulitan finansial. Kenyataan ini tentu berkontribusi bagi semakin menguatnya jeratan gurita kemiskinan pada masyarakat pesisir, karena mereka terjerat dengan bunga uang yang cukup tinggi. Berpijak dari hal itu kemiskinan sosikultural yang dialami oleh masyarakat pesisir secara geneologi disebabkan oleh faktor kultural dan struktural.

Masyarakat pesisir di kawasan pesisir Bali Utara memandang laut sebagai suatu tatanan kosmis baik secara *sekala*

maupun *niskala*. Laut sebagai tatanan kosmis secara *sekala*, oleh masyarakat setempat dipandang sebagai bagian dari alam yang dapat dijadikan sebagai suatu ruang hidup tempat berusaha/mengadu nasib. Pandangan masyarakat nelayan tentang laut sebagai ruang hidup dapat disimak dari ungkapan yang menyatakan *uma abiane di pasihe*. Ungkapan tersebut di satu sisi menyiratkan akan kekentalan budaya agraris yang dimiliki oleh masyarakat nelayan, sebagai konsekuensi dari terjadinya pencekakan/ terkontaminasi oleh ideologi yang memandang tanah sawah dan tegalan sebagai suatu ekologi tempat mereka melakukan usaha produktif. Kekentalan terhadap budaya agraris tentu terkait dengan latar belakang kultur sosial ekonomi masyarakat nelayan, yang sebelumnya umumnya merupakan keluarga petani sawah atau bisa juga karena memang budaya agraris merupakan kultur besar dari masyarakat Bali.

Ungkapan tersebut disisi lain menyiratkan akan adanya kesadaran yang berkembang pada sebagian besar masyarakat pesisir, bahwa ruang hidup untuk mencari nafkah tidak hanya di sawah/*uma* dan tegalan/*abian*, tetapi juga di laut. Dengan demikian masyarakat nelayan telah mengembangkan suatu ideologi bipolarisasi sumber daya kehidupan. Hal ini sejalan dengan keberadaan ideologi *nyegara – gunung*, yang tidak hanya bernuansa sosialreligius tetapi juga bernuansa sosial ekonomi, kultural dan politik. Kesadaran akan laut sebagai ruang kosmis yang memiliki potensi yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pesisir, telah mengembangkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, sehingga dalam memanfaatkan lingkungan alam pesisir dan laut sebagai ruang hidup masyarakat menggunakan kearifan-kearifan tertentu.

Pemeliharaan kelestarian lingkungan pesisir dan laut tentu saja sangat tergantung dari intensifnya proses

pengawasan. Dalam rangka itu masyarakat desa pakraman di kawasan pesisir mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis masyarakat yang dikenal dengan nama *pecalang segara* dan Pokmaswas (Pokmaswas FKMP, Pokmaswas Pecalang Segara Desa Pemuteran, Pokmaswas Kartika Desa Les, Pokmaswas Benteng Samudra). Di samping itu untuk mengintensifkan pengawasan terhadap lingkungan pesisir dan laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng membentuk Tim Satgas Operasional Pengawasan Sumber Daya Perairan/Laut Kabupaten Buleleng yang anggotanya terdiri atas unsur Pol Airud, Polres, Kodim, Kejaksaan, TNI AL, Bagian Hukum Setda Buleleng, PPNS, dan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Keberadaan berbagai kelembagaan pengawasan kawasan pesisir dan laut tentu saja akan dapat berkontribusi bagi kelestarian lingkungan pesisir dan laut dengan berbagai ekosistemnya.

Di samping laut dipandang sebagai kesatuan kosmis yang bersifat *sekala*, laut juga dipandang sebagai kesatuan kosmis yang bersifat *niskala*. Dalam artian bahwa laut memiliki struktur kosmis dan kekuatan religius magis, yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan gaib seperti: roh halus, *tonya*, dan *dewa-dewi*. Sehubungan dengan hal itu maka dalam proses pemanfaatan laut sebagai ruang hidup, dilakukannya dengan penuh kehati-hatian agar aktivitas yang dilakukannya tidak mengganggu keharmonisan ekosistem laut (alam laut beserta penghuninya baik *sekala* maupun *niskala*). Kesadaran masyarakat pesisir seperti itu memperkuat keyakinan masyarakat pesisir dalam setiap aktivitasnya untuk selalu menghaturkan persembahan terhadap penguasa laut, sehingga laut benar-benar dapat menjadi sumber *tirta amertha* (sumber kehidupan), dan *pemeralinal* penghapus segala penderitaan hidup umat manusia. Keberadaan *segara-gunung* sebagai ruang hidup yang bersifat *niskala* atau yang bersifat magis religious,

mendorong anggota masyarakat pesisir untuk selalu berpegang pada landasan spiritual.

Dalam konteks masyarakat Hindu ada ungkapan yang menyatakan bahwa alam ini merupakan *kamandu* bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian umat manusia dapat mengisap susu kehidupan darinya, melalui kerja yang berlandaskan dharma, karena tanpa bekerja peluang seperti itu tidak mungkin dapat dimanfaatkan. Bekerja merupakan kewajiban moral bagi setiap umat manusia, karena hakekat manusia adalah kerja. Bekerjalah dan bekerjalah karena tanpa bekerja jangankan untuk memelihara orang lain memelihara dirimu sendiri kamu tidak bisa (Bhagawad Gita Bab IV). Dengan demikian kesadara akan *nyegara gunung*, dan kesadaran terhadap kerja sebagai kewajiban moral merupakan etos bagi setiap umat manusia, termasuk masyarakat pesisir di Bali Utara. Etos semacam itu tentu menjadi kekuatan pendorong dalam proses kreativitas manusia dalam memanfaatkan ruang hidup *nyegara gunung* secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah menjaga kelestarian ruang hidup *nyegara-gunung* merupakan suatu keniscayaan.

Dalam setiap masyarakat ada tiga sendi masyarakat yang memiliki peran dan kepentingan tertentu. Masyarakat politik yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan berbagai jajarannya sampai ke tingkat desa dinas memainkan peranan penting dalam proses pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir di Bali Utara. Upaya ke arah itu memang terbingkai dengan landasan kebijakan *tri hita karana* dengan keruangan yang bersifat *nyegara gunung*. Hal ini dapat disimak dari misi dan visi Renstra Kabupaten Buleleng. Implementasi dari visi dan misi itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dilakukannya pada masyarakat pesisir, seperti misalnya adanya pembinaan terhadap masyarakat pesisir dalam berbagai usaha produktif. Selama ini masyarakat pesisir di Kabupaten Buleleng

melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng telah mengembangkan berbagai program seperti LEPM3 pada tahun 2001.

Program ini memberikan pendampingan dana, dan manajemen organisasi. Sasaran program ini adalah nelayan penangkap ikan, pedagang ikan, dan pengolah ikan. Masing-masing kelompok tersebut diberikan bantuan dana bergulir sekitar Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-. Guna keberlangsungan dari program ini kemudian dibentuk Koprasi LEPM3. Program lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengentaskan kemiskinan sosikultural pada masyarakat pesisir adalah memberikan pelatihan-pelatihan penangkapan dan pengolahan ikan. Pelatihan semacam ini dimaksudkan untuk mengembangkan diversifikasi usaha pada masyarakat pesisir. Upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat politik adalah pengembangan pelabuhan ikan di Desa Sangsit. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah berbasiskan kelompok usaha. Di samping itu, pemerintah daerah juga mengembangkan berbagai usaha garam rakyat yang ada di kawasan pesisir Bali Utara, seperti di Desa Pejarakan dan Desa Les. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan mengembangkan pasilitas pendidikan. Pengembangan pasilitas pendidikan memiliki peranan dalam mendisiplinkan, mengkontruk sumber daya manusia sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada di ruang hidup masyarakat sekitar.

Di samping masyarakat politik, masyarakat ekonomi juga ikut berperanan dalam mengatasi masalah kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir di Bali Utara. Hal ini dapat dilihat dari upaya masyarakat ekonomi dalam hal ini para pengusaha pariwisata dan kosmetika membantu masyarakat pesisir. Pengusaha pariwisata di Desa Pemuteran mengembangkan program pembinaan

terhadap anak-anak dari keluarga masyarakat pesisir, seperti yang dilakukan oleh Pengusaha Hotel Ganesha menjadi bapak angkat dari Yayasan Anak Pemuteran. Pengusaha Hotel Kubuku menjadi bapak angkat/ donator tetap dari Yayasan Putera Sesana. Upaya lain yang dilakukan oleh para pengusaha pariwisata adalah menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat untuk bekerja pada unit-unit usaha yang dikembangkan. Masyarakat ekonomi yang lainnya adalah pengusaha kosmetika CV. Graha Palimanan yang bekerja sama dengan Kelompok Nelayan Mina Bhakti Swansari. Pengusaha kosmetika mengupayakan pembudidayaan terumbu karang untuk kepentingan bahan baku kosmetika.

Masyarakat sipil juga ikut berperan dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan sosiokultural. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan beberapa LSM seperti LSM Lini, Bahtera Nusantara, dan Yayasan Karang Lestari. LSM tersebut memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan lingkungan sekitarnya. Upaya tersebut tidak saja memperluas wawasan dari anggota masyarakat pesisir di Bali Utara tetapi juga memberikan kekuatan sehingga lebih mampu dalam bersaing memperebutkan berbagai modal sumber daya yang ada. Berpijak dari kenyataan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa berbagai kelompok masyarakat telah berperan dalam mengatasi kemiskinan cultural pada masyarakat pesisir. Upaya tersebut telah mampu membantu masyarakat miskin di wilayah pesisir Bali Utara dalam mengatasi jeratan kemiskinan. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir, sebagaimana diungkapkan oleh Pt Sudarmika (30), I Ketut Sekar (43), I Ketut Widiana (32), Made Gunaksa (32), Made Merta (44), Ketut Sarka (60) Gde Mangku (57), Nyoman Kepang (52). Terjadinya peningkatan kehidupan masyarakat pesisir tersebut dapat dilihat dari pemilikan rumah

yang semi permanen, fasilitas rumah tangga seperti TV, sepeda motor, dan pemilikan unit usaha penangkapan ikan yang cukup memadai.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian penyajian hasil dan pembahasan dapat dikemukakan simpulan kajian ini sebagai berikut:

(1) Kemiskinan sosiokultural masyarakat di Bali Utara dapat dilihat dari lingkungan pemukiman masyarakat pesisir yang berada di sekitar pantai pada umumnya menempati tanah Negara dan dengan kondisi bangunan yang sangat sederhana. Kemiskinan sosiokultural yang dimilikinya juga tercermin oleh tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi kebaharian yang masih terbatas, kondisi ini tentu saja juga terkait dengan keterbatasan modal financial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. (2) Terjadinya kemiskinan sosiokultural pada masyarakat pesisir secara geneologi disebabkan oleh keterbatasan modal finansial yang dimiliki dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat pesisir yang mengalami jeratan gurita kemiskinan. (3) Ideologi *nyegara gunung* oleh masyarakat pesisir dimaknai sebagai aktivitas magis religius dan sebagai ruang hidup. Dalam memanfaatkan ruang hidup di landasi kesadaran terhadap kerja sebagai kewajiban moral. Hal itu merupakan etos yang menjadi kekuatan pendorong dalam proses kreativitas manusia dalam memanfaatkan ruang hidup *nyegara gunung* secara berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir. Dalam konteks inilah menjaga kelestarian ruang hidup *nyegara-gunung* merupakan suatu keniscayaan. (4) Untuk mengatasi kemiskinan sosiokultural masyarakat pesisir mengembangkan berbagai aktivitas sosial ekonomi yang dilandasi dengan kesadarannya terhadap kebenaran *ideologi nyegara gunung*, dan menjadikan laut sebagai ruang hidup yang menjanjikan. Di samping itu masyarakat pesisir juga

mengembangkan berbagai diversifikasi usaha sebagai bentuk adaptasinya dalam mengatasi kemiskinan sosiokultural yang ada. Dalam mengatasi kemiskinan sosiokultural yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, peranan masyarakat politik, ekonomi dan sipil sangat berarti, baik dalam bentuk pendampingan modal maupun pembinaan terhadap masyarakat pesisir. Sehingga masyarakat pesisir mampu mengurangi jeratan kemiskinan, bahkan ada diantara anggota masyarakat pesisir yang mengalami peningkatan kesejahteraan hidup dan mengalami mobilitas vertical maupun horizontal.

Mencermati realitas kemiskinan sosikultural pada masyarakat pesisir di Bali Utara yang sedang menghadapi berbagai tantangan baik dalam tataran arena, praksis, ranah, dan habitusnya, maka diperlukan adanya upaya-upaya kajian-kajian dalam rangka pengentasan dan peningkatan kualitas kehidupannya, upaya-uapaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya identifikasi berbagai usaha diversifikasi usaha yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir di Bali Utara untuk menemukan usaha produktif yang mungkin memiliki prospek ke depan
2. Diperlukan upaya merevitalisasi dan mereinterpretasi makna dari *nyegara gunung* guna memaksimalkan keberfungsian bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya.
3. Diperlukan upaya-upaya yang bersifat sinergis secara berkelanjutan antara masyarakat ekonomi, politik dan sosial dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kultural dan ekologis yang berkembang dalam masyarakat pesisir di Bali Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, Nengah Bawa, 1988, Dana dan Bhakti Sebagai Konsep Manunggaling

Kaula Gusti Dalam Perspektif Sejarah Bali, (*Makalah*), Singaraja: Universitas Panji Sakti.

_____, 1998, Komunitas Pantai Dalam Perspektif Sosiokultural, *Makalah Seminar Nasional*, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

_____, 2006, *Bali Pada Era Globalisasi*, Singaraja: IKIP N Singaraja

_____, 2006, Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kajian Budaya, *makalah*, Singaraja: Undiksha.

BaumGarther, M.P, 1994, Sosial Control From Bellow, dalam Donald Black (ed), *Toward a General Theory of Sosial Control*, Halaman 303-339, Orlando: Academic.

Capra, Fritjoe, 1997, *Titik Balik Perdaban Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Chambers, Robert, 1993, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.

Dove, Michael R, 1985, Pendahuluan, dalam Michael R. Dove (ed), *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia*, Halaman xv, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____, 1994, Kata Pengantar, dalam Paulus Florus (ed), *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, Halaman xxiii - xiii, Jakarta: Grasindo.

Fakih, Mansour, 2003, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Imssit Press

Geertz, C, 1976, *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara.

- Hasbullah, Jousairi, 2006, *Sosial Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: MR-United Press.
- Korten, David C., 1993, *Menuju Abad Ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kusnadi, 1997, Diversifikasi Pekerjaan di Kalangan Nelayan, dalam *Prisma*, No.7/97, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1999, Redefinisi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Perairan Selat Madura, Perspektif dari Situbondo, Jawa Timur, *Makalah*, Denpasar: Universitas Udayana.
- _____, 2002, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perubahan Sumber daya perikanan*, Yogyakarta: LKiS
- _____, 2003, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- Kusumaatmadja, Sarwono, 2000, Wisata Bahari Sebagai Andalan Pembangunan Nasional, *Makalah*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove, 1984, *Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta: Rajawali.
- Mudana, I Wayan, 1998, *Terhimpit Dibalik Lipatan Dolar (Kajian Antropologi Terhadap Kehidupan Nelayan Pada Kawasan Pemukiman Wisata di Pantai Bali Utara)*, Singaraja: STKIP.
- _____, 2001, Kredit Sosial dan Kredit Ekonomi pada Masyarakat Nelayan di Desa Kubutambahan, *Tesis S2 Kajian Budaya*, Denpasar: UNUD
- _____, 2003, *Kekuatan Religius Magis Dalam Proses Eksploitasi Sumber Daya Kelautan Pada Masyarakat Nelayan di Bali Utara*, Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Scott, James C., 1981, *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Susilo, Y Eko Budi. 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan*. iMalang: Averroes Press.

PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA SPIRITUAL BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI BALI

Sukadi, Utama, Sanjaya
Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Bali memiliki daya tarik wisata yang beragam. Wisata spiritual belum banyak dikembangkan oleh masyarakat lokal Bali. Tujuan penelitian tahun pertama ini adalah mengidentifikasi potensi pariwisata spiritual di Bali dan merumuskan strategi pengembangan serta pemasaran pariwisata spiritual di Bali. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnografi di tiga Kabupaten di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pura Lempuyang Luhur, Pura Penegil Dharma, Pura Negara Gambur Anglayang, Pura Ponjok Batu, Pura Pulaki, dan Pura Perancak dengan segala aktivitas spiritualnya sangat cocok dikembangkan sebagai objek wisata spiritual di Bali. Ini karena seluruh pura dapat memberikan pengalaman nilai-nilai historis, sosial budaya, dan nilai-nilai spiritual kepada wisatawan yang datang. Strategi pengembangan dan pemasaran yang masih harus dilakukan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat lokal pengempon pura, koordinasi dengan pemkab dan pihak-pihak terkait, penataan lingkungan pura yang lebih baik, penyediaan sarana pendukung yang lebih baik, kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, sosialisasi melalui media TIK, sosialisasi melalui kerja sama dengan asosiasi perhotelan dan jasa wisata lainnya, sosialisasi melalui desa pakraman, sekolah dan perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, masyarakat transmigran Bali, dan masyarakat Hindu Nusantara.

Kata-kata kunci: pariwisata spiritual, masyarakat lokal

Abstract

Bali has a variety of tourist attraction. Spiritual tourism object has not been developed by local community in Bali. Accordingly to that issue, this first year research purpose are to indentify the existing potential of spiritual tourism in Bali and to formulate the development and marketing strategy of spiritual tourism in Bali. This research was conducted by an ethnographic approach in three districts in Bali. The result of this research indicate that Lempuyang Luhur temple, Penegil Dharma temple, Negara Gambur Anglayang temple, Ponjok Batu temple, Pulaki temple, and Perancak temple with all the spiritual activities are very suitable to be developed as spiritual tourism object in Bali. This is because those entire temples can provide experience of historical values, socio-cultural, and spiritual values to tourist who come to visit those temples. Development and marketing strategy that remains to be done is to empower the local community of pengempon pura; coordination with the district government and related staff; structuring the temple compound; providing better facilities for support; doing inventory and documentation; dissemination through ICT media; socialization through cooperation with the hotel association and other travel service; and socialization with *pakramans*, schools and universities, work and industry organization, the transmigrants of Balinese, and with National Hindu communities.

Keywords : spiritual tourism, local community.

A. PENDAHULUAN

Penelitian MP3EI Undiksha oleh Wesnawa dkk. (2011) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata Bali dilakukan dengan memanfaatkan tiga jenis daya tarik wisata yakni daya tarik wisata alam, daya

tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/minat khusus. Tiga daya tarik wisata di atas, salah satunya adalah daya tarik wisata spiritual. Sampai saat ini potensi eksisting wisata spiritual yang ada belum dikembangkan secara optimal. Bersama

dengan hal tersebut, kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun 2010 meningkat sebanyak 1.172.978 orang atau 20,39 persen. Memperhatikan data kunjungan pada tahun 2010, maka pada tahun 2011 Pemprov Bali memasang target kunjungan wisatawan nusantara berkisar antara 4,7-5 juta orang dan target kunjungan wisatawan mancanegara berkisar antara 2,6-2,7 juta orang (<http://infopariwisata.wordpress.com-bali/>). Dari jumlah kunjungan wisata tersebut telah banyak wisatawan yang melakukan wisata spiritual.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian di atas, dilakukan penelitian tentang potensi dan eksisting pariwisata spiritual di Bali. Alasan pariwisata spiritual adalah bahwa pariwisata spiritual sesungguhnya sangat prospektif dan cocok dikembangkan di Bali karena daya dukung alam dan masyarakatnya yang religius. Selain itu, pariwisata spiritual belum banyak ada di wilayah lain di Indonesia. Pariwisata spiritual dapat menata tata kehidupan sosial budaya masyarakat Bali dengan berbagai keunikan adat-istiadat dan budaya. Hampir di setiap desa *pakraman* memiliki keunikan, baik adat-istiadat, budaya maupun kehidupan sosial yang didasarkan pada *awig-awig*. Selain itu, kawasan suci dengan lingkungan alamnya berupa perbukitan, pegunungan, pantai yang indah harus selalu dipelihara dan dibina. Mengembangkan pariwisata spiritual tidak selalu berpikir membangun hotel atau vila sebanyak-banyaknya, tetapi tetap pada pemberdayaan nilai sosial budaya masyarakat yang ada.

Bali merupakan satu-satunya daerah tujuan wisata yang memiliki pura terbanyak di dunia. Pura-pura yang ada, terutama Pura Sad Kahyangan atau Dang Kahyangan, sesungguhnya merupakan sebuah kisah perjalanan yang ditempuh oleh orang intelek dan suci di masa lalu dalam melakukan penyebaran agama, seperti Rsi Markandeya, Empu Kuturan, Dang Hyang Dwijendra atau Dang Hyang Nirartha, dan Mpu Bharadah. Perjalanan

para Rsi tersebut sekaligus dapat dikategorikan sebagai wisata spiritual.

Pura-pura tersebut perlu diidentifikasi potensinya untuk dikembangkan dan dipasarkan menjadi objek wisata spiritual di Bali berbasis masyarakat lokal. Untuk tujuan itulah penelitian ini dilakukan. Secara rinci tujuan khusus dari penelitian tahun pertama ini adalah: 1) mengidentifikasi potensi dan eksisting pariwisata spiritual di Bali dan 2) menghasilkan strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata spiritual di Bali berbasis kearifan lokal masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari rencana dua tahun penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi etnografi. Penelitian dilakukan pada enam Pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan di tiga Kabupaten, yaitu: Karangasem, Buleleng, dan Jembrana. Subjek penelitian yang melibatkan meliputi: tokoh masyarakat, prajuru desa pakraman dan desa dinas, staff pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten, budayawan, rohaniawan, serta subjek dokumen. Subjek dipilih secara *purposive* dan dengan teknik *snowball* dimulai dengan menetapkan informan kunci dan selanjutnya dipilih sesuai dengan pilihan subjek. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada identifikasi potensi dan eksisting pariwisata spiritual di Bali dan strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata spiritual di Bali berbasis kearifan lokal masyarakat. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, observasi, kajian dokumen, dan diskusi kelompok fokus. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif melalui siklus interaktif, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Milles dan Huberman, 1992).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dideskripsikan dan dijelaskan dalam dua tema pokok, yaitu Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata spiritual berbasis kearifan lokal masyarakat dan strategi pengembangan dan pemasaran objek wisata spiritual yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal pengempon pura.

Pura pertama yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata spiritual adalah Pura Lempuyang luhur. Sebagai Pura Sad kahyangan Jagat, pura ini sangat cocok dikembangkan menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena keberadaan Pura Lempuyang Luhur dengan segala aktivitas spiritualnya dapat memberikan pengalaman nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan (Adnyana Ole, 2008a).

Pura Lempuyang Luhur adalah situs sejarah peninggalan dan untuk penghormatan serta pemuliaan kepada Mpu Genijaya di Bali. Keberadaan pura ini berkaitan dengan kedatangan Bhatara Tiga di Bali pada sekitar Tahun 191 M dari Gunung Semeru di Jawa Timur atas perintah Bhatara Pacupati. Di antara *Bhatara Tiga* itu *Bhatara Gnijaya* berparhyangan di gunung Lempuyang (bukit bisbis). Ida Bhatara Gnijaya diperintahkan untuk menjadi pemimpin umat di Bali dan mengajarkan agama Hindu serta nilai-nilai kehidupan kepada masyarakat Bali. Karena itu, sebagai wujud pemuliaan kepadanya beliau kemudian distanakan di Pura Lempuyang luhur dan dipuja sebagai Dewa Icwara. Dewa yang memberikan sinar suci kehidupan kepada umat manusia (Bali Post, 2006).

Pura ini sekarang terletak di puncak gunung bisbis, yaitu di desa Purwayu Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman proses pendakian spiritual yang

membahagiakan. Dimulai dari menghaturkan sembah di Pura Penataran Agung Lempuyang sebagai pesanakan Pura Lempuyang Luhur yang paling bawah. Perjalanan lalu dilanjutkan menuju Pura Telaga Mas sebagai tempat pesucian Ida Bhatara. Di sini umat mendapat air suci untuk pembersihan diri secara lahir dan bathin. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan naik gunung ke Pura Telaga Wangsa dan Pura Lempuyang Madya sebagai tempat meditasi Ida Bhatara. Setelah itu perjalanan dapat dilanjutkan dengan pendakian ke Pura Puncak Bisbis dan Pura Pasar Agung. Sesuai dengan namanya Pura Pasar Agung adalah sebagai tempat aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak pendakian paling tinggi di Pura Lempuyang Luhur. Di Pura terakhir dan utama ini kita melakukan meditasi menunggalkan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Icwara. Proses pendakian spiritual dari Pura Penataran Agung hingga Pura Lempuyang Luhur inilah sesungguhnya manusia dapat belajar meniti kehidupan dari yang paling bawah hingga mencapai puncak tujuan hidup, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan bathin (Intra AS, 2011).

Pura kedua yang juga cocok dikembangkan menjadi objek wisata spiritual di Bali adalah Pura Penegil Dharma dengan pesanakannya yang berjumlah delapan sebagai simbol Padma Bhuwana. Kompleks Pura ini terletak di Desa Kubutambahan dan Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Melakukan wisata spiritual di seluruh kompleks pura ini dapat memberikan pengalaman nilai-nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan (Ari Sri lestari, 2006).

Dikatakan memiliki nilai historis karena keberadaan kompleks pura ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan Raja Ugracena dengan gelar Sri Kesari Warmadewa di Bali dengan penasihat

spiritualnya adalah Rsi Mankandeya. Raja Ugracena dan Rsi Markandeya tidaklah hanya pemimpin masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan spiritual kependaitaan yang tinggi, sehingga istananya tidak saja menjadi pusat pemerintahan tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama dan sebagai petirtan (tempat air suci kehidupan) dengan adanya 118 sumber mata air (Gobyah, 2006).

Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman hidup bertoleransi dalam kehidupan masyarakat multikultur di Indonesia. Ini terjadi karena dari peninggalan sejarahnya dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Raja Ugracena kerajaan Kawista telah menjadi pusat perdagangan dan pusat pendidikan agama yang didatangi orang dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda dengan keyakinan yang berbeda juga. Yang unik, keberagaman itu justru disungsung di pura ini dengan adanya pelingih-pelingih pura sebagai stana Ratu Gede Sundawan (unsur Sunda), Ratu Gede Melayu (unsur Melayu), Ratu Mas Subandar (unsur Cina), dan Ratu Dalem Mekah (unsur Islam), di samping ada juga pelinggih stana Dewa Ciwa (unsur Hindu). Pada pokoknya Pura Penegil Dharma dengan pesanakannya adalah situs sejarah peninggalan dan penghormatan kepada keluarga raja Sri Kesari Warmadewa dan raja Sri Singa Murti di Bali (Paramartha, tt).

Pura Negara Gambur Anglayang sebagai objek ketiga, seperti Pura Penegil Dharma, juga sangat cocok dikembangkan menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena keberadaan Pura ini dengan segala aktivitas spiritualnya dapat memberikan pengalaman nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan. Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman hidup bertoleransi dalam kehidupan masyarakat multikultur di Indonesia. Pura ini adalah situs sejarah peninggalan dan penghormatan kepada

keluarga raja Sri Singa Murti di Bali (Adnyana Ole, 2011, 2008b; Darmawan M., 2008).

Pura Ponjok Batu sebagai objek keempat juga sangat cocok dikembangkan menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena keberadaan Pura ini dengan segala aktivitas spiritualnya dapat memberikan pengalaman nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan. Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman hidup bertoleransi dan memberikan sinar kehidupan suci kepada masyarakat. Pura ini adalah situs sejarah peninggalan dan penghormatan kepada Dang Hyang Nirartha dalam melakukan perjalanan tirtha yatra dan memberikan ajaran agama Hindu di Bali (Adnyana Ole, 2006b; Arie Sri Iestari, tt; Gobyah, 2011).

Pura Pulaki dengan pesanakannya (Pura Melanting, Pura Kertha Kawat, Pura Pemuteran, dan Pura Pabean) sebagai objek yang kelima sangat cocok menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini terjadi karena keberadaan Pura ini dengan segala aktivitas spiritualnya dapat memberikan pengalaman nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan. Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman hidup bertoleransi dan memberikan sinar kehidupan suci kepada masyarakat dalam mengembangkan aktivitas usaha secara fungsional di masyarakat. Pura ini adalah situs sejarah peninggalan dan penghormatan kepada Dang Hyang Nirartha dan keluarganya (Ida Bhatari Dalem Ketut Pulaki, Ida Bhatari Dewa Ayu Melanting, dan Ida Bhatara Mentang Yuda atau Ida Bhatara Hakim Agung) dalam melakukan perjalanan tirtha yatra dan mengajarkan agama Hindu dan ajaran nilai-nilai kehidupan di Bali (Adnyana Ole, 2006a; Pemkab Buleleng, 2012; PHDI, 2000).

Pura Perancak sebagai objek pura keenam juga sangat cocok dikembangkan

menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena keberadaan Pura ini dengan segala aktivitas spiritualnya dapat memberikan pengalaman nilai historis, sosial budaya, dan spiritual yang tinggi kepada para wisatawan. Melakukan aktivitas spiritual di lingkungan pura ini juga dapat memberikan pengalaman hidup bertoleransi dan memberikan sinar kehidupan suci kepada masyarakat. Pura ini adalah situs sejarah peninggalan dan penghormatan kepada Dang Hyang Nirartha dalam melakukan perjalanan tirtha yatra dan memberikan ajaran agama Hindu di Bali (Asram Bunda RAM, 2010; Fajar Arcana, tt; Yudi, 2012).

Untuk menjadikan Pura-pura Sad Kahyangan Jagat dan Pura-pura Dang Kahyangan di Bali sebagai objek wisata spiritual perlu dikembangkan strategi pengembangan dan pemasaran berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap keberadaannya. Strategi pengembangan dan pemasaran yang masih harus dilakukan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat lokal pempon pura agar mampu mengelola usaha wisata spiritual. Masyarakat pempon pura perlu berkoordinasi dengan pemkab dan pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan fasilitas dan sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pariwisata spiritual di lingkungan pura masing-masing. Masyarakat juga masih perlu melakukan penataan lingkungan pura yang lebih baik agar kondisinya tetap bersih, asri, hijau, sehat, lestari, nyaman, dan aman. Karena itu, diperlukan penyediaan sarana pendukung yang lebih baik seperti penyediaan sarana parkir yang memadai, sarana listrik, air bersih, dan tempat untuk membersihkan diri secara lahir dan bathin, serta peralatan kebersihan lingkungan yang memadai.

Jika penataan lingkungan spiritual pura telah memadai, maka kegiatan sosialisasi untuk pemasaran objek wisata spiritual perlu terus dikembangkan. Kegiatan yang utama adalah aktivitas inventarisasi

dan dokumentasi semua potensi yang dimiliki pura dengan segala aktivitas spiritualnya, terutama yang menyangkut nilai-nilai historis pura, aktualisasi nilai-nilai kesadaran sosial dan budaya yang melingkupi, serta nilai-nilai spiritual yang dikandungnya. Jika ini sudah dilakukan, usaha berikutnya adalah sosialisasi potensi pura dengan aktivitas spiritualnya kepada masyarakat melalui media TIK, sosialisasi melalui kerja sama dengan asosiasi perhotelan dan jasa wisata lainnya, sosialisasi melalui desa pakraman, sekolah dan perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, masyarakat transmigran Bali, dan masyarakat Hindu Nusantara.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Pura-pura Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan* di Bali yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan segala aktivitas spiritualnya sangat cocok dikembangkan menjadi objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena seluruh pura dapat memberikan pengalaman nilai-nilai historis, sosial budaya, dan nilai-nilai spiritual kepada wisatawan yang datang. Temuan ini cocok dengan pandangan yang menyatakan bahwa wisata spiritual merupakan perjalanan yang memperkaya batin individu secara personal meski tidak terkait dengan anjuran dalam ajaran agama yang dipeluknya (Herdina, 2012). Jenis wisata ini dalam praktiknya sangat menghargai tradisi budaya lokal, mencintai alam dan lingkungan, serta sebagian besar turisnya berasal dari kalangan yang berpendidikan (Pitana, 2012). Objek wisata spiritual ini bukanlah mendiskusikan agama semata. Kecenderungannya justru orang lebih melirik berbicara spiritual. Mereka mencari *peace and harmony*. Menurut Pitana (2012) lebih lanjut para wisatawan dewasa ini telah melirik nilai-nilai historis, praktik sosial budaya masyarakat tradisional yang toleran dan ramah lingkungan, dan nilai-nilai spiritual yang penuh kedamaian sebagai objek wisatanya.

Temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan pemasaran wisata spiritual masih harus dilakukan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan minat wisatawan. Upaya-upaya yang harus dilakukan, antara lain: memberdayakan masyarakat lokal pengempon pura, berkoordinasi dengan pemkab dan pihak-pihak terkait, menata lingkungan pura yang lebih baik, menyediakan sarana pendukung yang lebih baik, melakukan inventarisasi dan dokumentasi, sosialisasi dan promosi melalui media TIK, sosialisasi melalui kerja sama dengan asosiasi perhotelan dan jasa wisata lainnya, serta sosialisasi / promosi melalui desa pakraman, sekolah dan perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, masyarakat transmigran Bali, dan masyarakat Hindu Nusantara. Temuan ini relevan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk menarik minat wisatawan datang ke daerah-daerah tujuan wisata tertentu (lihat Hidayatulloh, 2011; Yusmiarti, 2009; Santosa, 2002).

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pura Lempuyang Luhur, Pura Penegil Dharma, Pura Negara Gambur Anglayang, Pura Ponjok Batu, Pura Pulaki, dan Pura Perancak dengan segala aktivitas spiritualnya sangat cocok dikembangkan sebagai objek wisata spiritual di Bali. Ini dilakukan karena seluruh pura dapat memberikan pengalaman nilai-nilai historis, sosial budaya, dan nilai-nilai spiritual kepada wisatawan yang datang. Strategi pengembangan dan pemasaran yang masih harus dilakukan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat lokal pengempon pura, koordinasi dengan pemkab dan pihak-pihak terkait, penataan lingkungan pura yang lebih baik, penyediaan sarana pendukung yang lebih baik, kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, sosialisasi melalui media TIK, sosialisasi melalui kerja sama dengan asosiasi perhotelan dan jasa

wisata lainnya, sosialisasi melalui desa pakraman, sekolah dan perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, masyarakat transmigran Bali, dan masyarakat Hindu Nusantara.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini untuk mengembangkan dan memasarkan *Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan* sebagai objek wisata spiritual yang baik. Pertama, pemerintah kabupaten perlu lebih dapat memberdayakan masyarakat lokal desa pakraman pengempon pura. Kedua, masyarakat lokal desa pakraman harus melakukan inventarisasi dan dokumentasi potensi wisata spiritual yang dimiliki oleh lingkungan suci *Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan* dengan segala aktivitas spiritual yang didukung oleh masyarakat. Ketiga, masyarakat lokal desa pakraman perlu menyiapkan dan mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha wisata spiritual. Keempat, masyarakat lokal desa pakraman perlu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan asosiasi perhotelan dan asosiasi jasa wisata lainnya. Kelima, masyarakat lokal desa pakraman pengempon pura perlu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan kelompok masyarakat desa pakraman, sekolah, perguruan tinggi, dan dunia kerja dalam memberikan informasi tentang keberadaan potensi objek wisata spiritual lingkungan suci pura. Keenam, masyarakat lokal desa pakraman perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mampu mengelola usaha wisata spiritual. Ketujuh, perlu studi inventarisasi dan dokumentasi potensi wisata spiritual lingkungan suci Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan. Kedelapan, perlu sosialisasi kekayaan budaya spiritual lingkungan suci pura melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesembilan, perlu sosialisasi kekayaan budaya spiritual lingkungan suci pura melalui jalur keluarga, desa pakraman di Bali, sekolah dan

perguruan tinggi, dunia kerja dan dunia industri, kelompok masyarakat Bali transmigran, dan kelompok masyarakat Hindu yang tersebar di seluruh nusantara. Kesepuluh, perlu sosialisasi melalui jalur kerja sama dengan asosiasi perhotelan dan asosiasi usaha jasa perjalanan wisata. Terakhir, perlu penyusunan buku-buku spiritual tentang keberadaan dan perkembangan aktivitas spiritual di lingkungan suci Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana Ole. 2011. *Pura Negara Gambur Anglayang Spirit Multikultural*. <http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=21&id=58168>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- 2008a. *Lempuyang Stana Mpu Genijaya*. <http://departelahne.wordpress.com/2008/10/09/pura-luhurlempuyang/#more-24>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- 2008b. *Pura Gambur Anglayang*. <http://www.babadbali.com/pura/plan/gambur-anglayang.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- 2006a. *Pura Pulaki, Tempat Suci Peninggalan Prasejarah*. <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/1/18/bd2.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- 2006b. *Pura Ponjok Batu: Penyeimbang Bali Utara*. <http://kemoning.info/blogs/?p=864>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Arie sri lestari, 2006. *Pura Penegil Dharma Berawal dari Kerajaan Kawista*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/7/12/bd2.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Tt. *Pura Ponjok Batu*. <http://www.babadbali.com/pura/plan/p-onjok-batu.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Asram Bunda RAM. 2010. *Pura Perancak*. <http://asrambundaram.blogspot.com/2010/04/pura-perancak.html>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Bali Post. 2006. *Pura Lempuyang, "Stana" Dewa Iswara*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/2/15/bd2.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Darmawan Mataram. 2008. *Pura Negara Gambur Anglayang*. <http://balitv.tv/btv2/index.php/ista-dewata/658-pura-negara-gambur-anglayang>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. 1980/1981. *Pura-Pura di Bali*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Fajar Arcana, P. *Pura Perancak*. http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=99. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Gobyah I K. 2011. *Pura Ponjok Batu*. <http://binginbanjah.wordpress.com/2011/02/21/pura-ponjok-batu/>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012
- 2006. *Pura Penegil Dharma*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/7/12/bd1.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Herdina, L. 2012. *Wisata Spiritual, Perjalanan Suci Peziarah Urban*. <http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2012/10/15/wisata-spiritual-perjalanan-suci-peziarah-urban/>. Diunduh pada hari Sabtu, 17 Nopember 2012.

- idayatulloh, Y N. 2011. *Strategi Pemasaran Objek Wisata Alam Talaga Remis di Taman Nasional Gunung Ciremai*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49867>. Diunduh pada Hari Senin, 22 April 2013
- Huberman, A.B dan Miles M.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Intra AS. 2011. *Pura Lempuyang Luhur Puncak Bisbis*. <http://pendakianspiritual.blogspot.com/2011/09/pura-lempuyang-luhur-puncak-bisbis.html>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Paramartha, N. tt. *Jejak Pura Puseh Penegil Dharma, Pusat Pengembangan Agama dan Pemerintahan*. <http://www.babadbali.com/pura/plan/penegil-darma.htm>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Pemkab Buleleng. 2012. *Pura Pulaki*. <http://bulelengkab.go.id/v1/index.php/2012-04-03-06-05-52/potensi-pariwisata/pariwisata-buleleng-barat/71-pura-pulaki>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- PHDI. 2000. *Pura Pulaki: Tempat Moksah Sri Patni Keniten*. http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=650&Itemid=99. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Pitana, G. 2012. *Wisata Spiritual Potensial Dikembangkan*. Kompas.Com. <http://travel.kompas.com/read/2012/08/02/1923017/>. Diunduh pada hari Sabtu, 17 Nopember 2009.
- Santosa, S P. 2002. *Pengembangan Pariwisata Indonesia*. http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p._santosa/artikel_setyanto_p._santosa/pengembangan_pariwisata_indonesia.html. Diunduh pada Hari Senin, 22 April 2013.
- Wesnawa, I Gede Astra, Sanjaya, D. B., Widiastini, Ni Made Ary.2011. *Pengembangan Potensi Pariwisata Berkelanjutan bagi Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Koridor Bali sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional. Laporan Penelitian*. Program MP3EI Undiksha Singaraja.
- Yudi FX, G. 2012. *Pura Perancak*. <http://deyudi.com/pura-perancak>. Diunduh pada Hari Sabtu, 4 Agustus 2012.
- Yusmiarti, A. 2009. *Promotion Strategies of The Culture and Tourism Service of The Kulon Progo Regency to Increase The Visitours of Sermo Dam in The Kulon Progo Regency of Yogyakarta*.<http://publikasi.umy.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/95/2263>. Diunduh pada Hari Senin, 22 April 2013.

KAJIAN ESTETIKA RAGAM HIAS TENUN SONGKET JINENGDALEM, BULELENG

I Nyoman Sila¹ dan I Dewa Ayu Made Budhyani²

¹Jurusan Pendidikan Seni Rupa, FBS Universitas Pendidikan Ganesha, ²Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, FTK Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: nyoman.sila99@gmail.com, gek_bud@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang (1) komposisi penempatan ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng, (2) ritme/irama penataan ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng, (3) keharmonisan tata letak ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng, (4) keseimbangan penataan ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng, (5) variasi-varisai ragam hias yang dibuat oleh perajin pada kain tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan estetika, dan etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, fokus group, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Komposisi penempatan ragam hias objek utama, secara umum ditempatkan secara penuh pada bidang kain, (2) Irama penataan ragam hias ditampilkan melalui pengaturan bentuk motif hias seperti: besar, kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan juga dalam pengaturan warna yang berbeda-beda secara berulang-ulang. (3) Keharmonisan penempatan ragam hias tenun songket Jinengdalem, melalui motif-motif hias dan warna-warna yang ditampilkan secara keseluruhan dipandang dari nilai-nilai estetikanya sangat harmonis. Karena disini ada keselarasan dalam penempatan motif hias cukup terpadu, penyusunan warna pada beberapa motif hias dengan warna-warna yang komplementer dan tidak ada yang mengalami pertentangan-pertentangan. (4) Keseimbangan penempatan ragam hias pada tenun songket Jinengdalem terlihat pada keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris merupakan pengaturan yang tidak banyak mengambil resiko, karena tidak akan menimbulkan kesan berat sebelah. (5) Penempatan ragam hias pada kain tenun songket dilakukan sesuai dengan motif hias yang dibuat. Karena masing-masing motif hias sudah ada polanya seperti misalnya motif hias tirta nadi, siapapun yang membuat motif hias tersebut polanya pasti sama sesuai pakem sebagai motif hias kain tenun songket Jinengdalem. Variasi yang dilakukan oleh perajin adalah pada pengaturan atau penempatan isian-isian dari motif tersebut. Variasi juga dilakukan pada penempatan objek-objeknya, dan juga pada penempatan hiasan pinggirnya pada kain.

Kata-kata kunci: estetika, ragam hias, tenun songket

Abstract

This study aimed at describing (1) the composition of the places of the decorated styles in the *songket* woven cloth from the village of Jinengdalem, Buleleng (2) the rhythm in the structure of the decorated styles in the *songket* (3) the harmony of the places of the decorated styles in the *songket*, (4) the balance of the structure in the decorated styles, (5) the variations in the decorated styles by an artist. This study used aesthetic approach and ethnography. The data were collected through observation, interview, documentation, focus group discussion and analyzed in a qualitative-descriptive manner. The results showed that (1) the composition of the main object decorative style in general is placed on the cloth area; (2) the rhythm of the structure in the decorated style is shown through the arrangement of shapes of the decorated motif such as: large, small, high, low, long, short, and also in the repetitive arrangement of various colors; (3) the harmony of the places of the decorated styles in the *songket* woven cloth from the village of Jinengdalem, viewed from in decorated motifs and colors that are shown as a whole from the point of view of aesthetic value is very harmonious. Since here there is a harmony in the places of the decorated style with

sufficient integrity, the order of colors on some decorated motifs with complementary colors with none of which undergoing contradictions. (4) the balance in the places of the decorated styles in the *songket* woven cloth from Jinengdalem is shown in the symmetrical balance. The symmetrical balance is the arrangement with less risk, since it will not make imbalanced impression. (5) the places of the decorated styles on *the songket* woven cloth is done in accordance with the decorated style that is created. Since every decorated motif has its own pattern, such as for instance, *tirta nadi* decorated style, anyone who creates the decorated motif will create the same pattern in accordance with the standard as the decorated style in the *songket* woven cloth from Jinengdalem. The variation done by an artist is on the arrangements or places of the contents of the motifs. The variation is also done on the places of the objects and on the places of the decorations at the edges of the cloth.

Keywords: aesthetics, decorated style, *songket* woven cloth

PENDAHULUAN

Pada kain tenun songket yang paling menonjol dapat kita lihat adalah bentuk-bentuk ragam hiasnya. Dari ragam hias tersebut terpancar nilai-nilai keindahan atau estetika yang sangat menarik sebagai karya seni yang berkualitas. Pembuatan ragam hias tersebut dilakukan dengan cara menambahkan benang pakan (horisontal waktu menenun) dengan menggunakan benang emas, benang perak, atau jenis benang berwarna lainnya pada benang lungsi (posisi vertikal) waktu menenun. Bila dilihat cara penambahan benang pakan dengan benang emas, benang perak, atau jenis benang berwarna lainnya kelihatan seperti menyungkit pada saat proses menenun (Nusyirwan, 1982: 9).

Ragam hias tenun songket diciptakan dengan teknik tenunan yang dikenal dengan teknik pakan tambahan (*suplementary weft*). Cara mengangkat mulut lungsi diatur oleh lidi-lidi. Makin banyak jumlah lidi-lidinya, makin rumit dan kaya dengan ragam hiasnya. Betapa terampilnya penenun songket yang harus mengerjakan ragam hias melalui teknik tenun dengan jumlah lidi-lidi kurang lebih 100 biji tanpa mengalami kesalahan tenun, adalah sesuatu pekerjaan yang sangat terpuji (Yusuf Affendi, 1981: 26).

Ragam hias yang ada pada kain tenun songket merupakan perwujudan keindahan manusia dan alamnya. Terciptanya ragam hias ini dilandasi oleh

pengetahuan manusia tentang lingkungannya yang dapat merangsang untuk menciptakan aneka ragam hias. Benda-benda alam yang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk ragam hias seperti, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, unsur-unsur alam, nilai-nilai agama dan kepercayaan disarikan ke dalam suatu perwujudan keindahan yang harmonis (Gelebet, 1982, dan Budiastira, 1984).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh I Ketut Parmada yang berjudul "Songket Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Tahun 1998", bahwa masyarakat desa Jinengdalem, Buleleng, khususnya kaum wanitanya sebagian besar sebagai perajin kain tenun songket yang sudah melakukannya bertahun-tahun secara turun-temurun.

Berkembangnya seni tenun songket di Desa Jinengdalem sangat besar peranannya terhadap keberadaan kain tenun songket yang ada di Kabupaten Buleleng, dan bahkan satu-satunya yang masih berkembang dengan baik sebagai seni kerajinan tenun songket yang memiliki ciri khas sebagai karya kain tenun songket Buleleng. Tentu saja hal ini yang menjadi perbedaan dengan hasil tenun songket yang ada di daerah lain di Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya (1) Bagaimanakah komposisi penempatan ragam hias tenun songket desa

Jinengdaleng, Buleleng? (2) Bagaimanakah ritme/irama penataan ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng? (3) Bagaimanakah keharmonisan tata letak ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng? (4) Bagaimanakah keseimbangan penataan ragam hias tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng? (5) Bagaimanakah perajin tenun songket menempatkan variasi-variasi ragam hias pada kait tenun songket desa Jinengdalem, Buleleng?

Estetika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang kita sebut keindahan (A.A.M. Djelantik, 1999: 9). Dalam filsafat keindahan "pengalaman estetis" tentang sesuatu mengapa ada objek yang disebut indah. Objek itu dikaji melalui pendekatan yang berdasarkan pada nilai-nilai estetis atau unsur-unsur estetis atau estetika dari objek tersebut (Mudji Sutrisno, FX., SJ, dan Christ Verhaak SJ, 1993: 13).

Estetika yang terdapat dalam ragam hias berkaitan dengan unsur-unsur yang dapat mendukung nilai-nilai estetika atau keindahan tersebut. Unsur-unsur estetika tersebut meliputi wujud yang menyangkut masalah bentuk dan struktur, keseimbangan; ada keseimbangan simetri dan non simetri, komposisi, gerak atau irama, harmoni menyangkut masalah kesesuaian atau keserasian, dan lain-lain.

Ragam hias atau ornamen berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "ornare" yang artinya hiasan atau perhiasan (Soepratno, 1987: 11). Ragam hias atau ornamen itu sendiri terdiri dari berbagai jenis motif dan motif-motif itulah yang digunakan sebagai penghias sesuatu yang ingin kita hiasi. Ragam hias atau ornamen dimaksudkan untuk menghias suatu bidang atau benda, sehingga benda tersebut menjadi indah.

Dalam penggunaannya ragam hias atau ornamen tersebut ada yang hanya berupa satu motif saja, dua motif atau lebih, pengulangan motif, kombinasi motif dan ada

pula yang "distilasi" atau digayakan. Pada dasarnya jenis ragam hias itu terdiri atas: (1) motif geometris berupa garis lurus, garis patah, garis sejajar, lingkaran dan sebagainya, (2) motif naturalis berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, unsur-unsur alam, dan lain sebagainya, dengan demikian ragam hias lahir menjadi simbol-simbol atau perlambangan tertentu (Budhyani, 2010).

Penempatan suatu ragam hias atau motif hias pada kain tenun songket terdapat pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan luas atau besarnya bidang yang akan ditempati. Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa motif hias menjadi pangkal bagi tema suatu buah kesenian. Sejalan dengan pendapat itu, melalui segi visual bila terdapat suatu goresan sebuah garis lengkung, maka goresan tersebut dapatlah disebut sebagai suatu motif, yaitu motif garis lengkung. Kalau garis lengkung tadi diulang-ulang secara simetris, maupun non simetris kemudian menjadi sebuah pola, bahkan tidak hanya sebuah saja, tetapi akan bergantung pada kemungkinan kreativitas seseorang di dalam merangkainya. Selanjutnya apabila pola yang telah diperoleh itu diterapkan atau dijadikan suatu hiasan seperti pada seni tenun songket, maka kedudukannya adalah sebagai hiasan pada bangunan tersebut (Gustami Sp., 1980: 7).

Lebih lanjut dalam penempatan sebuah ragam hias yang memiliki posisi simetris dapat menggambarkan suatu keseimbangan yang banyak dilakukan oleh para seniman di masa lampau. Cara penggambaran seperti ini dapat pula dihubungkan cara hidup serba seimbang, hidup rukun bergotongroyong, bahu membahu yang biasa dilakukan masyarakat desa. Maka, dengan kesemuanya itu mencerminkan suatu timbal balik yang sepadan, yang tampaknya sangat mempengaruhi penciptaan-penciptaan karya seninya. Dalam menghasilkan atau mewujudkan ragam hias sebagai pengorganisasian unsur-unsur visual dalam

seni rupa berupa garis, bidang, warna, tekstur dan lain-lain itu akan memberi warna baru pada produk-produk seni yang lahir, menjadi seimbang merupakan ungkapan-ungkapan estetik dengan perimbangan yang sempurna.

Pada setiap ragam hias terdapat tiga komponen pokok yaitu adanya suatu tokoh sebagai pokok yang diceritakan, kemudian figuran-figuran sebagai pendukung motif pokok atau berfungsi sebagai latar belakang suatu susunan, dan isian-isian untuk menambah keindahan secara keseluruhan. Motif pokok, kecuali menjadi pusat perhatian dan memegang peranan penting yang kuat dalam suatu susunan, juga merupakan wakil dari apa yang dimaksud oleh penciptanya, merupakan pokok persoalan yang diceritakan. Sedangkan figur-figur itu dimaksudkan sebagai motif-motif penunjang pola pokok untuk mencapai keberhasilan pada tingkat yang bagus atau sebagai pengiring dalam suatu penampilan. Goresan-goresan itu dimaksudkan sebagai kelengkapan dari suatu susunan ragam hias, di samping berfungsi untuk menambah keindahan ragam hias secara keseluruhan (Gustami Sp., 1980: 8-9).

Dari komponen pokok kalau diperhatikan secara umum ragam hias yang berkembang pada prinsipnya ada lima jenis yakni: ragam hias geometris, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan unsur-unsur alam yang didesain sesuai dengan penempatannya (Seraya, 1980/1981: 11-12).

Sesungguhnya suatu ragam hias dapat pula diartikan sebagai suatu "desain" atau "pola" sesuai dengan pengertian umum, dan dalam konteks yang terbatas, mengingat masing-masing istilah itu memiliki pengertiannya dan kegunaan-kegunaan tersendiri (Gustami Sp., 1980:9). Namun demikian dalam lingkup arti kata itu sendiri baik motif, pola ataupun desain yang dalam satu pengertian itu, sesungguhnya lebih dekat dengan apa yang disebut motivasi yang dalam suatu saat merupakan

keharusan untuk diwujudkan. Dengan demikian kelahiran ragam hias akan tetap memiliki maknanya yang dalam, merupakan ungkapan-ungkapan idealisasi atau gagasan-gagasan pencipta dari perasaan seni dengan media ragam hias. Tetapi tidaklah dapat dibantah bahwa ungkapan-ungkapan yang estetik itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai bentuk dan pengulangan pada objek-objek yang fungsional.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan estetika, dan etnografi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Sumber informan dalam penelitian ini adalah perajin tenun songket Jinengdalem, dan pemerhati seni (ahli dalam bidang seni rupa) yang dipilih secara purposive, untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber informannya adalah 5 orang perajin tenun songket, dan satu orang pengamat seni. Pengumpulan data dilaksanakan melalui: (a) observasi, (b) wawancara, (c) dokumentasi, (d) fokus group. Semua data yang diperoleh di lapangan yang menyangkut masalah: komposisi penempatan ragam hias tenun songket Jinengdalem, irama/ritme ragam hias kain tenun songket Jinengdalem, harmoni/keharmonisan penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem, keseimbangan penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem, dan variasi penempatan ragam hias tenun songket oleh perajin tenun songket Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap perajin tenun songket Jinengdalem, hasil penelitian menunjukkan bahwa perajin tenun songket walaupun mengalami pasang surut dalam memproduksi karyanya, namun sebagai seni

kerajinan yang menjadi warisan tradisi secara turun-temurun masih tetap berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui jenis-jenis kain tenun songket dan penerapan motif hiasnya yang dihasilkan oleh perajin Jinengdalem sampai saat ini sangat beragam.

Keragaman hasil tenun songket yang dihasilkan oleh perajin tidak hanya beragam pada jenis ragam hiasnya, akan tetapi juga kain tenun songket yang dihasilkan, termasuk juga keanekaragaman warna yang ditampilkan dari tenunan benang emas, benang perak, dan jenis benang berwarna lainnya yang memberikan estetika tersendiri hasil tenun songket Jinengdalem. Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini, bahwa perajin selalu setia memproduksi barang kerajinan karena hanya mengisi waktu luang, akan tetapi semangat kerja selalu tumbuh berkat pesanan dari para konsumen.

Jenis-jenis kerajinan tenun songket yang dihasilkan oleh perajin Desa Jinengdalem adalah: kain/kemben, saput/kampuh, ada juga beberapa jenis yang lainnya seperti selendang, dan taplak meja. Semua jenis produk ini sebagai ciri produksi perajin Jinengdalem. Sebagai karya seni kerajinan yang tradisional alat-alat yang digunakan untuk memproduksi masih bersifat tradisional, atau disebut juga alat tenun cagcag. Ketekunan dan keuletan para perajin wanita dalam berkarya/menenun menjadi modal dasar

sehingga kualitas barang yang dihasilkan menjadi baik.

Dalam pembuatan motif hias tidak semua penenun bisa mengerjakannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, saat ini ada empat perajin yang menguasai pembuatan motif hias, karena dalam tenun songket untuk membuat motif hias harus dapat menentukan jumlah lidi-lidi yang disusun secara matematis untuk menentukan jenis motif hias tersebut. Melalui hasil observasi yang telah dilakukan, Di Desa Jenengdalem ada kurang lebih 10 jenis motif hias yang dibuat oleh para perajin. Motif-motif hias tersebut antara lain: *motif hias cakra kurung*, *motif hias semangi gunung*, *motif hias mawar*, *motif hias burung merak*, *motif hias mawar jumputan*, *motif hias pucuk/kembang sepatu*, *motif hias tambalan*, *motif hias bulan*, *motif hias tirta nadi*, dan *motif hias enjekan siap/cakar ayam*.

Penempatan motif-motif hias tersebut tentu saja memiliki ciri masing-masing sesuai dengan nama motif hias tersebut. Dalam penempatan motif-motif hias pada kain tenun songket Jinengdalem memiliki keragaman komposisi, proporsi, harmoni, maupun keseimbangan sesuai cita rasa seni dari perajin. Berikut ditampilkan ragam hias tenun songket Jinengdalem yang diterapkan pada beberapa jenis kain tenun songket seperti di bawah ini.



Gb.1. Motif Cakra Kurung



Gb. 2. Motif Semangi Gunung



Gb. 3. Motif Mawar



Gb. 4. Motif Mawar Jumputan



Gb. 5. Motif Kembang Sepatu



Gb. 6. Motif Tambalan



Gb. 7. Motif Bulan



Gb. 8. Motif Tirta Nadi



b. 9. Motif Cakar Ayam



Gb. 10. Motif Burung Merak

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibahas: (1) Komposisi penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem sesuai dengan jenis ragam hias yang diterapkan pada kain tenun songket tersebut. Secara umum tidak hanya satu jenis ragam hias yang ditempatkan, namun ragam hias yang dominan menjadi ragam hias utama, walaupun ada beberapa jenis ragam hias yang menjadi pelengkap atau isian-isian untuk memenuhi bidang kain tenun songket. Komposisi penempatan motif hias: cakra kurung, semangi gunung, tirta nadi dan cakar ayam ditempatkan secara penuh dan

motif hiasnya saling bertautan pada bidang kain tenun songket. Komposisi penempatan motif hias: bunga mawar, bunga kembang sepatu, mawar jumputan, tambalan, burung merak, dan bulan penempatannya diatur dengan jarak antara motif satu dengan lainnya sehingga ada sela-sela bidang yang kosong. Secara keseluruhan semua motif hias tersebut diatur sedemikian rupa sehingga memiliki nilai estetis baik dari segi bentuk motif hiasnya maupun jenis warna yang memberi keragaman variasi warna motif kain tenun songket Jinengdalem. Selain komposisi motif utama yang

ditempatkan pada tengah-tengah bidang kain tenun songket, untuk pengaturan komposisi motif isian atau pelengkap ditempatkan pada bagian pinggiran kain tenun songket. Motif hias tersebut ada yang berbentuk geometris, ada berupa stiliran tumbuh-tumbuhan, maupun binatang. (2) Irama/ritme penataan ragam hias tenun songket Jinengdalem ditampilkan secara berulang-ulang secara teratur. Pengulangan pengaturan motif hias tergantung dari jenis motif hias yang diterapkan. Pengaturan disini dimaksudkan motif-motif yang sama disusun secara berulang-ulang tetapi tidak monoton sehingga secara keseluruhan tampak adanya irama. Irama dapat ditampilkan melalui pengaturan bentuk motif hias seperti: besar, kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan juga dalam pengaturan warna yang berbeda-beda secara berulang-ulang. (3) Keharmonisan penempatan ragam hias tenun songket Jinengdalem dapat dilihat pada penyusunan motif hias maupun penampilan warna secara keseluruhan kain tenun songket tersebut. Sesuai dengan pemakaian benang untuk kain tenun, maupun motif-motif hias tenun songket Jinengdalem, serta warna-warna yang ditampilkan secara keseluruhan dipandang dari nilai-nilai estetikanya sangat harmonis. Karena disini ada keselarasan dalam penempatan motif cukup terpadu, penyusunan warna pada beberapa motif dengan warna-warna yang komplementer dan tidak ada yang mengalami pertentangan-pertentangan. (4) Keseimbangan penempatan ragam hias pada tenun songket Jinengdalem terlihat pada keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris merupakan pengaturan yang tidak banyak mengambil resiko, karena tidak akan menimbulkan kesan berat sebelah. Secara umum penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem adalah simetris. Kesimetrisannya karena penempatan motif hiasnya sama secara berulang-ulang secara penuh pada bidang kain. Seperti pada motif hias cakra kurung, motif hias semangi gunung, motif hias bunga mawar, motif hias

mawar jumputan, motif hias tambalan, motif hias tirta nadi, motif hias enjekan siap, dan motif hias burung merak penempatan motifnya menyebar dan tidak ada yang berat sebelah. Pada motif hias bunga pucuk dan motif hias bulan keseimbangan terlihat pada hiasan pokok dan hiasan pinggirnya. Hiasan pinggiran pada bagian atas dan bawah, hiasan pinggir kanan dan kiri dibuat secara simetris, sehingga tidak ada yang berat sebelah. (5) Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap perajin, bahwa penempatan ragam hias pada kain tenun songket dilakukan sesuai dengan motif hias yang dibuat. Karena masing-masing motif hias sudah ada polanya seperti misalnya motif hias tirta nadi siapapun yang membuat motif hias tersebut polanya pasti sama sesuai pakem sebagai motif hias kain tenun songket Jinengdalem. Variasi yang dilakukan oleh perajin adalah pada pengaturan penempatan isian-isian dari motif tersebut. Variasi juga dilakukan pada penempatan objek-objeknya dan juga pada penempatan hiasan pinggirnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Komposisi penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem secara umum tidak hanya satu jenis ragam hias yang ditempatkan, namun ragam hias yang dominan menjadi ragam hias utama, dan penempatan ragam hias secara penuh pada bidang kain. (2) Irama/ritme penataan ragam hias tenun songket Jinengdalem ditampilkan secara berulang-ulang secara teratur. Pengulangan pengaturan motif hias tergantung dari jenis motif hias yang diterapkan. Pengaturan disini dimaksudkan motif-motif yang sama disusun secara berulang-ulang tetapi tidak monoton sehingga secara keseluruhan tampak adanya irama. Irama dapat ditampilkan melalui pengaturan bentuk motif hias seperti: besar, kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan juga dalam pengaturan warna yang berbeda-beda secara berulang-ulang. (3) Keharmonisan

penempatan ragam hias tenun songket Jinengdalem dapat dilihat pada penyusunan motif hias maupun penampilan warna secara keseluruhan kain tenun songket tersebut. Sesuai dengan pemakaian benang untuk kain tenun, maupun motif-motif hias tenun songket Jinengdalem, serta warna-warna yang ditampilkan secara keseluruhan dipandang dari nilai-nilai estetikanya sangat harmonis. Karena disini ada keselarasan dalam penempatan motif cukup terpadu, penyusunan warna pada beberapa motif dengan warna-warna yang komplementer dan tidak ada yang mengalami pertentangan-pertentangan. (4) Keseimbangan penempatan ragam hias pada tenun songket Jinengdalem terlihat pada keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris merupakan pengaturan yang tidak banyak mengambil resiko, karena tidak akan menimbulkan kesan berat sebelah. Secara umum penempatan ragam hias kain tenun songket Jinengdalem adalah simetris. Kesimetrisannya karena penempatan motif hiasnya sama secara berulang-ulang secara penuh pada bidang kain. (5) Penempatan ragam hias pada kain tenun songket dilakukan sesuai dengan motif hias yang dibuat. Karena masing-masing motif hias sudah ada polanya seperti misalnya motif hias tirta nadi siapapun yang membuat motif hias tersebut polanya pasti sama sesuai pakem sebagai motif hias kain tenun songket Jinengdalem. Variasi yang dilakukan oleh perajin adalah pada pengaturan penempatan isian-isian dari motif tersebut. Variasi juga dilakukan pada penempatan objek-objeknya, dan juga pada penempatan hiasan pinggirnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Budhyani. 2010. "Ragam Hias Kain Tenun Songket Bali" (Prosiding) *Seminar Nasional Mindset Revolution*. Malang: Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- Budiastra, Putu. 1984. *Ragam Hias Kain dalam Kehidupan Manusia*. Denpasar: Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Djelantik, A.A.M. 1999. *Estetika Sebuah Pengantar*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Dwi Marianto, M. 2002. *Seni Kritik Seni*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Gustami, SP. 1980. *Nukilan Seni Ornamen Indonesia*. Yogyakarta: STSRI "ASRI" Yogyakarta
- Kartiwa, Swati. 1982. *Songket Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marcia Muelder Eaton. 2010. *Persoalan-persoalan Dasar Estetika*. Terjemahan Embun Kenyowati Ekosiwi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, J. Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudji Sutrisno, FX. SJ, dan Christ Verhaak SJ. 1993. *Estetika Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nusyirwan, A. 1982. *Ragam Hias Songket Minangkabau*. Padang: Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatra Barat.
- Parmada, Ketut. 1998. *Tenun Songket Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng* (Skripsi). Singaraja: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Seraya, I Made. 1981. *Wastra Wali Koleksi Museum Bali*. Denpasar: Proyek Pengembangan Permuseuman Bali.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*, Terjm. Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- The Liang Gie. 1976. *Garis Besar Estetik*. Yogyakarta: Karya Yogyakarta.
- Yusuf Affendi. 1981. *Seni Tenun Silungkang dan Sekitarnya*. Jakarta: Proyek Media Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PENGUNAAN *ENGLISH AS MEDIUM OF INSTRUCTIONS* (EMI) DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA

Luh Putu Artini
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: lpardini_undiksha@co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (EMI) di kelas, bagaimana persepsi guru dan siswa tentang penggunaan bahasa tersebut dan konsekuensinya terhadap proses pembelajaran. Data dikumpulkan dari empat sekolah menengah atas unggulan di Bali melalui rekaman penggunaan bahasa di kelas, kuesioner persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan bahasa Inggris dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen dari guru dan siswa untuk menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran walaupun baik guru maupun siswa memiliki keterbatasan dalam hal penguasaan bahasa asing tersebut. Data persepsi menunjukkan bahwa guru secara umum kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa asing tersebut dalam proses pembelajaran. Secara konsisten siswa merasa bahasa Inggris yang digunakan oleh guru dalam mengajar kurang jelas. Sebagai konsekuensinya siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran dan pengerjaan tugas-tugas. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang perlunya peninjauan kebijakan tentang pendidikan bilingual dalam konteks pendidikan formal di Indonesia.

Kata kunci: *English as medium of instructions*, konsekuensi, persepsi siswa

Abstract

This study aims at discussing the use of English as medium of instructions (EMI) in classes, how teachers and students perceive the use of it and what the consequences are to the teaching and learning process. Data were collected from four reputable senior high schools in Bali through recording the classroom language, questionnaires to collect data on teachers' and students' perceptions about the use of English as medium of instructions, and interview. The data were analyzed descriptive qualitatively. The findings indicate commitment of both teachers and students to use as much English as they possibly can despite their limitation in English. From perception data, it can be concluded that teachers were generally lack of confidence to use the foreign language in the process of teaching and learning. Consistently, students perceive teachers' use of English was unclear. The consequence was that students found it hard to understand the lesson and to do the tasks. This research provides empirical evidence for the need to reconsider government policy on bilingual education in public schools in Indonesia.

Key words: English as medium of instructions, consequence, students' perceptions

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya reformasi di bidang pendidikan pada tahun 2002, wacana peningkatan kualitas pendidikan menjadi isu strategis di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui UUSPN 20/2003, pasal 50 ayat 3 adalah menyelenggarakan program pendidikan sekolah yang berorientasi internasional yang mana salah satu penandanya adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau *English as Medium of Instruction*, atau selanjutnya disebut **EMI**. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global (Depdiknas, 2006:4-5).

Penggunaan EMI bisa dikatakan sebagai usaha pembaharuan di bidang pembelajaran yang menargetkan pencapaian dua tujuan sekaligus (Crandall, 1998). Kedua tujuan tersebut adalah: (1) kompetensi pada konten bidang studi (*subject competence*) dan (2) kompetensi bahasa (*language competence*). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mendukung kebijakan sekolah unggulan berorientasi internasional ini. Upaya tersebut lebih menysasar guru, yang meliputi kesempatan meningkatkan kualifikasi, *in service training*, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran serta pembinaan dan pendampingan guru dalam implementasi kurikulum. Dalam kegiatan mengajar yang menggunakan EMI, sekolah memiliki strategi yang berbeda-beda. Sebuah sekolah mungkin memilih strategi pendampingan guru oleh dosen perguruan tinggi, sekolah lain mungkin memilih model *team teaching* atau pendampingan oleh tenaga ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan berorientasi internasional. Trend penggunaan EMI memang sudah mendunia (Uys, dkk., 2007) dan berbagai penelitian

tentang dampak penggunaannya sudah dilakukan, tetapi penelitian yang terfokus pada persepsi guru dan siswa serta konsekuensi penggunaan EMI di sekolah-sekolah di Bali belum banyak dilakukan orang.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) membahas penggunaan EMI di sekolah-sekolah unggulan di Bali, (2) menjelaskan bagaimana persepsi guru dan siswa tentang penggunaan bahasa asing tersebut, serta (3) mendeskripsikan apa konsekuensi penggunaan EMI terhadap proses belajar ditinjau dari persepsi siswa. Dalam konteks penelitian ini, kata persepsi didefinisikan sebagai cara pandang dan pemahaman terhadap sesuatu (orang, situasi atau kejadian) yang didasari oleh pengalaman dan pendapat pribadi (*personal opinion*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Banya & Cheng (1997). Sementara itu, 'kelas' yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelas-kelas dalam mata pelajaran Matematika dan Sains di SMA unggulan, yaitu SMA yang menjadi pelopor penyelenggara program RSBI sebelumnya. Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena semakin banyaknya sekolah dari semua jenjang, baik negeri maupun swasta yang menggunakan EMI di kelas dewasa ini.

EMI dalam Proses Pembelajaran

Bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di kelas sangatlah penting (Martin, 2003; Saeed & Jarwar, 2012). Penggunaan bahasa pengantar berhubungan langsung dengan proses dan hasil belajar karena guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki tanggung jawab mengantarkan peserta didik pada pencapaian kompetensi melalui bahasa lisan maupun tulisan yang dipakai pada saat menjelaskan, memberi instruksi dan *feedback*, mengelola kelas, serta mengevaluasi hasil belajarnya. Bahasa yang digunakan tidak saja harus benar dan sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa peserta didik, tetapi juga harus merupakan bahasa yang dipahami dengan

baik oleh siswa (Baker, 1988). Sejalan dengan ini, Artini (2011) menyatakan bahwa apabila guru menggunakan bahasa di luar jangkauan berbahasa peserta didik, bisa dipastikan akan terjadi masalah dalam pembelajaran. Siswa menjadi kurang mampu menangkap pesan atau memahami informasi yang disampaikan oleh gurunya. Lebih jauh, Coleman (2010) menegaskan bahwa penggunaan bahasa yang kurang dipahami peserta didik sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di sekolah sebenarnya merupakan penghambat bagi kemajuan belajar siswa.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bahasa Inggris sudah menjadi *lingua franca* dalam kancah pergaulan internasional. Saat ini ada sekitar 479 juta orang penutur asli bahasa Inggris, dan lebih dari 700 juta adalah orang yang bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua maupun bahasa asing (Nationmaster, 2010). Angka itu memiliki kecenderungan peningkatan yang tajam mengingat semakin banyaknya sekolah yang memasukkan bahasa Inggris dalam kurikulum mereka. Demikian pentingnya posisi bahasa Inggris sekarang ini sehingga bahasa ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti misalnya pendidikan, pekerjaan maupun sosial sebagaimana yang tercantum pada kutipan berikut ini.,

“English taking up such an important position in many educational systems around the world, it has become one of the most powerful...(Hoare & Johnson, 1997)”

Kutipan di atas menekankan bahwa Bahasa Inggris tidak hanya penting tetapi sudah menjadi bahasa yang paling ‘kuat’ (*powerful*) dan dipakai dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Akan tetapi penggunaan EMI harus mempertimbangkan kemampuan bahasa Inggris dari guru dan siswa. Berdasarkan pengamatan awal di sekolah-sekolah unggulan di Bali ditemukan bahwa baik guru maupun siswa masih dalam tahap belajar bahasa Inggris. Kemampuan

berbahasa Inggris yang rendah pada guru bisa diramalkan memiliki konsekuensi negative terhadap hasil belajar sebagaimana yang disampaikan oleh Crandall, (1998:18):

“Learners may fail to understand academic concepts through the language they are still learning because their subject content teachers are incapable of assisting them to do so”

(Pebelajar mungkin akan gagal memahami konsep akademis yang diajarkan dengan bahasa yang sedang mereka pelajari karena guru tidak akan mampu mengajarkan konten sambil membantu mereka belajar bahasa). Pendapat ini mempertegas pentingnya pemilihan bahasa pengantar yang tepat dalam mengajar.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada analisis wacana kelas (*classroom discourse analysis*), persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan EMI dan konsekuensinya terhadap proses pembelajaran. Subjek penelitian adalah 16 orang guru (terdiri dari masing-masing 4 orang guru Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia) dan 80 orang siswa (masing-masing 20 orang) dari empat SMA unggulan di Bali.

Ada tiga metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi kelas untuk mendapat data tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (melalui perekaman audio), penyebaran angket untuk mendapat data tentang persepsi guru dan siswa tentang penggunaan EMI (menggunakan kuesioner), dan wawancara untuk mendapat data persepsi siswa tentang konsekuensi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana penggunaan bahasa disimpulkan dari frekuensi

berbahasa Inggris yang dihitung dari kekerapan penggunaan ujaran-ujaran lisan bahasa Inggris yang digunakan oleh guru selama proses belajar mengajar di kelas. Persepsi guru dan siswa didapatkan melalui perhitungan prosentase respon mereka terhadap butir-butir kuesioner, sementara konsekuensi penggunaan bahasa Inggris di kelas (EMI) didapat melalui triangulasi angket persepsi siswa an wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan EMI di kelas Matematika dan Sains

Secara umum guru-guru Matematika dan Sains dari keempat SMA

yang diteliti memiliki persepsi positif tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Mereka menganggap bahwa ada manfaat ganda dari penggunaan bahasa asing tersebut bagi siswa, yaitu belajar bahasa dan sekaligus konten sebagaimana yang dikemukakan oleh Crandall (1998). Masing-masing guru menunjukkan keseriusan dalam mengampu proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebanyak yang mereka bisa. Hal ini ditunjukkan oleh frekuensi penggunaan bahasa Inggris yang berbeda. Rerata frekuensi penggunaan bahasa di keempat SMA unggulan yang diteliti bisa dirangkum sebagai berikut:

Table 01: Rerata Proporsi Penggunaan Bahasa oleh Guru Matematika dan Sains di empat SMA Unggulan dalam satu kali pertemuan

No.	Guru	Total jml ujaran	Jumlah ujaran (%) dalam bahasa Inggris	Jumlah ujaran (%) dalam bahasa Indonesia	Jumlah ujaran (%) kombinasi antara bahasa Indonesia dan Inggris
1.	Matematika	508	250 (49,2%)	228 (44,9%)	30 (5,9%)
2.	Kimia	718	237 (32,9%)	321 (44,7%)	161 (22,4%)
3.	Biologi	716	234 (33%)	387 (54%)	93 (13%)
4.	Fisika	850	616 (72,5%)	209 (24,6%)	25 (2,94%)
TOTAL		2792 (100%)	1338 (47,9%)	1145 (41%)	309 (11%)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas terlihat bahwa guru Fisika menggunakan bahasa Inggris dengan proporsi tertinggi yaitu 72,5% dan yang terendah adalah Kimia dan Biologi (33%). Terlepas dari kualitas bahasa Inggris yang dipakai oleh guru, frekuensi penggunaan yang tinggi menunjukkan upaya yang keras dari guru untuk berbahasa Inggris saat mengajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru Matematika dan Sains yang diteliti umumnya tidak merencanakan sebelumnya proporsi target penggunaan bahasa melainkan berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Guru Fisika mungkin memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai

bahasa pengantar sehingga mereka sanggup berbahasa Inggris secara dominan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Sementara itu guru Kimia dan Biologi menyatakan bahwa mereka tidak yakin bisa berbahasa Inggris dengan baik sehingga tidak mengherankan kalau mereka tidak banyak menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa, hampir sama dengan guru Biologi dan Kimia, guru Matematika tidak banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Dari empat kelas yang direkam, jumlah ujaran yang dihasilkan oleh empat guru Matematika di empat sekolah hanya 508. Jadi rata-rata seorang guru matematika berbicara 127 ujaran selama 2x45 menit. Dengan kata lain

guru lebih banyak mengalokasikan waktu bagi siswanya untuk mengerjakan tugas. Sementara itu satu orang guru Fisika menghasilkan 212,5 ujaran selama 2 jam pelajaran dimana 159,4 di antaranya dengan bahasa Inggris.

Persepsi Guru tentang Kemampuan Berbahasa Inggris

Hasil analisis kuesioner persepsi 16 guru yang diteliti menunjukkan bahwa 50% guru merasa memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang cukup dalam menggunakan EMI dan sebagian lainnya merasa tidak yakin jika mereka selalu bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar. Prosentase seperti ini juga muncul pada pernyataan yang berhubungan dengan dampak kemampuan berbahasa mereka terhadap pemahaman siswa. Hanya separuh guru merasa yakin bahwa siswa bisa memahami penjelasan mereka yang menggunakan bahasa Inggris saat mengajar.

Data tentang persepsi guru tersebut mengisyaratkan bahwa setelah melaksanakan pembelajaran dengan bahasa Inggris selama bertahun-tahun, masih banyak guru yang belum merasa yakin dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Hasil analisis data menunjukkan 75% dari guru Matematika dan Sains merasa tidak yakin bahwa siswa mereka tidak akan menemukan kesulitan dalam memahami penjelasan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, semua guru merasa tidak yakin jika mereka mampu melafalkan kata-kata bahasa Inggris dengan baik. Ini berarti guru menyadari bahwa meskipun

mereka menggunakan bahasa Inggris saat mengajar, sesungguhnya mereka belum percaya diri dengan ucapan mereka dalam berbahasa Inggris.

Di balik ketidakyakinan para guru terhadap kemampuan berbahasa Inggris, semua guru menyatakan bahwa mereka menggunakan strategi khusus untuk mengatasi keterbatasan yang mereka miliki dalam menggunakan bahasa Inggris. Pada saat tiba-tiba tidak tahu suatu kata dalam bahasa Inggris, guru menggunakan strategi yang bervariasi, misalnya: (1) mengganti kata-kata bahasa Inggris yang mereka tidak ketahui dengan bahasa Indonesia, (2) meminta tolong kepada siswanya, (3) berbicara pelan dan mengulangi apa yang dikatakan, serta (4) mencari kata yang tidak diketahui di kamus. 75% guru menyatakan bahwa mereka melakukan upaya memotivasi siswa untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya disamping memotivasi diri sendiri untuk berani menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar. Guru merasa yakin bahwa keberanian ini berdampak terhadap motivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa asing tersebut.

Persepsi Siswa tentang Bahasa Inggris sebagai bahasa Pengantar

Analisis terhadap hasil kuesioner yang dibagikan kepada 80 siswa di kelas Matematika dan Sains di empat SMA unggulan menghasilkan temuan berupa persepsi mereka tentang penggunaan bahasa Inggris sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 02: Persepsi Siswa terhadap Penggunaan EMI

NO.	Indikator	Respon siswa (%)			
		<i>Sangat senang</i>	<i>Senang</i>	<i>Biasa saja</i>	<i>Tidak senang</i>
1	Perasaan pada saat guru mengajar menggunakan EMI	<i>Sangat senang</i> (6.76 %)	<i>Senang</i> (27.40 %)	<i>Biasa saja</i> (53.42 %)	<i>Tidak senang</i> (13.67 %)
2	Kemampuan dalam mengikuti pelajaran dengan menggunakan EMI	<i>Sangat mampu</i> (6.85 %)	<i>Mampu</i> (65.75 %)	<i>Kurang mampu</i> (26.03 %)	<i>Tidak mampu</i> (1.37 %)
3	Kesan tentang penggunaan EMI oleh guru	<i>Sangat menarik</i> (10.96 %)	<i>Menarik</i> (64.36 %)	<i>Kurang menarik</i> (13.67 %)	<i>Tidak menarik</i> (10.96 %)
4	Kejelasan perkataan atau penjelasan guru ketika menggunakan EMI	<i>Sangat jelas</i> (1.37 %)	<i>Jelas</i> (24.46 %)	<i>Kurang jelas</i> (49.36 %)	<i>Tidak jelas</i> (26.03 %)
5	Kesulitan dalam memahami penjelasan guru ketika menggunakan EMI	<i>Sangat sering</i> (15.07 %)	<i>Sering</i> (24.66 %)	<i>Kadang-kadang</i> (57.53 %)	<i>Tidak pernah</i> (2.74 %)

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 03 di atas, hanya sekitar 34% dari siswa yang diteliti merasa senang dengan digunakannya EMI di kelas. Walaupun sebagian besar siswa menganggap bahwa pembelajaran dengan EMI itu menarik, tetapi 75,39% siswa mengatakan bahwa penjelasan guru kurang atau tidak jelas. Selain itu sekitar 53% siswa beranggapan bahwa penggunaan bahasa Inggris tidak ada istimewanya (biasa saja).

Konsekuensi Penggunaan EMI terhadap Proses Pembelajaran

Kuesioner persepsi siswa dan wawancara mengantarkan pada temuan tentang beberapa konsekuensi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Pertama, dari persepsi siswa bahwa pembelajaran dengan bahasa Inggris tidak ada istimewanya (biasa saja) menunjukkan bahwa siswa kurang tertantang untuk bersemangat dalam belajar di kelas. Padahal sesungguhnya semangat (*enthusiasm*) dalam belajar sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif yang berdampak terhadap peningkatan kualitas belajar. Untuk itu, menurut Brewster, dkk. (2007), guru harus

bekerja keras untuk memelihara perasaan bersemangat (*feeling of enthusiasm*) peserta didik dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan hasil belajar. Data menunjukkan bahwa di mata siswa, guru tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup memadai untuk menyelenggarakan proses belajar dan mengajar dalam bahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pena Pendidikan 2009 dalam Sultan, dkk. (2012) yang menemukan bahwa profisiensi berbahasa guru Matematika dan Sains di Indonesia sangat rendah yang dibuktikan dengan hasil TOEFL yang sangat rendah. Sundusiyah (2010) dan Kustulasari (2009) seperti yang dikutip dalam Sultan, dkk. (2012) juga menemukan bahwa sebagian terbesar guru-guru RSBI yang diteliti memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang rendah. Jadi bisa dibayangkan pengalaman belajar seperti apa yang dialami siswa apabila penggunaan EMI di kelas kurang efektif. Siswa kemungkinan mengalami kebingungan dalam memahami konten pembelajaran akibat tidak jelasnya bahasa yang digunakan oleh guru.

Dari data respon siswa terhadap pertanyaan "Apakah kamu mengalami

kesulitan dalam memahami penjelasan guru menggunakan EMI?”, 57,53% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang sulit memahami. Kata ‘kadang-kadang’ memang relatif, tetapi yang jelas siswa tidak selalu bisa memahami penjelasan guru dengan mudah.

Dari semua temuan tentang penggunaan EMI oleh guru Matematika dan Sains, ada satu poin positif dimana siswa merasa tertantang untuk lebih meningkatkan bahasa Inggrisnya. Ini bisa dilihat dari temuan bahwa 79,55% siswa merasa penggunaan bahasa Inggris di kelas berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Inggris mereka secara umum. Hal ini sudah tentu perlu penelitian lebih lanjut, pada ketrampilan berbahasa yang mana peningkatan penguasaan berbahasa Inggris tersebut paling dominan. Menurut Arkoudis (2003), guru memiliki peran utama dalam peningkatan berbahasa siswanya, yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan mendengar, berbicara, menulis dan membaca. Demikian juga perlu diteliti apakah peningkatan penguasaan bahasa Inggris terjadi akibat bahasa yang digunakan oleh guru atau karena motivasi berprestasi mereka memang tinggi sehingga

mereka berusaha belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris tersebut.

Temuan di atas menyisakan beberapa pertanyaan besar tentang penggunaan EMI di SMA unggulan. Biasanya siswa di sekolah unggulan dipilih secara ketat dengan kriteria yang jelas. Salah satu kriteria adalah kemampuan berbahasa Inggris dan prestasi belajar Matematika dan Sains. Jadi dengan demikian, sebelum memulai pendidikan di SMA unggulan, siswa sebenarnya telah memiliki ‘bekal’ yang cukup untuk mengikuti kelas yang menggunakan EMI karena telah dinilai layak untuk diterima berdasarkan nilai *background knowledge* serta bahasa Inggris yang semestinya sudah di atas rata-rata. Pada kenyataannya, siswa menghadapi masalah dalam proses pembelajaran yang menggunakan EMI. Masalah terutama diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Inggris, apalagi untuk mengajar mata pelajaran yang memang tergolong sulit dari segi konsep. Analisis terhadap kuesioner yang ditriangulasi dengan data wawancara menghasilkan data sebagai berikut.

Tabel 03. Persepsi Siswa terhadap penggunaan EMI dan konsekuensinya terhadap strategi belajar

No	Pernyataan	Masalah	Konsekuensi
1	Pilihan kata & kalimat bahasa Inggris yang digunakan oleh guru	36,7% siswa merasa pilihan kata dan kalimat guru sulit dimengerti dan 50,68% merasa biasa saja	Bahasa Inggris yang dipergunakan guru bagi sebagian besar siswa kurang bisa dimengerti sebagai akibat dari pilihan kata maupun konstruksi kalimat yang dipilih atau karena ucapan yang kurang jelas. Sebagai konsekuensinya, siswa merasa perlu untuk mereview pelajaran di kelas dengan cara membaca kembali (belajar sendiri) atau berkelompok, mengikuti les tambahan dari guru atau dari bimbingan belajar.
2	Kesulitan dalam mengerjakan soal atau tugas yang menggunakan bahasa Inggris	28,77% siswa merasa sering mengalami kesulitan mengerjakan	Kesulitan mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan di dalam kelas maupun sebagai pekerjaan rumah dialami siswa karena guru kurang mampu menjelaskan maksud dari tugas tersebut atau apa yang

		tugas dalam bahasa Inggris dan 63% merasa kadang-kadang sulit.	diharapkan oleh guru dari sebuah tugas. Walaupun kesulitan semacam ini tidak selalu terjadi, tetapi menyebabkan kebingungan siswa pada saat itu terjadi. Konsekuensinya adalah siswa bertanya kepada temannya atau mereka mengerjakan tugas sesuai dengan interpretasinya. Siswa lebih berorientasi pada penyelesaian tugas dari pada kualitas tugas.
3	Komunikasi antara guru dan siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung	42,47% siswa merasa komunikasi dengan bahasa Inggris di kelas lancar dan 38% mengatakan kurang lancar	Siswa memiliki persepsi yg berimbang tentang apakah komunikasi antara guru dan siswa lancar atau tidak. Ini bisa dipahami karena ada kemungkinan siswa memiliki definisi 'lancar' yang berbeda. Bagi sebagian siswa lancar berarti guru bisa berbicara tanpa keraguan, dengan kecepatan normal seperti saat orang berbicara dalam konteks sehari-hari. Sementara itu sebagian siswa menganggap kelancaran harus disertai dengan kejelasan makna yang disampaikan yang diimbangi dengan respon dari siswa. Jadi, lancar atau tidaknya komunikasi di kelas ditentukan oleh komunikasi antara guru dan siswa dan juga antara siswa dan guru. Konsekuensi dari kurang lancarnya komunikasi antara kedua belah pihak adalah siswa lebih memilih untuk bertanya kepada temannya dari pada bertanya pada guru. Kadang-kadang siswa harus menginterpretasikan makna atau maksud guru ketika menjelaskan maupun penugasan karena mereka enggan untuk bertanya atau meminta penjelasan kembali dari guru.
4	Kemampuan merespon instruksi guru dalam bahasa Inggris	64,38% siswa merasa mampu merespon instruksi guru dalam bahasa Inggris dan 33% merasa kurang mampu.	Sebagian besar siswa merasa mampu merespon instruksi guru dalam bahasa Inggris. Instruksi yang dimaksud adalah perintah atau suruhan dengan bahasa Inggris seperti misalnya: " <i>Who can answer question 1? Who have animal at home?</i> " Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bahasa kelas (classroom language) yang terjadi secara rutin di kelas sehingga siswa sebenarnya tidak memiliki kesulitan untuk memahami maupun merespon dengan bahasa Inggris sederhana. Banyak siswa yang menyatakan kurang mampu merespon karena ada interpretasi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan instruksi dalam bahasa Inggris. Mereka menganggap

			semua pertanyaan yang diajukan guru dan harus dijawab dalam bahasa Inggris sebagai instruksi sehingga banyak yang mengatakan kurang mampu menjawab instruksi guru dalam bahasa Inggris. Kosekuensinya adalah siswa yang merasa kurang mampu menjadi kurang aktif dalam kegiatan di kelas. Mereka berusaha agar tidak ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan.
5	Pengaruh penggunaan EMI terhadap penguasaan bhs Inggris	79,55% siswa merasa penggunaan EMI berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa Inggris dan 21% merasa kurang berpengaruh	Bagi sebagian besar siswa, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa Inggris mereka. Ketidapkahaman mereka membuat mereka mempelajari sendiri materi yang ditulis dalam dua bahasa (bilingual) sehingga secara tidak langsung mereka juga mempelajari bahasa Inggris yang digunakan. Sebagian kecil siswa menganggap bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar tidak berpengaruh pada bahasa Inggris mereka. Hal ini diakibatkan oleh monotonnya bahasa kelas yang digunakan oleh guru sehingga tidak ada hal baru yang mereka rasakan dari segi penggunaan bahasa Inggris. Konsekuensinya adalah siswa menjadi kurang bersemangat dalam proses pembelajaran.

Data di atas menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara persepsi siswa tentang penggunaan EMI dengan proses pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa siswa selalu berusaha untuk mempelajari kembali materi yang mereka dapat di kelas di rumah. Hal ini berhubungan dengan kurang jelasnya pembelajaran di kelas sebagai akibat dari kurang bagusnya bahasa Inggris guru untuk mengajar. Jadi ketidakjelasan bahasa guru dalam mengajar memiliki konsekuensi kurang aktifnya siswa di dalam kelas karena mereka lebih memilih untuk mengulangi belajar di rumah, baik dengan membaca sendiri maupun ikut bimbingan belajar ataupun les privat.

Pada saat penugasan di dalam kelas, penjelasan guru juga kadang-kadang

tidak jelas. Pada saat hal ini terjadi, siswa memilih untuk bertanya kepada teman sekelasnya dari pada bertanya kepada guru. Hal ini juga berdampak pada proses pembelajaran dimana siswa mengerjakan tugas berdasarkan interpretasi mereka terhadap *task requirement* atau tagihan yang diminta guru. Pada akhirnya siswa lebih mengutamakan penyelesaian tugas daripada belajar dari tugas. Selain itu pola interaksi yang dominan adalah interaksi guru-siswa dimana frekuensi guru berbicara kepada siswa jauh lebih tinggi daripada frekuensi siswa berbicara kepada guru. Hal ini diakibatkan oleh kendala bahasa baik dari pihak guru maupun siswa. Jadi proses pembelajaran di kelas berjalan secara klasikal dimana guru memegang peran dominan (*teacher-centered learning*)

Hasil penelitian ini berujung pada beberapa pertanyaan besar yaitu, (1) Apakah prestasi belajar siswa sekolah unggulan diakibatkan oleh kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan EMI atau memang karena motivasi siswa untuk belajar memang tinggi?, (2) Apakah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa di sekolah unggulan memang merupakan dampak langsung dari penggunaan bahasa Inggris oleh guru di kelas atau merupakan dampak tidak langsung karena siswa berusaha belajar sendiri di rumah sebagai akibat kurang jelasnya penjelasan guru?

Sesungguhnya apabila kemampuan berbahasa Inggris siswa dan guru memadai dalam proses pembelajaran, bisa diharapkan prestasi belajar dan kemampuan berbahasa Inggris siswa akan meningkat (Bostwick, 2005). Bahkan menurut Seikkula-Leino (2007), penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar tidak akan mengganggu penggunaan bahasa pertama (Bahasa Indonesia) siswa. Ini disebabkan oleh adanya fenomena *diglossia* dimana siswa secara tidak sadar membangun kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam situasi yang berbeda yaitu: menggunakan bahasa pertama (bahasa Indonesia) dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa Inggris dalam suasana akademis di sekolah. Sayangnya penelitian ini menunjukkan lemahnya bahasa Inggris guru dan siswa sehingga besar kemungkinan pencapaian tujuan yaitu peningkatan pencapaian hasil belajar konten dan bahasa Inggris sulit untuk tercapai.

Secara singkat penelitian ini memberi gambaran tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (EMI) dan konsekuensi penggunaan bahasa asing tersebut terhadap proses pembelajaran ditinjau dari persepsi siswa. Dari respon guru terhadap kuesioner persepsi bisa dirangkum beberapa hal sebagai berikut:

(1) Walaupun sebagian besar guru menyadari kekurangan kemampuan

menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas, mereka menunjukkan persepsi positif terhadap dampak penggunaan bahasa tersebut terhadap peningkatan pencapaian belajar dan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Pendapat ini dipengaruhi oleh pemahaman guru tentang tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam UUSPN 20/2003, pasal 50 ayat 3 tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Hasil review pelaksanaan RSBI yang mengikuti kurikulum pendidikan bilingual telah dianggap telah gagal (The Jakarta Post, January 09, 2013). Penelitian ini, yang dilakukan sebelum keputusan Mahkamah Instansi tentang penghapusan RSBI dilakukan, telah menunjukkan bahwa sebagian terbesar guru (75%) tidak yakin kalau siswa mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang mereka laksanakan dengan bahasa Inggris. Dengan kata lain, mereka sudah bisa meramalkan bahwa siswa kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Gambaran persepsi guru seperti ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar berangkat dari ketidakpercayaan guru tentang efektifitas pembelajaran karena mereka merasa kurang percaya diri dengan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Hal ini bisa dipahami karena dari riwayat pendidikan para guru Matematika dan Sains, mereka tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam bahasa asing tersebut.

(2) Frekuensi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar bervariasi tergantung dari jenis mata pelajaran dan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Dalam mata pelajaran Matematika misalnya, proporsi kelihatan berimbang antara penggunaan bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun demikian, pada mata pelajaran Fisika, bahasa Inggris digunakan dengan frekuensi yang jauh lebih

tinggi dari penggunaan bahasa Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap guru berusaha menggunakan bahasa Inggris semampunya tanpa mempertimbangkan latar belakang teori pembelajaran bilingual yang sesuai dengan tujuan atau target pembelajaran. Padahal penggunaan bahasa pengantar yang tidak jelas dapat berakibat fatal terhadap hasil belajar siswa (lihat Crandall 1998:18 di atas).

(3) Berdasarkan analisis data persepsi siswa ditemukan bahwa efektifitas penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematika dan Sains di SMA unggulan di Bali bisa dikategorikan kurang efektif. Temuan ini disimpulkan dari persepsi siswa tentang kejelasan bahasa Inggris yang digunakan guru untuk mengajar yang dinilai masih kurang yang berpotensi menyebabkan kebingungan bagi siswa dalam pemahaman materi. Selain itu siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang dirancang oleh guru karena instruksi yang diberikan kurang jelas. Guru memiliki keterbatasan kemampuan mengungkapkan makna dalam bahasa Inggris yang efektif karena terbatasnya kata-kata bahasa Inggris mereka dan kurangnya kemampuan mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan tepat. Oleh sebab itu, siswa merasa berkewajiban untuk berusaha sendiri untuk memahami apa yang dimaksud oleh guru dengan cara mempelajari kembali di rumah materi yang mereka dapat di kelas.

SIMPULAN

Penelitian bertujuan membahas bagaimana penggunaan EMI di kelas,, menjelaskan bagaimana persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan EMI tersebut dan mendeskripsikan apa konsekuensi penggunaan EMI terhadap proses pembelajaran ditinjau dari persepsi siswa. Simpulan yang bisa ditarik berdasarkan tujuan tersebut adalah: (1). EMI digunakan sebanyak/sesering mungkin oleh guru dalam pembelajaran. Antara guru satu dan lainnya memiliki frekuensi penggunaan yang

berbeda tergantung dari kemampuan berbahasa Inggris masing-masing guru. (2). ada 'konsistensi' antara persepsi guru dan siswa dalam hal penggunaan EMI dalam mata pelajaran Matematika dan Sains di empat sekolah unggulan di Bali. Pada saat guru menyatakan bahwa mereka kurang percaya diri dalam berbahasa Inggris, siswa juga merasa bahwa bahasa Inggris guru mereka kurang jelas atau tidak mudah dimengerti. Di satu pihak semua guru percaya akan dampak positif dari penggunaan bahasa Inggris tersebut tetapi di pihak lain hanya sebagian guru yang memiliki keyakinan dan rasa percaya diri bahwa mereka mampu mengajar dengan penggunaan EMI. Rendahnya kemampuan berbahasa guru menyebabkan kebingungan pada siswa karena ketidakjelasan bahasa pengantar, baik dari segi penggunaan kata maupun pengucapannya. Hal ini tentu harus mendapat perhatian yang serius karena sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya kualitas bahasa pengantar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Martin, 2003; Saeed & Jarwar, 2012). (3) Ada keterkaitan antara persepsi siswa dengan konsekuensi penggunaan EMI. Menurut siswa, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Inggris memiliki konsekuensi terhadap proses pembelajaran di kelas. Siswa menjadi kurang aktif, kurang bersemangat dan memilih untuk bertanya kepada teman dibandingkan bertanya kepada guru. Selain itu siswa memilih untuk mengulang pelajaran di rumah untuk memastikan mereka mengerti dengan materi yang diajarkan di kelas. Pemilihan bahasa kelas oleh guru juga cenderung monoton sehingga sebagai konsekuensinya, siswa merasa bosan dan kurang termotivasi. Demikian juga kurang jelasnya tugas-tugas yang diberikan menyebabkan siswa mengutamakan penyelesaian tugas dari pada kualitas tugas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian

tersebut di atas bisa disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Untuk bisa memberi sebuah nilai plus terhadap kualitas output sekolah, penggunaan EMI bisa dikatakan sebagai sebuah alternatif tetapi perlu dimulai dengan penyiapan kondisi berupa kemampuan berbahasa Inggris yang baik dari guru dan siswa. (2) Dengan dihapuskannya RSBI sekarang ini, KTSP masih menyediakan ruang bagi sekolah untuk menyelenggarakan kelas khusus yang menggunakan EMI tetapi harus dengan pertimbangan cerdas. Sekolah harus memiliki pemahaman model kelas bilingual yang sesuai dengan konteks sekolah dan menyesuaikan implementasi model tersebut dengan kondisi dan potensi riil sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoudis, S. 2003. Teaching English as a second language in Science classes: Incommensurate epistemologies? *Language and Education*, 17 (hal: 161-174).
- Artini, L.P. (2011). Persepsi Guru dan Siswa terhadap Penggunaan Bahasa Inggris di Kelas Bilingual di Sekolah Menengah Atas Berstatus RSBI di Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 17 No.4, Februari 2011 (hal. 307-312).
- Baker, C. 1988. *Key Issue in Bilingualism and Bilingual education*, England: Multilingual Matters, Ltd.
- Banya, K. and Cheng, M.A. 1997. *Beliefs about Foreign Language Learning: A Study of Beliefs of Teachers and Students' Crosscultural setting*. (Paper presented at annual meeting of the teachers of English to speakers other languages, Orlando, March 11-15, 1997).
- Best, W.J. 1993. Research in Education, New Jersey, USA. Brewster, J., G. Ellis dan D. Girard. (2007). *The Primary English Teacher Guide*. Harlow: Pearson Education Ltd.
- Bostwick, M. 2005. 'What is immersion?', in J Cohen, K.T. McAllister, K. Rolstad & J. MacSwan (eds), ISB4: *Proceedings of the International Symposium on Bilingualism*, Cascadilla Press, Somerville MA, USA, pp. 1-4.
- Coleman, H. 2010. Teaching Learning in Pakistan: The Role of Language in Education. retrieved on 11 Februari 2012.
- Crandall, J. 1998. Collaborate and cooperate: Educator education for integrating language and content instruction. *Forum*, 36:2.
- Depdiknas. 2007. *Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Depdiknas. 2006. *Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Dewaele, J.M., Alex Housen & Li Wei. 2003. (eds) *Bilingualism: Beyond Basic Principles*. Sydney: Multilingual Matters Ltd.
- Kompas.com 2 Juni, 2010. *Penelitian RSBI: Bahasa Inggris bisa hambat 'Kemajuan'* (<http://www.klubguru.com>)
- Martin, P. (2003). Bilingual Encounters in the Classroom. In Dewaele, J.M., Alex Housen & Li Wei (eds) *Bilingualism: Beyond Basic Principles*. Sydney: Multilingual Matters Ltd.
- Saeed, A. and Jarwar, A.Q. 2012. Impact of Medium of Instruction on Achievement level of students at Higher Secondary Stage in Hyderabad Region of Sindh. In *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 4(4). August, 2012.
- Sultan, S., H. Borland, dan B. Eckersley. (2012). *English Medium Instruction*

- (EMI) in Indonesian Public Junior High Secondary School: Student's language use, attitudes/ motivation and foreign language outcomes. In tesol.org.au/files/224_Sultan
- Seikkula-Leino, J 2007, 'CLIL learning: Achievement levels and affective factors', *Language and Education*, vol. 21, no. 4.
- Tomlinson, B. (1990). 'Managing change in Indonesian high schools. *English Teaching Journal*. 44(1), 25-37.
- UNESCO. (2001). *The Reform of Secondary Education in Indonesia during the 1990s: Improving Relevance and Quality through Curriculum Decentralisation*. [On-line].
- (2009). *Kualitas Bahasa Inggris Guru Sekolah Internasional Rendah*. Harian Suara Merdeka On-line, 26 Juni 2009. <http://www.suaramerdeka.com>
- The Jakarta Post. January 09, 2013. *Constitutional Court Brings End to Era of RSBI Schools*. Available on <http://www.thejakartaglobe.com/education/> Retrieved on February 17, 2013.
- Uys, M., J. van der Walt, R. van der Berg, and S.Botha. (2007). English as Medium of Instruction: a situation analysis. *South African Journal of Education*. Vol.27 (1) pp. 69-82.

PERBAIKAN KONDISI KERJA BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG RELEVAN DENGAN KONSEP ERGONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS PEMATUNG

I Made Sutajaya, Ni Putu Ristiati
Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Tujuan utama penelitian adalah mengetahui perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas pematung. Penelitian quasi eksperimental ini menggunakan rancangan sama subject (treatment by subject design) yang melibatkan 30 pematung sebagai sampel yang dipilih secara acak dengan multistage random sampling. Subjek diberi perlakuan berupa perbaikan kondisi kerja. Hasilnya dianalisis dengan uji t paired dan menunjukkan bahwa kualitas kesehatan pematung meningkat dilihat dari penurunan beban kerja, kelelahan, dan keluhan muskuloskeletal secara bermakna ($p < 0,05$). Seirama dengan peningkatan kualitas kesehatan juga terjadi peningkatan produktivitas secara bermakna ($p < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi beban kerja sebesar 8,72%., keluhan muskuloskeletal sebesar 12,23%., kelelahan sebesar 22,11%, dan meningkatkan produktivitas sebesar 14,85%.

Kata kunci: Ergonomi, Kesehatan, Kearifan Lokal, dan Produktivitas.

Abstract

The main purpose of the study was to determine improvements in working conditions based on local wisdom that is relevant to the concept of ergonomics improve health care quality and productivity of wood carvers. This quasi experimental study treatment by subject design and involving 30 samples as a randomly selected sample by multistage random sampling. Subjects were treated in the form of improvements in working conditions. The results were analyzed by paired t test showed that the quality of wood carvers health improved views of the decrease in workload, fatigue, and musculoskeletal complaints were significantly ($p < 0.05$). Rhythm with improved quality of health also increase productivity significantly ($p < 0.05$). It can be concluded improvements in working conditions based on local wisdom that is relevant to the concept of ergonomics can reduce the workload about 8.72%, musculoskeletal complaints about 12.23%, fatigue about 22.11%, and increase productivity about 14.85%.

Keywords: Ergonomics, Health, Local Wisdom, and Productivity.

PENDAHULUAN

Di dalam mendesain stasiun dan proses kerja, sampai saat ini belum mengacu kepada data antropometri pekerja yang ada di areal tempat mereka beraktivitas. Umumnya yang digunakan sebagai acuan adalah data sekunder yang ada pada litetatur atau sumber bacaan yang relevan yang umumnya masih menggunakan ukuran orang barat. Untuk

mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan eksplorasi data dasar yang akan digunakan sebagai acuan di dalam membuat desain stasiun kerja yang ergonomis. Di samping itu melalui pendekatan sistemik, holistik, interdisipliner dan partisipatori (SHIP) akan terwujud desain stasiun dan proses kerja yang secara teknis sesuai dengan pekerjaanya dan secara fisiologis tidak menimbulkan keluhan muskuloskeletal, tidak

mengakibatkan beban kerja yang terlalu berat dan dapat memperlambat munculnya kelelahan (Manuaba, 2006; Azadeh *et al.*, 2007; Ercan *et al.*, 2006).

Antropometri merupakan ukuran dan proporsi tubuh manusia yang mempunyai manfaat praktis untuk menentukan ukuran tempat duduk, meja kerja, jangkauan, genggam, ruang gerak dan batas-batas gerakan sendi (Grandjean, 2007). Jika dikaji mengenai hubungan antara alat, manusia dan pekerjaannya masing-masing, maka data antropometri akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh kesesuaian antara ukuran diri mereka dengan alat-alat yang digunakan. Saat ini masih belum banyak dimanfaatkan ukuran-ukuran antropometri di dalam mendesain alat-alat kerja dan tempat kerja, padahal sesungguhnya antropometri ini sudah dimanfaatkan oleh orang Bali pada saat membangun rumah dan membuat peralatan kerja yaitu dengan menggunakan asta kosala-kosali dan asta bumi yang pada prinsipnya hampir sama dengan konsep antropometri. Di samping itu konsep yang tertuang pada Tri Hita Karana, konsep pemali, dan Ayurveda Ilmu Kedokteran Hindu juga digunakan sebagai acuan di dalam memperbaiki stasiun dan proses kerja di industri kecil yang dikaitkan dengan parameter kualitas kesehatan dan produktivitas. Ini merupakan kearifan lokal yang dapat diterapkan di masyarakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip ergonomi.

Penerapan ergonomi yang mengupayakan agar pekerja selalu dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman dalam proses kerja merupakan suatu yang urgen untuk dilaksanakan dan sesegera mungkin harus diimplementasikan (Manuaba, 2006; Azadeh *et al.*, 2007; Ercan *et al.*, 2006). Jika hal ini diabaikan, maka kualitas kesehatan pekerja diyakini akan terganggu bahkan bisa menimbulkan deformitas pada organ tubuhnya dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Salah satu cara yang bisa ditempuh agar para pekerja

yang berkecimpung di dalam kegiatan yang ada di industri kecil tetap dalam kondisi yang sehat, aman, nyaman, efektif dan efisien serta produktivitasnya tinggi maka diperlukan kaidah-kaidah ergonomi yang berbasis kearifan lokal di dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di tempat kerja. Sebab seandainya hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan, kelainan dan penyakit yang terkait dengan sistem otot dan rangka, misalnya; (1) terganggunya mekanika tubuh manusia secara umum, (2) bisa terjadi luka atau cedera pada persendian, (3) epimisius dan perimisius otot bisa sobek, (4) rasa sakit pada vertebrae (tulang belakang) dan (5) terjadi deformitas atau degenerasi pada diskus intervertebralis (cakram atau piringan pada persendian tulang belakang) (Grandjean, 2007). Dengan demikian kualitas kesehatan pekerja akan terancam yang pada akhirnya produktivitas kerja akan menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dibuat rumusan masalah: (1) Apakah perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi beban kerja pematung?; (2) Apakah perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal pematung?; (3) Apakah perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi kelelahan pematung?; dan (4) Apakah perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat meningkatkan produktivitas pematung?

METODE

Populasi penelitian adalah pematung di Desa Peliatan yang berjumlah 107 orang. Dari jumlah tersebut dipilih secara acak 30 orang sebagai sampel dengan teknik multistage random sampling. Penelitian quasi eksperimental ini

menggunakan rancangan sama subjek (treatment by subjek design).

Variabel bebasnya adalah perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi, dan variabel tergangungnya adalah kualitas kesehatan yang dinilai dari beban kerja, keluhan muskuloskeletal, dan kelelahan serta produktivitas kerja. Instrumen penelitian adalah *Nordic Body Map Questionnaire* untuk mendata keluhan muskuloskeletal, *30 items of rating scale questionnaire* untuk mendata kelelahan dan *stop watch* untuk mendata beban kerja. Di samping itu juga digunakan instrumen antropometer untuk mendata antropometri pematung dan instrumen lingkungan seperti *sound level meter* untuk mendata kebisingan alat kerja, luxmeter untuk mendata intensitas pencahayaan, *sling thermometer* dengan skala Celsius untuk mendata suhu lingkungan, *psychrometric chart* digunakan untuk menentukan kelembaban relatif di tempat kerja,

termometer ruangan merek MC dengan skala Celsius untuk mengukur suhu basah dan suhu kering di ruang kerja, dan *anemometer* untuk mengukur kecepatan angin di ruang kerja.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mencari rerata dan simpang bakunya. Khusus data utama berupa kualitas kesehatan dan produktivitas diuji beda dengan uji *t paired* pada taraf signifikansi 5%, karena datanya berdistribusi normal.

HASIL

Kualitas kesehatan pematung dinilai dari beban kerjanya, keluhan muskuloskeletal yang dirasakan sebelum dan sesudah kerja, dan kelelahan. Sedangkan produktivitas dihitung dari produk yang dihasilkan (*output*) dibagi dengan beban kerja (*input*) dikalikan waktu kerja (*time*). Hasil analisis data dapat dilihat pada Tabel 01.

Tabel 01. Hasil Analisis Data Kualitas Kesehatan dan Produktivitas Pematung

Variabel	Periode I		Periode II		Nilai p	Perubahan
	Rerata	SB	Rerata	SB		
Denyut Nadi Istirahat	80,667	6,251	80,933	5,933	0,083	-
Denyut Nadi Kerja	100,596	3,940	91,821	3,925	0,0001	8,72%
Keluhan Muskuloskeletal Sebelum Kerja	29,722	1,135	29,800	0,965	0,532	-
Keluhan Muskuloskeletal Sesudah Kerja	47,966	2,335	42,100	1,888	0,0001	12,23%
Kelelahan Sebelum Kerja	31,112	0,877	31,300	0,645	0,302	-
Kelelahan Sesudah Kerja	58,978	2,219	45,944	1,556	0,0001	22,11%
Produktivitas	98,172	25,215	112,752	25,955	0,000	14,85%

PEMBAHASAN

Denyut nadi istirahat antara periode I dan periode II tidak berbeda bermakna ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa kondisi subjek sebelum bekerja dilihat dari indikator beban

kerja adalah sama. Itu berarti peningkatan beban kerja selama beraktivitas memang betul-betul dipengaruhi oleh faktor kerja, bukan karena pengaruh faktor-faktor lain. Hal yang sama juga terjadi pada keluhan

muskuloskeletal sebelum kerja antara periode I dan periode II tidak berbeda bermakna ($p > 0,05$). Itu berarti keluhan otot rangka pada pematung, sebelum mereka bekerja adalah sama dan munculnya keluhan muskuloskeletal setelah bekerja memang disebabkan oleh faktor kerja, bukan faktor lain. Kelelahan sebelum kerja antara periode I dan periode II juga tidak berbeda bermakna ($p > 0,05$). Itu menunjukkan bahwa kondisi pematung sebelum bekerja adalah sama dan munculnya kelelahan setelah bekerja memang sepenuhnya disebabkan oleh faktor kerja, bukan faktor yang lain. Kearifan lokal yang relevan dengan variabel ini adalah nadi pariksha yang digunakan oleh para leluhur orang Bali untuk menentukan frekuensi denyut nadi. Di dalam Ayurveda yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang Bali sebagai acuan, dinyatakan bahwa pembuluh *dhamani* berfungsi untuk menyalurkan unsur *tri dosha* yaitu sari makanan, cairan limfa, cairan empedu, dan rangsangan saraf. Itu berarti untuk menentukan beban kerja berdasarkan kearifan lokal yang dianut oleh orang Bali dapat dimanfaatkan *dhamani* tersebut yang sama dengan nadi (arteri) (Nala, 2007).

Beban Kerja Pematung

Temuan pada tahun I mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi kerja yang dilakukan di industri kerajinan patung di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi beban kerja pematung. Dikatakan demikian karena ternyata setelah bekerja pematung mengalami peningkatan beban kerja sebesar 37,5% ($p < 0,05$) (Sutajaya & Ristiati, 2011). Persentase peningkatan beban kerja yang relatif besar tersebut mengindikasikan bahwa penerapan istirahat aktif dan perbaikan sikap kerja sangat perlu untuk diimplementasikan sebagai upaya untuk menurunkan beban kerja secara bermakna. Itu terbukti dari

hasil perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi yang diterapkan pada tahun II, ternyata mampu mengurangi beban kerja secara bermakna sebesar 8,72% ($p < 0,05$) antara periode I dan periode II.

Temuan ini setara dengan temuan peneliti lain yaitu: (a) Arimbawa (2009) melaporkan bahwa redesain peralatan kerja secara ergonomis dapat mengurangi beban kerja para pembuat minyak kelapa di Kecamatan Dawan Klungkung sebesar 14,69%; (b) Artayasa (2007) melaporkan bahwa pendekatan ergonomi total pada proses angkat angkut kelapa dapat mengurangi beban kerja sebesar 10,61%; (c) Purnomo (2007) melaporkan bahwa sistem kerja dengan pendekatan ergonomi total dapat mengurangi beban kerja pekerja di industri gerabah Kasongan Bantul sebesar 21,69%; (d) Sajiyo (2008) melaporkan bahwa beban kerja tukang gulung sigaret kretek tangan di Kediri Jawa Timur menurun sebesar 20,81% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain tempat dan sistem kerja dengan intervensi ergonomi; (e) Josephus (2011) melaporkan bahwa beban kerja nelayan di Amurang Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menurun sebesar 53,56% setelah dilakukan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin; (f) Widana, dkk (2012) melaporkan bahwa beban kerja petani sayur menurun sebesar 18,67% setelah dilakukan implementasi ergonomi pada pengolahan tanah pertanian di Tabanan Bali.

Keluhan Muskuloskeletal Pematung

Temuan pada tahun I mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi kerja di industri kerajinan patung di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sebagai upaya untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal perajin sangat diperlukan, karena ternyata setelah bekerja pematung mengalami peningkatan keluhan muskuloskeletal sebesar 50,8% ($p < 0,05$) (Sutajaya & Ristiati, 2011). Persentase

peningkatan keluhan muskuloskeletal yang relatif besar pada pematung tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kerja mereka belum ergonomis, sehingga diperlukan perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi sebagai salah satu implementasi ergonomi yang diterapkan pada tahun II.

Intervensi tersebut ternyata dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal pematung secara bermakna sebesar 12,23% ($p < 0,05$) antara periode I dan periode II. Temuan ini setara dengan temuan peneliti lain seperti: (a) Purnomo (2007) melaporkan bahwa pekerja di industri kecil pembuat gerabah di Kasongan Bantul mengalami penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 87,80% ($p < 0,05$) setelah diterapkan sistem kerja dengan pendekatan ergonomi total; (b) Artayasa (2007) melaporkan bahwa pekerja wanita pengangkut kelapa di Semaja Antosari Tabanan mengalami penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 10,61% setelah diterapkan pendekatan ergonomi total; (c) Sajiyo (2008) melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal tukang gulung sigaret kretek tangan di Kediri Jawa Timur menurun sebesar 66,94% dilihat dari gerak kepala, 61,52% dilihat dari gerak bahu, dan 81,75% dilihat dari gerak anggota gerak atas ($p < 0,05$), setelah dilakukan redesain tempat dan sistem kerja dengan intervensi ergonomi; (d) Arimbawa (2009) juga melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal pembuat minyak kelapa di Dawan Klungkung menurun sebesar 26,17% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain peralatan kerja secara ergonomis; (e) Surata (2011) melaporkan bahwa petani budidaya rumput laut di Desa Ped Nusa Penida mengalami penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 56,15% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain alat pengering rumput laut dan sistem kerjanya; (f) Josephus (2011) melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal nelayan di Amurang Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menurun sebesar 53,55%

setelah dilakukan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukat cincin; (g) Suardana (2012) melaporkan bahwa ergo-arsitektur dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal pekerja sebesar 2,22% pada penggunaan gedung yang ergonomik; (h) Widana, dkk (2012) melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal petani sayur menurun sebesar 14,27% setelah dilakukan implementasi ergonomi pada pengolahan tanah pertanian di Tabanan Bali; dan (i) Sudarma (2012) melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal penyelaras gamelan Bali menurun sebesar 21,87% setelah diterapkan desain piranti lunak GAENet dan redesain stasiun kerja yang ergonomis.

Kearifan lokal yang relevan dengan temuan tersebut adalah *chikitsa* (terapi), karena melalui perbaikan kondisi kerja dapat dilakukan *chikitsa* dalam mengatasi gangguan tubuh dari luar yang dapat meningkatkan tri dosha yang akhirnya menjadi *dusya* yang menimbulkan gangguan pada jaringan tubuh (*dhatu*), khususnya pada jaringan otot (muskuloskeletal) (Nala, 2007).

Kelelahan Pematung

Temuan pada tahun I mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi kerja yang dilakukan di industri kerajinan patung di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kelelahan perajin. Dapat dikatakan demikian, karena ternyata setelah mereka bekerja mengalami peningkatan kelelahan sebesar 31,5% ($p < 0,05$) (Sutajaya & Ristiati, 2011). Persentase peningkatan kelelahan yang relatif besar tersebut semakin meyakinkan bahwa penerapan istirahat aktif dan perbaikan sikap kerja mutlak diperlukan untuk menurunkan kelelahan secara bermakna. Ini terbukti dari temuan pada tahun II yang menerapkan perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi, ternyata

dapat mengurangi kelelahan secara bermakna sebesar 22,11% ($p < 0,05$) antara periode I dan periode II.

Temuan tersebut setara dengan laporan peneliti lain, seperti: (a) Purnomo (2007) melaporkan bahwa pekerja di industri kecil pembuat gerabah di Kasongan Bantul mengalami penurunan kelelahan sebesar 77,50% ($p < 0,05$) setelah diterapkan sistem kerja dengan pendekatan ergonomi total; (b) Artayasa (2007) melaporkan bahwa pekerja wanita pengangkut kelapa di Semaja Antosari Tabanan mengalami penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 53,97% setelah diterapkan pendekatan ergonomi total; (c) Arimbawa (2009) juga melaporkan bahwa keluhan muskuloskeletal pembuat minyak kelapa di Dawan Klungkung menurun sebesar 25,83% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain peralatan kerja secara ergonomis; (d) Surata (2011) melaporkan bahwa petani budidaya rumput laut di Desa Ped Nusa Penida mengalami penurunan kelelahan sebesar 50,84% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain alat pengering rumput laut dan sistem kerjanya; dan (e) Josephus (2011) melaporkan bahwa kelelahan nelayan di Amurang Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menurun sebesar 16,15% dilihat dari kategori kelelahan umum, 19,96% dilihat dari kategori kelelahan aktivitas, 11,70% dilihat dari kelelahan motivasi, dan 14,53% dilihat dari kelelahan fisik, setelah dilakukan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukut cincin; (f) Widana, dkk (2012) melaporkan bahwa kelelahan petani sayur menurun sebesar 13,06% setelah dilakukan implementasi ergonomi pada pengolahan tanah pertanian di Tabanan Bali; dan (g) Sudarma (2012) melaporkan bahwa kelelahan penyelaras gamelan Bali menurun sebesar 28,57% setelah diterapkan desain piranti lunak GAENet dan redesain stasiun kerja yang ergonomis. Penanggulangan kelelahan dapat dilakukan dengan *yukti vyapasraya*, untuk mengatasi kelelahan yang

diakibatkan oleh faktor suhu, kebisingan, benturan, dan vibrasi (Nala, 2007).

Produktivitas Pematung

Temuan pada tahun I mengindikasikan bahwa perbaikan yang mengacu kepada kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dinilai dari indikator beban kerja, keluhan muskuloskeletal, dan kelelahan sangat diperlukan. Jika ini bisa dilakukan berarti secara otomatis produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan, karena pematung akan lebih segar dan lebih bugar saat bekerja di tempat kerja yang nyaman dengan motivasi dan spirit kerja yang tinggi. Diyakini demikian karena melalui perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi yang diterapkan pada tahun kedua ternyata dapat mengurangi beban kerja pematung sebesar 8,72%, keluhan muskuloskeletal menurun sebesar 12,23% yang diiringi dengan penurunan kelelahan sebesar 22,11%.

Temuan pada tahun II menunjukkan bahwa produktivitas pematung meningkat secara bermakna sebesar 14,85% ($p < 0,05$) antara periode I dan periode II. Itu bisa terjadi karena kualitas kesehatan pematung dapat ditingkatkan setelah diterapkan perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi. Hal serupa juga dilaporkan oleh beberapa peneliti yaitu: (a) Arimbawa (2009) melaporkan bahwa redesain peralatan kerja secara ergonomis dapat meningkatkan produktivitas kerja para pembuat minyak kelapa di Kecamatan Dawan Klungkung sebesar 35,71%; (b) Adiatmika (2007) melaporkan bahwa perbaikan kondisi kerja dengan pendekatan ergonomi total dapat meningkatkan produktivitas perajin pengecatan logam di Kediri Tabanan sebesar 61,66%; (c) Artayasa (2007) melaporkan bahwa pendekatan ergonomi total pada proses angkat angkut kelapa

dapat meningkatkan produktivitas sebesar 48,84%; (d) Purnomo (2007) melaporkan bahwa sistem kerja dengan pendekatan ergonomi total dapat meningkatkan produktivitas pekerja di industri gerabah Kasongan Bantul sebesar 59,49%; (e) Surata (2011) melaporkan bahwa produktivitas petani budidaya rumput laut di Desa Ped Nusa Penida meningkat sebesar 37,93% ($p < 0,05$) setelah dilakukan redesain alat pengering rumput laut dan sistem kerjanya; (f) Josephus (2011) melaporkan bahwa produktivitas nelayan di Amurang Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar 3,53% setelah dilakukan intervensi ergonomi pada proses penangkapan ikan dengan pukuk cincin; dan (g) Sudarma (2012) melaporkan bahwa produktivitas penyelaras gamelan Bali meningkat sebesar 29,63% setelah diterapkan desain piranti lunak GAENet dan redesain stasiun kerja yang ergonomis.

SIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dan dikaji di atas dapat dibuat simpulan sebagai berikut: (1) Perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi beban kerja pematung sebesar 8,72%; (2) Perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal pematung sebesar 12,23%; (3) Perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat mengurangi kelelahan pematung sebesar 22,11%; (4) Perbaikan kondisi kerja berbasis kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi dapat meningkatkan produktivitas pematung sebesar 14,85%.

Saran yang tampaknya penting untuk disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Agar para pekerja di industri kecil mencermati kondisi kerjanya ditinjau dari pendekatan ergonomis yang dipadukan dengan kearifan

lokal yang relevan; (2) Penerapan kearifan lokal yang relevan dengan konsep ergonomi hendaknya dimaksimalkan agar dicapai hasil yang memuaskan terkait dengan upaya perbaikan kondisi kerja; (3) Penerapan konsep ergonomi berbasis kearifan lokal sudah seharusnya dilakukan sejak dini, agar dicapai kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, efektif, dan efisien serta tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatmika, I P.G. 2007. Perbaikan Kondisi Kerja dengan Pendekatan Ergonomi Total Menurunkan Keluhan Muskuloskeletal dan Kelelahan serta Meningkatkan Produktivitas Perajin Pengecatan Logam di Kediri Tabanan. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Arimbawa, I M.G. 2009. Redesain Peralatan Kerja secara Ergonomis Meningkatkan Kinerja Pembuat Minyak Kelapa Tradisional di Kecamatan Dawan Klungkung. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Artayasa, N. 2006. Total Ergonomis Application of Women Coconut Handler. *Proceeding Ergo Future, International Symposium on Past, Present and Future Ergonomis, Occupational Safety and Health*. Ed. Adiatmika & Dewa Alit Putra. Denpasar: Department of Physiology, Udayana University.
- Artayasa, N. 2007. Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kualitas Hidup Pekerja Wanita Pengangkut Kelapa di Banjar Semaja Desa Antosari Tabanan Bali. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Azadeh, A., Fam, M., Garakani, M.M. 2007. A Total Ergonomis Design Approach

- to Enhance the Productivity in A Complicated Control System. *Journal of Information Technology*. 6(7), 1036 – 1042.
- Ercan, S., & Erdinc, O. 2006. Challenges of Leadership in Industrial Ergonomis Projects. *Journal Istanbul Ticaret Universitesi Fen Bilimleri Dergisi*. 5(9), 119 – 127.
- Grandjean, E. 2007. Fitting the task to the Man. A Textbook of Occupational Ergonomis. 4th Edition. London: Taylor & Francis.
- Josephus, J. 2011. Intervensi Ergonomi pada Proses Penangkapan Ikan dengan Pukat Cincin Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Nelayan di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Manuaba, A. 2006. Aplikasi Ergonomi dengan Pendekatan Holistik Perlu, Demi Hasil yang Lebih Lestari dan Mampu Bersaing. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 01(03), 235-249.
- Nala, N. 2007. *Ayurveda Ilmu Kedokteran Hindu*. Denpasar: Upada Sastra.
- Purnomo, H. 2007. Sistem Kerja dengan Pendekatan Ergonomi Total Mengurangi Keluhan Muskuloskeletal, Kelelahan, dan Beban Kerja serta Meningkatkan Produktivitas Pekerja Industri Gerabah di Kasongan Bantul. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Sajiyo, 2008. Redesain Tempat dan Sistem Kerja dengan Intervensi Ergonomi Meningkatkan Kinerja Tukang Giling Sigaret Kretek Tangan pada Industri Rokok "X" di Kediri Jawa Timur. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Suardana, I P.G.E. 2012. Pendekatan Ergonomi dalam Perancangan Arsitektur (Ergo-Arsitektur) Meningkatkan Kenyamanan dan Kinerja Pengguna. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Sudarma, M. 2012. Desain Piranti Lunak GAENet dan Redesain Stasiun Kerja yang Ergonomis Meningkatkan Kinerja Penyelaras Gamelan Bali. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Surata, I W. 2011. Redesain Alat Pengereng dan Sistem Kerja Meningkatkan Kinerja Petani dan Mutu Rumput Laut di Desa Ped Nusa Penida. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Sutajaya, I M. & Ristiati, N.P. 2011. Perbaikan Kondisi Kerja Berbasis Kearifan Lokal yang Relevan dengan Konsep Ergonomi untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Produktivitas Pematung di Desa Peliatan Ubud Gianyar. *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian UNDIKSHA. Bali.
- Widana, K. Adiputra, N. Sutjana, I D.P. dan Sutajaya, I M. 2012. Redesign Tractor for Soil Treatment Decreases Productions Cost and Increase Productivity, Health of Workers in Agricultural Industry. *Proceeding of the Second International Conference of Southeast Asian Network of Ergonomics Societies*. Ed. Halimahtun M. Khalid, Alvin W. Yeo. Martin G. Helander. and Tek Yong Lim. Publisher Damai Sciences ISBN 978-983-41742.

MEMBACA TUBUH GUSTI AYU KADEK MURNIASIH: REPRESENTASI SEKS, KEKERASAN, DAN KUASA LAKI-LAKI

Hardiman¹, Luh Suartini²
^{1,2} Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: hardiman_art@yahoo.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan bentuk dan fungsi *subject matter* tubuh Gusti Ayu Kadek Murniasih dalam karya lukisannya; untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan pula makna representasi seks, kekerasan, dan kuasa laki-laki dalam lukisan karya Gusti Ayu Kadek Murniasih. Penelitian kualitatif dengan pendekatan *cultural studies* ini, sebagaimana yang diringkus oleh teori-teori kritis, terutama diharapkan menghasilkan pembacaan konteks dengan tetap tidak mengabaikan pembacaan teks (visual). Penelitian ini memperoleh hasil: (1) Bentuk dan fungsi lukisan I Gusti Ayu Kadek Murniasih adalah turunan dari gaya Pengosekan. Ini ditandai dengan penggunaan kontur yang tegas sebagai pembagi unit-unit objek, bentuk berjejer dan repetisi, yang secara konfiguratif menghasilkan susunan ornamen yang dekoratif. Murni menemukan idioleknya sendiri yang khas. (2) Tema lukisan Murni adalah persoalan seksual yang didorong oleh realitas biografinya yang mengalami peristiwa kekerasan fisik terhadap tubuhnya. Sebuah laku kekerasan yang memosisikan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki.

Kata kunci: kekerasan, seks, tubuh

Abstract

This study aims to reveal and describe the form and function of the body's subject matter of Gusti Ayu Kadek Murniasih in her paintings: to disclose and describe the meaning sex representation, violence, and power of men in paintings by Gusti Ayu Kadek Murniasih. Qualitative research with cultural studies approach are used in this study. As arrested by the critical theories, this research is expected to produce readings with not ignoring the context of the reading text (visual). The results obtained by the research are: (1) The form and function of the paintings I Gusti Ayu Kadek Murniasih is derived from Pengosekan style. It is characterized by the use of contour firmly on the shared object units, lined shape and repetition, which konfiguratif produce a decorative ornament arrangement. Pure finding themselves idioleknya typical. (2) Pure painting theme is sexual problems driven by the reality of her biography, an incident of physical violence against her. A violent behavior that position women as sexual objects for men.

Keywords: violence, sex, body

PENDAHULUAN

Anak keluarga petani dari Tabanan, Bali ini, bernama lengkap I Gusti Ayu Kadek Murniasih (lihat gambar 1). Lahir pada 21 Mei 1966. Suatu hari ia harus ikut ayahnya bertransmigrasi ke Sulawesi. Tentu saja, harapan yang muncul di benaknya: ingin memperbaiki tarap hidupnya. Namun di daerah transmigrasi itu, tanda-tanda

kehidupan yang lebih baik tidak muncul juga. Kemudian ia memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Cina, di Ujung Pandang. Sambil menjadi pembantu rumah tangga, beruntung, ia disekolahkan majikannya di sebuah SMP. Hanya sampai kelas dua, keluarga Cina itu keburu pindah ke Jakarta. Murni juga diajak serta. Di Jakarta ia tidak bersekolah, tetapi bekerja

sebagai tukang jahit di perusahaan garmen milik majikannya itu. Tak lama ia di Jakarta, tahun 1987 memilih kembali ke Bali. Di tanah kelahirannya ini, ia sempat bekerja sebagai pembuat perhiasan perak di sebuah perusahaan perak di Celuk, Gianyar. Di sini ia ketemu jodohnya, menikah. Rumah tinggal yang juga merangkap studionya terletak di tengah-tengah kebun. Di rimbunnya berbagai jenis pepohonan dengan sebagian tanaman yang dibiarkan tumbuh damai, rumah-studio Murni terasa sejuk. Di rumah-studio dengan lantai bata dan semen ini ia terus berkarya, menggubah lukisan sebagai pernyataan diri atas ketidakadilan gender. Tak henti-henti, ia terus mempersoalkan tubuh dalam lukisannya.



Gambar 1. I Gusti Ayu Kadek Murniasih
(Sumber: Visual Arts, Jakarta)

Melalui ribuan lukisan yang digubahnya, Murni menghadirkan eksistensinya sebagai perempuan perupa. Eksistensi yang dilandasi oleh konsep penggubahan dengan latar biografi yang pedih. Tubuh dalam lukisan Murni menjadi representasi biografinya. Melalui tubuh itu juga, Murni memainkan wilayah representasinya melalui cara menghubungkan dengan obyek kasur, tikar, meja makan, topi, sepatu, kuas, topeng, bawang, ikan, cicak, bahkan pisau dan gergaji. Obyek-obyek yang melingkupi tubuh, khususnya pada vagina dalam karyanya itu dibangun untuk keleluasaan representasi sekitar biografinya.

Persoalan rumah tangga. Persoalan laki-perempuan. Persoalan alat reproduksi. Persoalan genital. Persoalan-persoalan itulah yang membekas dalam biografinya. Betapa tidak, semasa remaja Murni pernah digagahi laki-laki dewasa. Sebuah peristiwa yang membekas menjadi luka abadi. Luka ini diperparah pula dengan peristiwa perceraian dengan suaminya. Persoalan reproduksi, karena Murni secara biologis tidak bisa melahirkan. Tubuh baginya

adalah penderitaan. Hal-hal itulah yang kemudian muncul menjadi motivasi atau konsep dalam lukisannya.

Murni sejak 1995 sudah merepresentasikan tubuhnya ke dalam karya seni rupa. Karya-karya Murni hadir dalam berbagai perhelatan seni rupa, baik di tingkat Nasional maupun regional dan internasional. Persoalan yang dikemukakan Murni adalah persoalan tubuh yang teralami.

Apa-apa yang direpresentasikan oleh seniman, senantiasa dipengaruhi oleh keadaan diri sang seniman itu sendiri. Dalam hal ini, biografi, visi kesenian, ideologi, lingkungan sosial-budaya, dan lain-lain memengaruhi pilihan dan cara merepresentasikannya. Oleh karena itulah, kesenian, secara umum, tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa menempatkannya dalam keseluruhan kerangka masyarakat dan kebudayaan. Hubungan timbal balik inilah yang melahirkan pendapat bahwa karya seni yang baik adalah suara zaman.¹

¹ Pendapat ini dikemukakan kritikus seni rupa Indonesia, Sanento Yuliman. Lebih jauh

Suara zaman atau sezaman secara eksplisit dalam sejarah seni rupa Indonesia misalnya, bahkan sejak zaman prasejarah, telah dengan tegas memperlihatkan hubungan seni rupa dengan fenomena masyarakat yang terjadi saat itu. Pada zaman prasejarah, lukisan dinding misalnya, bertalian dengan peradaban animisme dengan kepercayaan manusia masa itu terhadap dunia gaib (magis). Pada masa seni rupa modern Indonesia, karya seni rupa bertalian dengan perjuangan masyarakat dalam menentang penjajahan.

Dewasa ini, seni rupa kontemporer Indonesia muncul dalam kerangka yang kurang-lebih sama. Seni rupa kontemporer Indonesia hadir menyuarakan zaman kini yang kompleks dengan persoalan kemanusiaan. Kapitalisme global yang tidak terbandung, perusakan lingkungan yang tidak terkendali, sains dan teknologi informasi yang demikian maju pesat, perang fisik dan perang ideologi yang makin menjadi, pribadi manusia yang terbelah, masalah perempuan dan gender yang terus mengemuka, seks dan kekuasaan yang makin menajam, dan lain-lain adalah contoh yang bisa disebut sebagai gambaran peradaban manusia masa kini.

Perupa kontemporer Indonesia memiliki berbagai persoalan dalam proses pergulatan tersebut. Kebudayaan lokal, persoalan psikologis, dan konteks lainnya adalah wilayah yang mengepung proses ini. Namun demikian, yang paling khas memiliki persoalan ini adalah perempuan perupa Indonesia dengan persoalan tubuhnya. Perempuan masa kini yang memuliakan hak-hak tubuhnya sembari tetap terikat oleh hak-hak komunal atas (keber) tubuh(annya). Dalam kasus ini, Gusti Ayu Kadek Murniasih, perempuan Bali yang lahir dan dibesarkan dalam wilayah kultural Bali yang patriarkhi adalah contoh yang paling fenomenal. Tubuhnya bukan hanya memiliki

sejarah luka yang tajam menggores biografinya, tetapi juga punya riwayat perlawanan terhadap kuasa laki-laki. Gusti Ayu Kadek Murniasih adalah perempuan yang menyadari bahwa tubuhnya adalah asset yang amat berharga untuk digunakan sebagai perlawanan terhadap kuasa laki-laki yang patriarkhi.

Gusti Ayu Kadek Murniasih, seperti juga perempuan pada umumnya, berhadapan dengan konstruksi sosial-budaya yang kerap merugikan kaum perempuan. Inti semua ini, antara lain, bersumber dari persoalan seks yang dalam banyak kebudayaan di Indonesia menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek seks. Inilah wilayah kuasa kerajaan laki-laki dan kebudayaan patriarkhi yang secara menerus digugat Gusti Ayu Kadek Murniasih.

Penelitian dengan tajuk “Membaca Tubuh Gusti Ayu Kadek Murniasih: Representasi Seks, Kekerasan, dan Kuasa Laki-Laki” ini dengan subjek penelitian ini adalah tubuh Gusti Ayu Kadek Murniasih dalam karya lukisnya. Penelitian ini memilih perspektif *cultural studies*— dengan teori tandem: semiotika visual, teori estetika, teori feminisme, dan teori representasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka ada dua pertanyaan penelitian agar kajian menjadi fokus. Pertanyaan penelitian tersebut bertalian dengan upaya membincangkan pembacaan ihwal: (1) Bagaimanakah bentuk dan fungsi tubuh Gusti Ayu Kadek Murniasih sebagai *subject matter* dalam lukisannya?; (2) Apakah makna representasi seks, kekerasan, dan kuasa laki-laki dalam lukisan karya Gusti Ayu Kadek Murniasih.

tentang ini, periksa Asikin Hasan, 2001. *Dua Seni Rupa, Sepilihan Tulisan Sanento Yuliman*, Jakarta: Kalam

METODA PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini disiapkan dengan menyusun sejumlah langkah penelitian yang meliputi rancangan penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan jenis dan sumber data, penentuan instrumen penelitian, penentuan teknik pengumpulan data, penentuan teknik analisis data, dan kemungkinan penyajian hasil analisis data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: *open coding*, *axia coding*, dan *selective coding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN BENTUK DAN FUNGSI

Tiga unsur rupa tradisi yakni *cawi*, *ngabur*, dan ornamen dekoratif adalah kosa tradisi Bali yang telah menjadi dialek milik para perupa penggemong seni tradisi Bali. Sebagaimana makna dialek yang memiliki variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai, baik berada dalam satu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, maupun masa tertentu, unsur rupa tradisi Bali tersebut pada karya Murni berkembang menjadi idiolek. Hal ini bisa terlihat dari keseluruhan ciri perseorangan dalam bahasa rupanya.

Idiolek Murni misalnya, adalah turunan dari gurunya, I Dewa Putu Mokoh (selanjutnya disebut Mokoh). Mokoh adalah salah seorang pelukis penting di Bali. Ia dilahirkan di Pengosekan tahun 1963. Mokoh memulai kariernya sebagai pelukis ketika ia masih berusia belasan tahun, belajar melukis dari I Ketut Kobot (selanjutnya disebut Kobot). Sejak tahun 1970-an lukisan Mokoh berbeda dengan karya gurunya, Kobot. Pada tahun itu pula Mokoh bersama saudara kandungnya, I Dewa Nyoman Batuan (selanjutnya disebut Batuan) mendirikan sanggar kerja dan galeri yang diberi nama "Kelompok Seniman Pengosekan". Kelompok ini mulai mengenalkan tema-tema lukisan baru yang elok: lukisan bunga-bunga dan burung.

Gaya dan tema ini kerap dikaitkan dengan peran Mokoh dan Batuan.

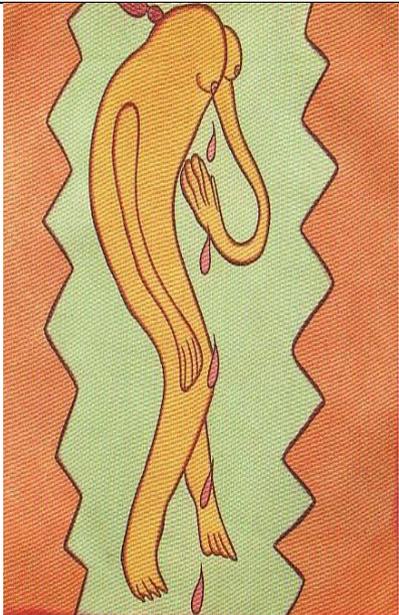
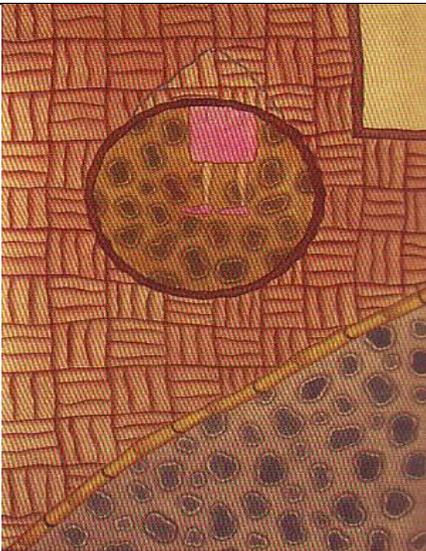
Tahun 1989 Mokoh bertemu dengan Mondo, pelukis berkebangsaan Italian yang bermukim di Bali. Bersama Mondo, Mokoh melakukan kolaborasi dalam kanvas-kanvas yang sama. Satu kanvas ditandatangani berdua: Mondo/Mokoh. Karya-karya mereka pernah dipamerkan di Niennale Venesia, Italia, tahun 1993. Persentuhan dengan Mondo inilah yang kemudian melahirkan karya-karya baru yang khas. Figur-figur telanjang dari Barat menjadi stimulus Mokoh untuk melukiskannya dengan tafsir pribadi.

Murni selama lebih-kurang satu tahun belajar dari Mokoh. Murni belajar dasar-dasar melukis gaya Pengosekan. Mulai dari belajar membuat garis hingga belajar mewarnai. Selain itu, Murni juga melukis bersama dengan Mokoh dan Mondo di teras rumah Mondo di Ubud. Proses melukis bersama itu memberi pengaruh yang kuat terhadap gaya dan tema lukisan Murni. Mokoh dan Mondo adalah dua figur yang memberi peran penting bagi pertumbuhan kesenirupaan Murni hingga Murni benar-benar menemukan gaya seni lukisnya yang pribadi.

Gaya ini adalah turunan dari Mokoh yang perintis gaya Pengosekan itu. Secara kebetukan, lukisan Murni adalah turunan dari gaya Pengosekan. Ini ditandai dengan penggunaan kontur yang tegas sebagai pembagi unit-unit objek, bentuk berjejer dan repetisi, yang secara konfiguratif menghasilkan susunan ornamen yang dekoratif. Kendatipun Murni dengan sadar menggunakan dialek rupa Pengosekan—yang adalah milik kolektif masyarakat pelukis Pengosekan ia berhasil menemukan idioleknnya sendiri. Idiolek ini dengan mudah bisa terbaca dari visualisasinya yang khas Murni: garis tegas dan tebal, warna monokrome, kontras, atau komplimenter, dan repetisi dalam interval yang hening. Hal ini diperlihatkan melalui ciri rupa turunan dengan penggunaan teknik *nyawi* (lihat gambar 2), teknik *ngabur* (lihat gambar 3), penggunaan ornamen dekoratif (lihat

gambar 4), dan kecenderungan memakai

objek tunggal dalam lukisannya.

	
<p>Gambar 2. <i>Nyawi</i> pada lukisan <i>Cintaku Sedang Bersemi</i> karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih (Sumber: Galeri Nadi Jakarta)</p>	<p>Gambar 3. <i>Ngabur</i> pada lukisan <i>Duniaku</i> karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih (Sumber: Galeri Nadi, Jakarta)</p>
	<p>Gambar 4. Ornamen dekoratif pada lukisan <i>Nenek Saya</i> karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih (Sumber: Galeri Nadi, Jakarta)</p>

Perempuan perupa ini adalah penjaga tradisi rupa Bali yang dengan kepekaan dan daya gubahnya telah melahirkan idioleknya tersendiri. Secara konfiguratif, dialek rupa tradisi pada karya Murni masih bisa terbaca dengan jelas. Di sisi lain, idioleknya juga tampak dengan tegas. Perempuan perupa ini adalah perupa Bali yang memiliki kesadaran kosmologisnya. Sebuah wilayah budaya yang ikut dibangunnya.

MAKNA

Jauh sebelum dunia sastra Indonesia dihebohkan oleh kemunculan perempuan muda pesastra yang menggarap persoalan seks dan seksualitas ke dalam karya-karya fiksinya,² I Gusti Ayu Kadek Murniasih sejak 1995 sudah mengeksplorasi tubuhnya ke dalam karya seni rupa. Kendatipun karya-karya seni rupa Murni tidak mendapat perhatian atau pembahasan sedalam dan seheboh sastrawangi, tetapi karya-karya Murni hadir dalam berbagai perhelatan seni rupa, baik di tingkat Nasional maupun dalam biennial-biennial regional dan internasional. Salah satu karyanya yang dipamerkan dalam CP Open Biennale—sebuah perhelatan internasional di Jakarta—tahun 2003 adalah *Pohon Kesukaanku* (akrilik di atas kanvas, 160 x 100 cm, tahun 2003).

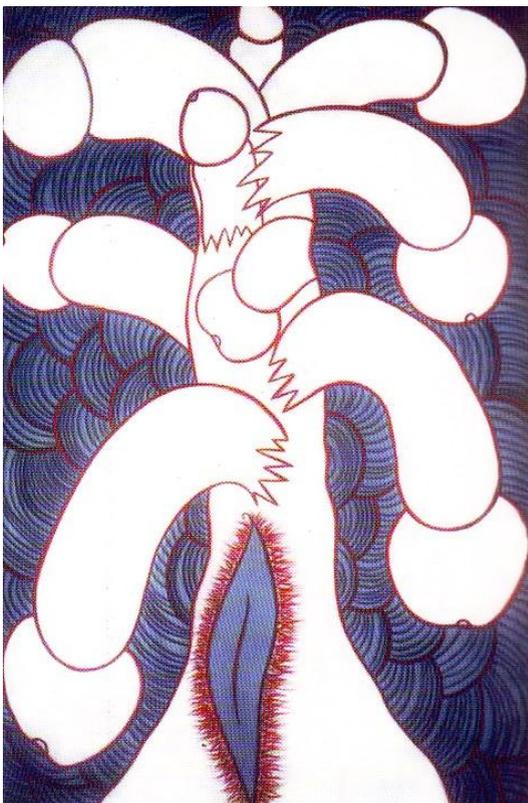
Lukisan ini digubah dengan pembentukan batang pohon yang secara struktur memalih³ menjadi bentuk penis. Pohon penis ini memiliki tujuh buah cabang yang tumbuh ke semua sisi. Pohon penis ini diberi warna putih bersih dengan kontur rapi berwarna merah.

Di bagian bawah pohon ada bentuk tak beraturan yang amat menyerupai bentuk vagina. Bentuk ini diberi warna biru tua dengan sekumpulan arsir garis tak beraturan yang mengelilingi bagian luarnya. Di latar belakang ada pola garis setengah lingkaran yang disusun berulang memenuhi seluruh bagian bidang latar belakang. (Lihat Gambar 5) Ada beberapa makna yang bisa diproduksi dari lukisan ini. Pertama, penis dan vagina dengan pilihan warna serta bentuk seperti lukisan di atas adalah sebuah konstruksi sosial yang membedakan kedudukan penis dan vagina sebagai sesuatu yang amat berbeda. Kedua, hal ini terkait juga dengan perbedaan gender yang melahirkan subordinasi dan ketergantungan. Penggambaran penis dan vagina seperti ini terkait dengan anggapan bahwa kelamin laki-laki kerap dinilai sebagai benda yang kering yang langsung terkonotasikan dengan bersih. Dalam lukisan ini penis digambarkan dalam bentuk yang rapi, putih,

² Kemunculan perempuan muda penulis sastra yang mengangkat persoalan seksualitas dimulai oleh kehadiran *Saman* karya Ayu Utami. *Saman* adalah fragmen dari novel pertama Ayu Utami, *Laila Tak Mampir di New York*. Fragmen ini memenangkan Sayembara Roman Dewam Kesenian Jakarta tahun 1998. Setelah Ayu Utami kemudian muncul nama-nama lain yang oleh sejumlah pengamat sastra, dunia sastra perempuan muda pesastra ini disebut sebagai “Sastrawangi”. Penamaan ini terkait dengan tampilan mereka yang cantik, menarik, dan senantiasa harum. Tetapi, yang jauh lebih penting dari penamaan itu adalah munculnya berbagai tanggapan terhadap persoalan seksualitas dalam karya mereka. Sejumlah pengamat terlibat dalam berbagai polemik di media massa.

³ Malih adalah sinonim dari berubah rupa. Bentuk-bentuk yang memalih banyak ditemukan dalam khasanah seni rupa tradisional. Batik motif parang rusak misalnya, secara struktur bentuk parangnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Bentuk parang dalam motif parang rusak, dengan demikian, telah memalih menjadi sebuah motif hias geometis yang stilistik. Contoh lain penggunaan kata “malih” ini, misalnya dalam kepercayaan tertentu, orang yang melakukan pesugihan diyakini tubuh biologisnya akan memalih menjadi tubuh babi. Istilah “memalih” dipopulerkan oleh Prof. Dr. Sudjoko, guru besar Seni Rupa ITB. Tentang penggunaan istilah “malih”, “memalih”, dan “palihan” lihat Sudjoko, “Menuju Nirada”, dalam Baranul Anas (ed.). 2000. *Refleksi Seni Rupa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

dan jelas strukturnya. Murni, tidak bisa tidak, telah mengamini anggapan umum tentang penis.



Gambar 5. *Pohon Kesukaanku* karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih
Sumber: CP Open Biennale 2003, Jakarta

Sejalan dengan itu, ketika Murni menggambarkan vagina eksekusi visual yang dipilihnya adalah hadirnya bentuk vagina yang strukturnya atertib atau tidak beraturan. Pilihan warna yang dipakainya juga makin menegaskan ketidakberaturan itu. Biru tua dengan sedikit nuansa hitam adalah warna yang mencitrakan kotor. Penggambaran vagina dengan warna biru tua ini terkait dengan anggapan bahwa vagina dicitrakan sebagai sesuatu yang kotor, basah, dan berdarah. Kesan ini dipertegas pula dengan sekumpulan arsir garis yang mengitari kontur vagina dengan

warna merah tua yang mencitrakan ketidaksegaran.

Kendatipun melalui lukisan ini Murni tampak mengamini realitas konstruksi sosial-budaya itu, tetapi ada makna lain yang secara semiotis menggambarkan perbedaan gender yang melahirkan subordinasi dan ketidakadilan. Pencitraan penis sebagai sesuatu yang jelas bentuknya, kering, dan bersih; di sisi lain pencitraan vagina yang tidak jelas bentuknya, basah, dan kotor, tentu saja merugikan kaum perempuan.

Dalam lukisan Murni, secara estetis, makna bisa juga diproduksi melalui cara penggubahannya. Penempatan vagina menempel pada bagian bawah penis seolah menggambarkan bahwa vagina hanyalah "bagian" dari penis. Hal ini terhubung pula dengan subordinasi perempuan atas laki-laki. Ini terkait pula dengan asal-usul Hawa yang bersumber dari tulang rusuk Adam yang merupakan pembenaran status inferior perempuan. Secara konotatif, ada kesan bahwa vagina adalah sesuatu yang daya (ke)hidup(an)-nya terletak pada daya (ke)hidup(an)-nya penis.

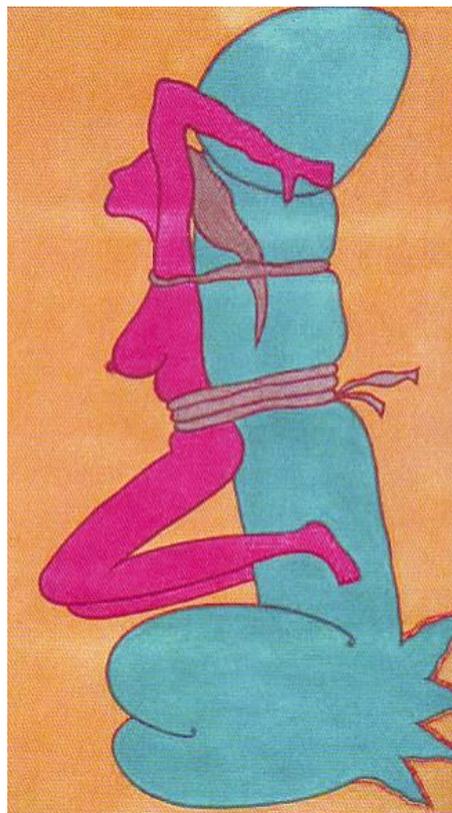
Subordinasi ini berkorespondensi juga dengan ketergantungan. Ketergantungan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan, dalam lukisan ini diwakili oleh vagina, seperti tidak memiliki ruangnya selain pada penis. Judul lukisan ini saja, *Pohon Kesukaanku*, dengan jelas menegaskan penis (malihan dari pohon) sebagai objek utama; dan menempatkan vagina sebagai objek pelengkap. Sebuah subordinasi yang menegaskan ketergantungan itu.

Eksekusi visual yang dilakukan Murni dengan cara yang terbuka dan amat verbal, sepintas seolah hanya mendobrak tabu seksualitas. Sesungguhnya makna yang terkandung dari lukisan ini lebih jauh daripada sekadar mendobrak tabu. Lukisannya lebih bisa diapresiasi sebagai semangat menggugat budaya patriaki. Hal ini memiliki korespondensi dengan latar

biografinya yang memperlihatkan Murni sebagai yang terpinggirkan. Ketika Murni masih belia, usia tujuh tahun, ia mengalami peristiwa yang amat membuat ia pedih: digagahi laki-laki dewasa. Peristiwa mengerikan itu hingga ia menjelang wafat terus membayangi pikiran dan perasaannya. Murni tergores, amat luka.

Serupa lukisan di atas, *Ketergantunganku* (2004) melukiskan posisi perempuan yang tersubordinasi atas laki-laki. Lukisan ini dibangun oleh susunan dua pokok gambar: perempuan telanjang terikat pada sebuah penis yang besar. Secara semiotis lukisan bisa memproduksi berbagai makna. Ukuran penis yang melampaui ukuran tubuh perempuan bisa bermakna bahwa penis dalam hal ini lebih penting. Sesuatu yang superior. Dengan sendirinya tubuh perempuan adalah sesuatu yang inferior. Ia (tubuh perempuan) menjadi amat kecil atau tak berdaya dihadapan penis. (Lihat Gambar 6)

Makna lain yang bisa diproduksi dari lukisan ini adalah makna subordinasi dan ketergantungan perempuan atas laki-laki. Tubuh perempuan adalah wilayah tempat tumpah-ruahnya kuasa, hegemoni, dan dominasi laki-laki. Korespondensi yang bisa ditarik dari lukisan ini adalah kriteria eksternal di mana biografi Murni yang sejak masa kanak-kanak telah dihancurkan oleh laki-laki; kehidupan rumahtangganya yang bukan hanya tak utuh, tetapi juga menyakitkan. Selain itu dalam sejumlah lukisan Murni kerap ditemukan tubuh telanjang yang disandingkan dengan benda-benda: pisau, bawang, meja makan, gergaji, kikir, dan lain-lain. Ada kesan bahwa tubuh telanjang itu adalah gambaran tentang dirinya, perempuan yang berhadapan dengan berbagai kekerasan seksual. Betapa tidak, genital dalam lukisan Murni misalnya, kerap digambarkan sebagai genital yang robek, luka, menganga, atau tak berdaya. Di sekitar genital itu objek-objek tajam bertebaran. Tubuh perempuan dalam lukisan-lukisan ini terpenjara oleh hasrat dan kuasa laki-laki.



Gambar 6. *Ketergantunganku* karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih
Sumber: Galeri Nava, Denpasar

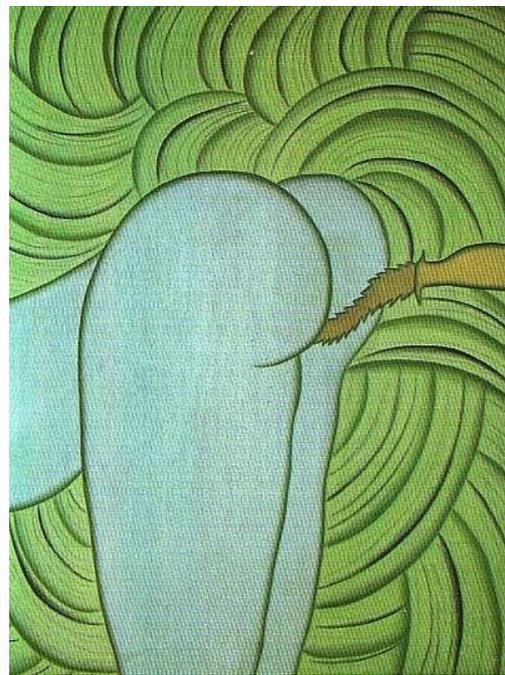
Sejumlah lukisan yang memperlihatkan hal ini, antara lain *Action* (akrilik di atas kanvas, 50 x 35 cm, tahun 1996) yang memperlihatkan seorang perempuan bertelanjang dalam posisi menungging di atas meja sedang bersetubuh dengan mahluk aneh yang menyerupai reptilia. Mahluk aneh itu ukuran tubuhnya sekitar empat kali lipat tubuh perempuan. Ada kesan yang segera dapat ditangkap dari lukisan ini: tubuh perempuan serupa objek "santapan" bagi mahluk yang menyerupai struktur tubuh reptilia itu. Reptilia yang carnivora atau pemakan daging ini, secara semiotis bisa memproduksi makna konotatif: reptilia bisa disimbolkan sebagai laki-laki. Sebuah

pelukisan narasi simbolik yang menegaskan posisi perempuan sebagai objek.

Lebih jauh dari itu, *Trauma 2* (akrilik di atas kanvas, 50 x 50 cm, tahun 1998), memperlihatkan tubuh perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Lukisan ini dibangun oleh sebagian tubuh perempuan: pinggang, pantat, dan paha. Dalam balutan warna biru pucat, tubuh dalam posisi menungging itu, bagian belakangnya tampak sedang disentuh atau ditusuk sebuah benda tajam. Dari strukturnya, benda tajam itu amat menyerupai alat pertukangan, kikir. Di latar belakang, sekumpulan garis dalam pola pancaran⁴ tampak berpusat dari bagian tengah tubuh perempuan itu.

Dapat dibaca bahwa lukisan ini tidak lain adalah gambaran tentang kekerasan terhadap tubuh perempuan. Dalam konteks Murni, kekerasan itu berkorespondensi dengan latar biografinya yang memang mengalami dua kali kekerasan seksual. Tubuh perempuan dengan warna biru pucat seperti menegaskan bahwa tubuh perempuan dalam situasi mental ketakutan. Kikir bisa dibaca sebagai simbol atas laku kekerasan itu. Alat pertukangan yang konturnya bergerigi itu—biasanya dipergunakan untuk menghaluskan permukaan benda (kayu atau logam)—segera terhubung dengan kekerasan. Latar belakang dengan pola pancaran makin menegaskan bahwa pusat kekerasan itu ditujukan pada kelamin perempuan. Genital

atau vagina adalah ruang tempat tumpah-ruahnya kekerasan. (Lihat Gambar 7).



Gambar 7. *Trauma 2* karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih

Sumber: Galeri Nadi, Jakarta

Murni sejak 1995 secara terus-menerus menggali tema seputar persoalan seksual. Tema ini didorong oleh realitas biografinya yang mengalami peristiwa kekerasan fisik terhadap tubuhnya: perkosaan dan perceraian. Sebuah laku kekerasan yang memposisikan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki. Perbedaan gender dan kuasa laki-laki yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan ini telah direpresentasikan oleh Murni dalam lukisan-lukisannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memperoleh hasil: (1) Bentuk dan fungsi lukisan I Gusti Ayu Kadek Murniasih adalah turunan dari gaya Pengosekan. Ini ditandai dengan penggunaan kontur yang tegas sebagai pembagi unit-unit objek, bentuk berjejer dan repetisi, yang secara konviguratif

⁴ Dalam terminologi desain dwi matra, pancaran adalah jenis perulangan. Gatra yang berulang atau pangsa racana yang bergerak dengan teratur mengitari sebuah pusat. Pancaran dapat memberi kesan getaran lihatan, yang ditemukan pada perulangan. Ciri pancaran adalah mempunyai pumpan yang kuat yang biasanya terletak pada pusat rancangan, dan dapat menimbulkan energi dan gerakan lihatan dari pusat atau menuju pusat. (Lihat Wicius Wong, 1995:45)

menghasilkan susunan ornamen yang dekoratif. Murni menemukan idioleknya sendiri yang khas. (2) Tema lukisan Murni adalah persoalan seksual yang didorong oleh realitas biografinya yang mengalami peristiwa kekerasan fisik terhadap tubuhnya. Sebuah laku kekerasan yang memosisikan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki.

Saran disampaikan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis terhadap karya I Gusti Ayu Kadek Murniasih disarankan untuk menkaji karya-karya tiga dimensinya yang jarang dibincangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies, Teori & Praktik* (Alih Bahasa: Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bianpoen, Carla dan Mella Jaarsma. 1996. "Perempuan Perupa: Antara Visi dan Ilusi" dalam Mayling Oey-Gaediner (ed.), *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*. Jakarta: Gramedia
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fischer, Joseph. 1990. *Modern Indonesian Art: Three Generation of Tradition and Change 1945-1990*. Jakarta and New York: Panitia Pameran KIAS and Festival of Indonesia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2006, "Antara Homogenitas dan Heterogenitas: Estetika dalam Cultural Studies" (makalah). Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Spanjaard, Helena, 2004. *Exploring Modern Indonesian Art*. Singapura: SNP Editions.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Jender & Feminisme*. Yogyakarta: WPC
- Supangkat, Jim. 1999 "Seni Rupa Kontemporer Indonesia" (makalah) Denpasar: Edwin Gallery.
- Supriyanto, Enin, 2007. *Indonesian Contemporary Art Now, 2007*, Singapura: SNP Editions.
- Synnott, Anthony. 1993. *The Body Social, Symbolism, Self, and Society, (Tubuh Sosial, Simbolisme, Diri, dan Masyarakat)*. (Terjemahan: Yudi Santoso, 2003), Yogyakarta: Jalasutra.
- Wardani, Farah. 2003. "Perempuan sebagai Teks (Dekonstruksi Jender dan Teks dalam Praktik Seni Rupa)", *Harian KOMPAS*, 5 September.
- Wardani, Farah dan Eddy Soetriyono. 2004. "Dari Objek Menjadi Subjek, Perempuan dalam Seni Rupa Indonesia," dalam *Visual Arts*, No. 3, Oktober-November.
- Wright, Astri. 1994. *Soul, Spirit, and Mountain: Preoccupations of Contemporary Indonesian Painters*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hardiman, 2004. "Representasi Politik, Politik Representasi dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia" dalam *Jurnal Kajian Budaya*, No. 01, Vol.5, Januari. Denpasar: Kajian Budaya, Unud.
- Hardiman dan Luh Suartini, 2011. "Eksistensi Sanggar Seniwati Bali: Perlawanan terhadap Dominasi laki-laki Perupa dalam Medan Sosial Seni Rupa di Indonesia: dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sain dan Humaniora (JPPSH)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 3, Desember.

- Parta, I Wayan Seriyoga, 2010. "Tranformasi Seni Tiga Dimensional Bali" dalam Jurnal *Prasi*, No. 11, Vol.6, Januari-Juni. Singaraja: FBS Undiksha.
- Hardiman, 2007. "Tubuh Perempuan: Representasi Gender Perempuan Perupa Bali" (tesis). Denpasar: Kajian Budaya, Universitas Udayana
- Hardiman, 2007. "Subject Matter Tubuh Perempuan: Representasi Gender Perempuan Perupa Bali" (hasil penelitian Kajian Wanita) Jakarta: Dikti.
- Hardiman, 2008. "Tubuh Perempuan: Representasi Seks Perempuan Perupa Kontemporer Indonesia" (hasil penelitian fundamental). Jakarta: Dikti.

PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS

Ni Komang Arie Suwastini
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email: ariesuwastini_101004@yahoo.co.uk

Abstrak

Tulisan ini mengulas perkembangan feminisme barat dari abad ke delapan belas hingga abad ke dua puluh satu saat feminisme memasuki era postfeminisme untuk mengungkapkan perubahan feminisme dari waktu ke waktu merupakan perkembangan yang menunjukkan kemampuan feminisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dialami perempuan. Dalam garis besar, feminisme dapat dibagi menjadi empat tonggak perkembangan, yakni feminisme awal, feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, dan feminisme gelombang ketiga dan/atau postfeminisme. Secara umum keempatnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk memperjuangkan subjektivitas perempuan. Masing-masing gelombang memiliki penekanan perjuangan yang berbeda dan setiap gelombang berikutnya merupakan revisi dari gelombang sebelumnya. Dikotomi feminisme gelombang ketiga dan/atau postfeminisme merupakan perkembangan yang paling majemuk dan menimbulkan banyak kontroversi karena postfeminisme merupakan persinggungan antara feminisme dan postmodernisme yang berkembang menjelang pergantian millennium yang berpadu dengan kebutuhan internal dalam feminisme sendiri. Kemajemukan dalam perkembangan feminisme terakhir ini harus dipandang sebagai kekayaan dan kelebihan karena itu berarti feminisme semakin terbuka terhadap perbedaan dan perubahan.

Kata Kunci: Feminisme, postfeminisme, subjektivitas.

Abstract

The present paper aims at review the development of western feminism from the eighteenth century up to the twenty-first century when feminism entered the era of postfeminism in order to demonstrate that the developments of feminism is a continuous process which shows feminism's adaptability to women's contemporary issues. In the broadest sense, feminism can be periodically divided into four stages of development, namely the early feminism, the first-wave feminism, the second-wave feminism, and the third-wave feminism and/or postfeminism. In general they all share the same goal that is to promote female subjectivity with different emphases in their goals and each subsequent wave is a revision of the proceeding wave. Third-wave feminism and/or postfeminism, however, is the most plural and controversial development as it is the intersection between feminism with the postmodern paradigms that develops robustly before the turn of the millennium combined with the internal demands from within feminism. The pluralism in this last stage of feminism should be considered as strength for feminism as it shows feminism's adaptability to diversity and change.

Key Words: feminism, postfeminism, subjectivity

PENDAHULUAN

Setelah feminisme gelombang kedua mencapai puncaknya pada tahun 1970an, terjadi perkembangan yang meresahkan kaum feminis baik dari pihak akademis maupun pihak praktisi. Pada 1980an, berkembang banyak aliran feminisme yang berbeda dan sering berkontradiksi satu sama lainnya. Salah satu perkembangan yang paling meresahkan adalah perkembangan postfeminisme yang sering diartikan sebagai matinya feminisme. Tulisan berikut akan membahas pengertian feminisme dan tahapan-tahapan perkembangannya, diikuti dengan pengertian postfeminisme dan prinsip-prinsipnya untuk menunjukkan bahwa postfeminisme merupakan kelanjutan dari feminisme itu sendiri.

Sarah Gamble memberikan definisi umum feminisme sebagai *"the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns"* (2006: vii). Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis (Weedon, 1987 dalam Hodgson-Wright, 2006: 3).

Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan (Jenainati dan Groves, 2007: 3). Sejalan dengan Jenainati dan Groves, Ross (2009) melihat feminisme sebagai semua usaha yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan. Dengan mengaitkan definisi umum feminisme dari Gamble (2006), Jenainati dan Groves (2007) dan Weedon (1987), feminisme dapat dirumuskan sebagai keyakinan, gerakan dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkis.

Namun perlu diingat bahwa feminisme bukanlah gerakan universal dengan konsep homogen yang dapat mewakili seluruh perempuan. Seperti yang ditekankan Tong (2009), feminisme merupakan konsep yang sangat luas dan majemuk. Feminisme merupakan sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut (Tong, 2009: 1). Adapun pembagian feminisme menjadi gerakan feminisme awal, feminisme gelombang kedua, dan feminisme gelombang ketiga seperti yang dilakukan Gamble (2006) merupakan salah satu usaha untuk menarik benang merah perkembangan feminisme secara kronologis.

GERAKAN FEMINISME AWAL

Gerakan feminisme awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550-1700 di Inggris (Hodgson-Wright, 2006). Fokus perjuangan feminisme awal adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional (Jenainati dan Groves, 2007: 9). Pemikiran ini dimungkinkan karena berkembangnya Pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat (O'Brien, 2009).

Menurut Hodgson-Wright (2006), perjuangan feminisme awal melalui tiga cara. Pertama melalui usaha untuk merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua dengan menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada jaman tersebut. Ketiga, dengan membangun solidaritas antar penulis perempuan. Solidaritas ini membangun kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis

perempuan. Pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak-anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang dipengaruhi oleh Pencerahan pada gilirannya menerbitkan inspirasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan menjadi dasar bagi pergerakan yang lebih politis dalam feminisme gelombang pertama (Ross, 2009).

FEMINISME GELOMBANG PERTAMA

Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad kedupuluh (Sanders, 2006). Tulisan Wollstonecraft dilihat Sanders sebagai tonggak gerakan feminisme modern Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial (Richardson, 2002). Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian.

Feminisme gelombang pertama juga sudah diwarnai oleh usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Salah satu pejuang hak perempuan yang sudah menikah yang paling menonjol adalah Caroline Norton yang memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya setelah Caroline bercerai (Gleadle, 2002). Aktifitas para perempuan ini merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai ketertindasan perempuan yang kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi untuk membela nasib kaum

perempuan. Aktifitas kaum feminis di Inggris ini bergaung juga di Amerika yang mencapai tonggak penting pada *Seneca Falls Convention* (1848) yang menuntut dihapuskannya semua diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Di Inggris, meningkatnya meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja menuntut disediakan sekolah yang dapat mempersiapkan perempuan sebagai tenaga kerja profesional. Meski lapangan kerja yang tersedia umumnya berada pada sektor domestik, namun hal ini mendorong meluasnya kebutuhan pendidikan untuk perempuan. Pada gilirannya, semakin banyak perempuan yang terlibat di dunia pendidikan yang memicu dicetuskannya ide bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih (Sanders, 2006). Isu ini semakin memuncak pada 1895 saat kata "*feminist*" digunakan untuk pertama kalinya dalam *Athenaeum* (Walters, 2005: 1). Hak pilih untuk perempuan dicapai pada 1918.

Menurut Sanders (2006), feminisme gelombang pertama mencakup beberapa ambivalensi. Para feminis gelombang pertama sangat berhati-hati agar tidak terlibat kehidupan yang tidak konvensional. Mungkin ini ada kaitannya dengan backlash yang dialami pasca biografi Mary Wollstonecraft (Kirkham, 1997). Di samping itu, gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah saja, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi. Sementara itu, gerakan mereka hanya ditujukan untuk isu-isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas. Hanya perempuan kaya yang memiliki kesempatan untuk berkarir dan kehidupan domestik karena mereka mampu membayar pelayan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga mereka. Dan kritik yang paling mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kaum laki-laki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

FEMINISME GELOMBANG KEDUA

Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960an yang ditandai dengan terbitnya *The Feminine Mystique* (Freidan, 1963), diikuti dengan berdirinya *National Organization for Woman* (NOW, 1966) dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* (CR) pada akhir tahun 1960an (Thompson, 2010). Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka (Thornham, 2006). Feminisme gelombang kedua bertema besar “*women’s liberation*” yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusioner. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas (Gillis, et.al., 2004).

Menurut Thornham (2006), feminisme gelombang kedua di Amerika dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. Kelompok pertama merupakan aliran kanan yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial (di Amerika), dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah organisasi NOW (National Organization for Women- Organisasi Perempuan Nasional) yang didirikan oleh Betty Freidan pada 1966.

Aliran kedua sering disebut aliran kiri dan bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal NOW karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam (Siegel, 2007). Konsep utama feminisme radikal adalah “*consciousness raising*” dengan paham “*the personal is political*” (Whelehan, 1995).

Paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada insituisi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual (Genz dan Brabon, 2009: 48). Menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, mengalah, dan lemah lembut. Mereka menentang kontes-kontes kecantikan karena mengganggu kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk mencekoki perempuan dengan standar kecantikan yang melemahkan posisi perempuan.

Di Inggris, Kelompok Kanan terbentuk kuat di kalangan perempuan pekerja. Mereka melaksanakan pemogokan untuk menuntut persamaan upah. Sementara itu kelompok kiri sangat dipengaruhi oleh paham Sosialis Marxisme (Thornham, 2006). Namun dalam *The British National Women’s Liberation Conference* pada 1970, aliran kanan dan kiri di Inggris bersatu dan menyerukan satu feminisme. Secara kompak mereka menuntut persamaan upah, persamaan pendidikan dan kesempatan kerja, tempat penitipan anak 24 jam, alat kontrasepsi gratis, dan aborsi sesuai kebutuhan. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa feminisme gelombang kedua berfokus pada isu perempuan sebagai kelompok yang tertindas dan tubuh perempuan sebagai situs utama penindasan tersebut.

Menurut Thornham (2006), salah satu ciri utama feminisme gelombang kedua baik di Inggris maupun di Amerika adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang mampu memayungi semua perjuangan feminis. Dalam pandangan Thornham, buku *The Second Sex* (1956) dari Simone de Beauvoir menjadi salah satu acuan utama feminisme tahun 1970an. Simone de Beauvoir menentang determinisme biologis dalam fisiologi, determinisme dorongan bawah sadar dalam psikoanalisa Freud dan determinisme subordinasi ekonomi dalam teori Marx (Phoca dan Wright, 1999; Thornham, 2006). Menurut de Beauviour, teori-teori tersebut telah mendorong

internalisasi konsep perempuan sebagai yang liyan (*the Other*) dan perempuan menjadi wanita karena konstruksi-konstruksi sosial yang patriarkis tersebut (de Beauvoir, 1956). Bagi de Beauvoir, perempuan harus merebut kesempatan untuk mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan sosial agar perempuan menjadi subjek yang setara dengan laki-laki.

Di Amerika, pendapat de Beauvoir dikembangkan oleh Betty Freidan, Kate Millett, dan Shulamith Firestone (Jenainati dan Groves, 2007). Baik Freidan maupun de Beauvoir percaya bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan adalah dengan mengubah perempuan itu sendiri. Freidan berpendapat, untuk menjadi perempuan yang setara dengan laki-laki, perempuan harus meninggalkan jebakan rumah tangga dan semua "*feminine mystique*" yang mengikat perempuan dalam konstruksi yang mensubordinasinya (Freidan, 1963).

Menurut feminis gelombang kedua, *conscious rising* (pencerahan akan kondisi tertindasnya perempuan oleh patriarki) merupakan alternative terbaik untuk menyadarkan perempuan dari keterkungkuan mereka (O'Reilly dan Porter, 2005). Sementara itu Kate Millett dan Firestone berpendapat lebih radikal. Bergerak di bidang sastra, Kate Millett mengembangkan kajian sastra, film, dan budaya untuk melawan penindasan terstruktur melalui control ideologis. Sementara Firestone mengikuti ajaran Marxis dan mengajak perempuan menguasai alat-alat *reproduksi* (Tong, 2009).

Di Inggris, Juliet Mitchel setuju bahwa penindasan perempuan utamanya dilakukan secara ideologis dalam '*psychology of femininity*' (Thornham, 2006). Diinternalisasi oleh perempuan melalui pencekokan ideologi yang terstruktur, psikologi femininitas ini kemudian diwujudkan dalam perilaku seksual yang privat dan pengabdian pada keluarga. Namun tidak seperti Firestone, Mitchel

berpendapat pembebasan perempuan terletak pada penguasaan control terhadap produksi, reproduksi, seksualitas, dan pendidikan anak (Tong, 2009).

Di Perancis, Luce Irigaray, Hélène Cixous dan Julia Kristeva menggunakan psikoanalisa untuk menjelaskan subordinasi posisi perempuan (Tong, 2009). Ketiganya setuju dengan de Beauvoir bahwa perempuan menginternalisasi peran mereka sebagai yang liyan. Dengan menggunakan psikoanalisa dari Lacan, mereka menelusuri subordinasi perempuan melalui perbedaan seksual yang dikonstruksi dalam bahasa dan budaya (Thornham, 2006).

Feminisme gelombang kedua dikritisi oleh para perempuan kulit hitam, lesbian, dan perempuan pekerja yang kemudian membentuk gerakan radikal (Gubar, 2000; Jenainati dan Groves, 2007). Banyak pihak yang menganggap "*women's liberation*" hanya mengutamakan perempuan kulit putih dan gagal mencakup isu kelas dan ras (Zaslow, 2009: 28), meski Thompson (2010) berpendapat feminisme sejak awal selalu dipengaruhi oleh isu mengenai perempuan Afrika, Latina, dan Asia. Sementara itu, kaum lesbian menuduh feminisme gelombang kedua mengutamakan kaum heteroseksual dan mengesampingkan lesbianisme (Thornham, 2006), meski Whelehan (1995) dan Tong (2009) menunjukkan bahwa feminisme radikal dan feminisme lesbian berkembang secara simultan pada 1960an dan 1970an.

Secara umum, teori-teori feminis gelombang kedua dianggap "setengah ramalan setengah utopia (Bammer, 1991). Terlepas dari rasa solidaritas yang terbangun antar feminis gelombang kedua, selalu ada perbedaan antara perempuan dari berbagai kelas, ras, dan etnis. Karena itu, pencarian terhadap feminisme yang mampu mewakili seluruh perempuan merupakan sebuah utopia (Braidotti, 2003: 197), karena feminisme berakar dari berbagai isu yang berbeda dan karenanya memiliki sejarah dan perkembangan yang

majemuk (Whelehan, 1995; Gubar, 2000; Tong, 2009; Budgeon, 2011a).

Kenyataan mengenai perbedaan mendorong perkembangan feminisme ke berbagai arah yang berbeda. Feminisme gelombang kedua dianggap berakhir pada 1975 (Hewitt, 2010) dan pada akhir 1980an, feminisme berkembang secara divergen ke arah feminisme gelombang ketiga dan yang berbarengan dengan lahirnya postfeminisme yang kontroversial.

POSTFEMINISME/FEMINISME GELOMBANG KETIGA

Berbagai kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme pada akhir tahun 1980an. Menurut Brooks (1997: 8), setidaknya ada tiga hal yang mendorong terjadinya reartikulasi konsep-konsep feminisme. Pertama, dari dalam feminisme sendiri yang mulai melihat bahwa konsep mereka bersifat rasis dan etnosentris yang hanya mewakili perempuan kulit putih kelas menengah dan memarginalkan perempuan dari kelompok etnis dan kelas lainnya. Kedua, feminis gelombang kedua dianggap belum cukup menyoroti isu "*sexual difference*." Sementara itu, di luar feminisme, berkembang teori-teori postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme yang kemudian beririsan dengan perkembangan feminisme.

Dengan sedemikian banyaknya suara yang tak terwakili dalam feminisme gelombang kedua berpadu dengan perkembangan post-modernisme, perkembangan feminisme sejak akhir tahun 1980an menjadi sangat majemuk. Postmodernisme menolak wacana monolitik dan kebenaran tunggal serta pengaburan batas-batas adi budaya dengan budaya masa (dalam hal ini budaya populer). Dengan konsep-konsep postmodernis ini, banyak suara yang tadinya dipinggirkan mendapatkan kesempatan untuk menyoroti diri dan didengar. Hal ini mengakibatkan begitu banyak aliran yang

dapat dicakup dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua.

Dikotomi antara feminisme gelombang ketiga dan postfeminisme dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dialami mengenai penamaan perkembangan feminisme pasca 1970an. Jika keduanya dianggap sebagai perkembangan feminisme yang berbeda, maka keduanya merupakan perkembangan yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Jika keduanya dianggap perkembangan yang sama, ada usaha-usaha definitif dari beberapa feminis yang mendefinisikan diri mereka sebagai feminis gelombang ketiga dan atau sebaliknya postfeminist. Lebih jauh, kedua istilah tidak hanya sering dimaknai secara bertentangan, keduanya juga memiliki banyak definisi yang terkadang saling tumpang tindih dan saling bertentangan.

Istilah postfeminisme muncul lebih awal dalam sebuah artikel pada 1920. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sikap "pro perempuan namun tidak anti-laki-laki," yang merayakan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam meraih hak pilih (Faludi, 2006; Genz dan Brabon: 2009).

Istilah postfeminisme kembali muncul pada 1980an dengan makna yang sangat beragam. Gill dan Scharff (2011) merangkum adanya empat pengertian postfeminisme. Pertama, postfeminisme sebagai titik temu antara feminisme dengan postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme yang berarti postfeminisme merupakan pengkajian yang lebih kritis terhadap feminisme (Brooks, 1997).

Pengertian postfeminisme berikutnya mengacu pada perayaan matinya feminisme yang ditandainya dengan tercapainya tujuan-tujuan feminisme gelombang kedua pada 1970an sehingga tujuan-tujuan tersebut tidak lagi relevan pada 1980an (Tasker dan Negra, 2007 dikutip dalam Gill dan Scharff, 2011). Pengertian post-feminisme sebagai perayaan atas matinya feminisme ini

diajukan oleh para pendukung feminisme gelombang kedua. Tania Modleski, misalnya, melihat postfeminisme sebagai kajian yang menegasi dan meruntuhkan perjuangan kaum feminis dan mengantar perempuan kembali ke jaman pre-feminis (dikutip dalam Gamble, 2006: 37).

Pengertian postfeminisme yang ketiga menurut Gill dan Scharff (2011) adalah postfeminisme sebagai backlash. Susan Faludi merupakan salah satu proponent utama perumusan definisi postfeminisme sebagai backlash. Dalam buku fenomenalnya *Backlash: The Undeclared War Against American Women* (1991), Faludi merumuskan postfeminisme sebagai perang terhadap feminisme melalui media masa dan budaya populer. Media masa dan budaya populer digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan propaganda yang mendiskreditkan perempuan-perempuan yang telah teremansipasi. Backlash, menurut Faludi, mendapat dukungan dari pemerintah (2006: 291).

Definisi postfeminisme keempat yang dirangkum Gill dan Scharff (2011) adalah postfeminisme sebagai sensibility. Dengan mengacu pada pembahasan terhadap konsep "*double entanglement*" dari Judith Butler yang dilakukan oleh McRobbie (1994, 2009), postfeminisme merupakan "*both a doing and undoing of feminism*" yang mengartikulasikan konsep-konsep feminisme pendahulunya sekaligus melakukan peninjauan kembali atas konsep-konsep tersebut. Salah satu konsep feminis yang mengalami redefinisi adalah peralihan femininitas sebagai bagian dari tubuh dan perubahan focus dari objektifikasi perempuan ke subjektifikasi yang lebih menekankan pada kemampuan perempuan untuk membuat keputusan, pilihan, dan mempertanggungjawabkan diri sendiri.

Feminisme gelombang ketiga juga memiliki banyak definisi yang berbeda dan terkadang saling bertentangan. Para pencetus feminisme gelombang ketiga secara sistematis menyatakan diri mereka

sebagai reaksi atas postfeminisme. Mereka memiliki pandangan negatif terhadap postfeminisme. Para pelopor feminisme gelombang ketiga seperti Lyvonne Tasker dan Diane Negra memiliki pandangan negatif terhadap postfeminisme dan menarik dikotomi antara feminisme gelombang ketiga dan postfeminisme dalam hubungannya dengan budaya populer (Genz dan Brabon, 2009). Postfeminisme dinilai sebagai feminisme aras utama yang dimotori berbagai kepentingan komersial tanpa aktivitas ataupun agenda feminis yang jelas. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga menyatakan diri sebagai feminisme yang berkembang di dunia akademik, bersifat sistematis, dan bersifat lebih kritis.

Gamble (2006) melihat feminisme gelombang ketiga sebagai reaksi perempuan kulit berwarna terhadap dominasi perempuan kulit putih dalam feminisme gelombang kedua dan menolak asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat seragam dan universal. Lebih jauh, feminisme gelombang ketiga juga terlibat berbagai aktivitas turun ke jalan. Gamble menyerukan penggunaan istilah feminisme gelombang ketiga dan menolak penggunaan istilah postfeminisme karena implikasi negatif yang melekat pada makna postfeminisme.

Tong (2009) mendefinisikan feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan feminisme yang dimulai pada 1990an yang mendapat pengaruh dari feminisme-feminisme sebelumnya. Feminisme ini, lanjut Tong, memiliki rumusan agenda feminisme yang berbeda dari feminisme pendahulunya karena feminisme gelombang ketiga merayakan perbedaan (2009: 271). Berbeda dengan Gamble yang menentang istilah postfeminisme, Tong bahkan menolak untuk menyebut istilah postfeminisme dan memilih menggunakan istilah feminisme multicultural.

Shelley Budgeon (2011a) melihat feminisme gelombang ketiga sebagai feminisme yang sangat dipengaruhi oleh

budaya populer. Hal ini bertentangan dengan pendapat Tasker dan Negra serta pendapat Faludi di atas yang melihat postfeminisme sebagai feminisme yang merangkul budaya populer. Bagi Budgeon, feminisme gelombang ketiga melihat budaya populer sebagai objek kajian kritis dan menolak oposisi biner yang memarginalkan budaya populer (2011a: 280). Feminisme gelombang ketiga merupakan perkembangan feminisme yang mendekonstruksi dan mengevaluasi kembali feminisme sebelumnya agar dapat terus berkembang dan memfasilitasi perempuan pasca feminisme tahun 1970an (Budgeon, 2011b: 4).

Di sisi lain, Budgeon mendefinisikan postfeminisme sebagai perkembangan feminisme yang lebih kontradiktif terhadap feminisme gelombang kedua. Dalam pandangan Budgeon, postfeminisme merangkul sekaligus menolak feminisme. Budgeon sepakat dengan Angela McRobbie yang melihat postfeminisme sebagai perayaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan feminisme sehingga feminisme dapat dilihat sebagai masa lalu (McRobbie, 2009). Tercapainya tujuan-tujuan feminisme membuka jalan bagi perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat individual melalui gaya hidup dan pola konsumsi yang menjadi ciri khas postfeminisme (2011b: 281). Jadi, dalam pemahaman Budgeon dan McRobbie, feminisme gelombang ketiga bersifat global, aktifis, dan akademis sementara postfeminisme lebih bersifat individualistic, konsumtif, dan populer.

Zeisler (2008) melihat feminisme gelombang ketiga sebagai istilah yang memayungi berbagai perkembangan feminisme pasca gelombang kedua dengan berbagai definisi yang saling bertentangan. Sementara itu, postfeminisme dilihat sebagai bentuk protes dari generasi feminis non-akademis yang melihat feminisme sebagai gerakan yang sudah mencapai tujuannya dan karenanya sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Menurut

Zeisler, kemajemukan definisi feminisme gelombang ketiga disebabkan karena masing-masing pelopornya berusaha merumuskan gelombang feminisme ini menurut pengalaman individual atau kelompok semata (2008: 113). Dalam hal ini, Zeisler melihat feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan feminisme yang lebih individual yang antara lain disebabkan karena kegagalan feminisme gelombang kedua untuk memfasilitasi kemajemukan dalam rumusan feminisme hegemonis mereka.

Bertentangan dengan Zeisler, Brooks melihat postfeminisme sebagai istilah yang memayungi berbagai perkembangan feminisme pasca 1970an. Menurut Brooks, postfeminisme merupakan "a [sic] conceptual frame of reference encompassing the intersection of feminism with a number of anti-foundationalist movements [sic] represent[ing] feminism 'coming of age,' its maturity into a confident body of theory and politics, representing pluralism and difference and reflecting on its position in relation to other philosophical and political movements similarly demanding change". (Brooks, 1997: 1)

Definisi ini tidak menafikan gerakan-gerakan feminisme terdahulunya dan melihat postfeminisme sebagai perkembangan feminisme dipengaruhi oleh perkembangan berbagai bidang lainnya. Dengan pengaruh berbagai teori dan gerakan anti-fundalis yang mengakui kemajemukan dan perbedaan, definisi mengakui adanya berbagai aliran dalam perkembangan feminisme. Dengan sikap terbuka terhadap perkembangan di dunia filsafat dan dunia politik, definisi postfeminisme ini bisa menerima berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pasca feminisme gelombang kedua, baik yang bersifat teoretis maupun bersifat populer.

Namun terlepas dari berbagai kontradiksi dalam pendefinisian feminisme pasca gelombang ketiga, Genz dan Brabon

melihat bahwa feminisme gelombang ketiga maupun postfeminisme memiliki banyak persamaan. Bahkan keduanya sering digunakan sebagai istilah yang memayungi seluruh perkembangan feminisme pasca 1970an. Misalnya saja Brooks (1997) serta Genz dan Brabon (2009) menggunakan istilah postfeminisme untuk mencakup feminisme gelombang ketiga, sementara Zaslow (2009) dan Budgeon (2011) menggunakan feminisme gelombang ketiga untuk mencakup postfeminisme. Keduanya menentang agenda anti budaya populer dalam feminisme gelombang kedua dan mengakui budaya populer sebagai situs yang subur untuk mengartikulasikan feminisme dan pemberdayaan perempuan (Genz dan Brabon, 2009: 162). Dan dengan berpegang pada rumusan postfeminisme yang diusulkan Brooks (1997) serta Genz dan Brabon (2009), keduanya dipengaruhi oleh teori-teori postmodern dan keduanya merangkul perbedaan.

Pada akhirnya, usaha untuk membedakan postfeminisme dan feminisme gelombang ketiga dianggap sia-sia karena menurut Gamble, *"any attempt to differentiate between third wave feminism and postfeminism may be achieving nothing more than a little juggling with semantics"* (2006: 44). Menurut Genz dan Brabon, perbedaan antara postfeminisme dengan feminisme gelombang ketiga fenomena yang tak terhindarkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Barat yang rentan terhadap kontradiksi (2009: 162). Meski pendapat ini cenderung menggaris bawahi feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan yang didominasi dunia Barat, namun kesadaran feminisme untuk mengakui perbedaan dan merangkul kemajemukan menjadi modal sendiri bagi perempuan non-Barat untuk mengembangkan feminisme dengan keyakinan bahwa feminisme pasca gelombang kedua berkomitmen untuk merangkul aliran-aliran feminis yang berbeda.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa feminisme telah berkembang dari sekedar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio seperti layaknya laki-laki, feminisme berkembang menjadi gerakan yang memiliki aspirasi majemuk. Namun inti dari kesemua perjuangan tersebut adalah kesetaraan perempuan untuk menjadi subjek aktif dalam hidupnya. Masing-masing gelombang memiliki penekanan yang berbeda dalam tujuan periodiknya. Tujuan feminisme awal berevolusi dari perjuangan untuk diterima sebagai makhluk yang berasio menjadi tuntutan atas hak-hak perempuan yang lebih legal. Feminisme gelombang pertama berawal dari tuntutan yang sama atas pendidikan bertujuan untuk memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan formal berevolusi menjadi tuntutan untuk mendapatkan hak pilih. Kesetaraan dalam segala bidang dalam feminisme gelombang kedua kemudian berevolusi menjadi tuntutan atas hak-hak istimewa perempuan karena fisiologisnya yang berbeda dari laki-laki. Sedangkan feminisme gelombang ketiga dan/atau postfeminisme telah memiliki agenda yang sangat majemuk sejak awal dimulainya.

Perubahan dalam feminisme dari waktu ke waktu maupun kemajemukan feminisme pasca 1970an bukanlah sebuah kelemahan. Perubahan dalam tujuan-tujuan feminisme merupakan bukti bahwa feminisme dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan perempuan sesuai dengan tuntutan jaman yang dihadapi perempuan. Sedangkan kemajemukan dalam feminisme pasca gelombang kedua bukanlah hal yang baru bagi feminisme. Menurut Tong (2009), feminisme merupakan gerakan yang memiliki akar majemuk. Berbagai aliran yang muncul dalam feminisme, baik dalam feminisme gelombang kedua maupun gelombang ketiga merupakan perkembangan dari perbedaan-perbedaan yang telah dimiliki

feminisme sejak awal. Mereka berkembang ketika mendapatkan konteks yang tepat saat perempuan mendefinisikan perbedaan di antara mereka. Perbedaan-perbedaan ini memperkaya feminisme dan mendorong feminisme untuk terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bammer, Angelika. 1991. *Partial Visions – Feminism and Utopianism in the 1970s*. New York dan London: Routledge
- Braidotti, Rosi. "Feminist Philosophies" dalam *A Concise Companion to Feminist Theory* editor Mary Eagleton. Melbourne: Blackwell Publishing. 2003.
- Brooks, A. 1997. Brooks, Ann, 1997. *Postfeminism: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*. London dan New York: Routledge
- Budgeon, S. 2011a. *Third-Wave Feminism and the Politics of Gender in Late Modernity*. New Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan.
- Budgeon, S. 2011b. "The Contradictions of Successful Fertility: Third-wave Feminism, Postfeminism and 'New' Femininities" dalam *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity* editor Rosalind Gill dan Christina Scharff. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan. 2011.
- De Beauvoir, S. 1956. *The Second Sex*. London: Lowe and Brylign.
- Faludi, S. 1991/2006. *Backlash: The Undeclared War Against American Women*. New York: Three Rivers Press.
- Freidan, B. 1963. *The Feminine Mystique*. New York: Dell Publishing.
- Gamble, S. 2006. "Postfeminism" dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. Editor Sarah Gamble. London and New York: Routledge.
- Genz S. dan B. Brabon. 2009. *Postfeminism: Cultural Text and Theories*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Gillis, S., G. Howie, dan R. Munford. 2004. "Introduction" dalam *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Editor Stacy Gillis, Gillian Howie dan Rebecca Munford. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan.
- Gills dan Schraff. 2011. Gill, Rosalind dan Christina Scharff. 2011. *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity*. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan.
- Gleadle, 2002 Kathryn Gleadle, 2002. *Radical Writing on Women, 1800-1850*. Hampshire and New York: Palgrave MacMillan.
- Gubar, Susan. 2000. *Critical Condition: Feminism at the Turn of the Century*. New York: Columbia University Press.
- Hewitt, N.A. 2010. "From Seneca Falls to Suffrage? Reimagining a "Master" Narrative | US Women's History" dalam *No Permanent Waves: Recasting Histories of U.S. Feminism*. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press
- Hudgson-Wright, 2006. Hodgson-Wright, *Early Feminism*, dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, Sarah Gamble (2006).
- Jenainati Cathia dan Judy Groves, 2007. *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.
- Kirkham, M. 1997. Kirkham, Margaret. 1997. *Jane Austen, Feminism, and Fiction*. London and New Jersey: The Athole Press.

- McRobbie, A. 2009. *The Aftermath of Feminism – Gender, Culture, and Social Change*. London: SAGE Publications, Ltd.
- McRobbie, A. 1994. McRobbie, Angela. 1994. *Postmodernism and Popular Culture*, New York: Routledge.
- O'Brien, K. 2009. *OWmen and Elighenment in Eighteenth-Century Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Reilly, A. dan M. Porter. 2005. "Introduction" dalam *Motherhood: Power and Oppression*. Editor Marie Porter, Patricia Short dan Andrea O'Reilly. Toronto: Women's Press.
- Phoca, S dan R. Wright. 1999. *Introducing Postfeminism*. Cambridge: Icon Books, Ltd.
- Richardson, Alan. 2002. "Mary Wollstonecraft on Education" dalam *The Cambridge Companion to Mary Wollstonecraft*, editor Claudia I. Johnson. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.
- Ross, Sarah Gwyneth. 2009. *The Birth of Feminism – Women as Intellect in renaissance Italy and England*. Massachusetts dan London: Harvard University Press.
- Sanders, Valerie. 2006. "First Wave Feminism" dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble (2006).
- Siegel, Deborah. 2007. *Sisterhood Interrupted: From Radical Women to Grrls Gone Wild*. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan
- Thompson, Becky. 2010. "Multiracial Feminism: Recasting the Chronology of Second Wave Feminism" dalam *No Permanent Waves- Recasting Histories of US Feminism* editor Nancy Hewitt. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press. 2010.
- Thornham, S. 2006. "Feminism and Film" dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. Editor Sarah Gamble. London and New York: Routedge.
- Tong, R. 2009. Tong, Rosmarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 3rd Edition. Colorado: Westview Press
- Walters, Margaret. 2005. *Feminism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press
- Whelehan, Imelda. 1995. *Modern Feminist Thought – Second Wave to Postfeminism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zaslow, 2009 Emilie Zaslow. 2009: *Feminism, Inc. Coming of Age in Girl Power Media Culture*. New York: Palgrave MacMillan.
- Zeisler, A. 2008. *Feminism and Popular Culture*. California: Seal Press.